LAPORAN AKHIR
PEMETAAN KEBUTUHAN UNIT SEKOLAH BARU TINGKAT SDN dan SMPN
DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 3
A. Latar Belakang Masalah 3
B. Identifikasi Masalah 10
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan Penelitian 11
F. Manfaat Penelitian 11

BAB II KAJIAN TEORITIS 13
A. Sistem Informasi Geografis 13
B. Komponen Sistem Informasi Geografis 14
C. Pemetaan 16
D. Penduduk 19
E. Pendidikan 25
G. Aksesibilitas 38
H. Ketersediaan Lahan 39
I. Kajian Terdahulu 43
J. Psikologi Pendidikan 46
K. Kerangka Berpikir 48

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 52
B. Metode Penelitian 53
C. Variabel Penelitian 54
D. Populasi dan Sampel 54
E. Teknik Pengumpulan Data 55
F. Teknik Analisis Data 56
G. Teknik Validasi Pemetaan Kebutuhan Sekolah 63

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 64
A. Simulasi Pemetaan Rombel Dengan Jumlah Data Per Rombel 28 Peserta Didik 64
B. Rekomendasi Unit SDN Baru 100
C. Simulasi Pemetaan dan Kebutuhan SMPN 102

BAB V PENUTUP 112
A. Kesimpulan 112
B. Saran 112
C. Implikasi 113
D. Evaluasi 113
E. Rekomendasi 113

DAFTAR PUSTAKA 115

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan etnis yang beragam. Keberagaman tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Pendidikan bagi masyarakat Indonesia merupakan sebuah kebutuhan yang utama dalam mengolah kepribadian, pemikiran, akal dan perilaki melalui proses pembelajaran. Pendidikan di Indonesia dapat dilaksanakan secara formal maupun informal yang memiliki peranan penting dalam menjaga generasi yang akan datang untuk menjadi generasi yang lebih baik kedepanya melalui pembelajaran.

Tata sistem kelola pendidikan di Indonesia harus dilaksanakan secara optimal dengan mengembangkan pendidikan yang adil secara merata disetiap wilayah guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Generasi Emas 2024, Hal ini sangat relevan dengan visi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini didasarkan kepada setiap rakyat Indonesia yang dipercaya memiliki modal kecerdasan yang mumpuni untuk mewujudkan manusia yang lebih baik dan berkualitas.

Pendidikan Indonesia melalui pembelajaranya dilaksanakan dengan dibantu yang namanya infrastruktur maupun tenaga pedidik. Instrumen penting pendidikan inilah yang akan menunjang efektivitas pembelajaran Indonesia menjadi lebih berkualitas dan berkemajuan. Pendidikan diajarkan melalui lingkup terkecil yakni keluarga ataupun orangtua, kemudian ke jenjang sekolah yang paling dasar, hingga ke tingkat menengah.

Seacara umum, tujuan pendidikan di Indonesia secara nasional dan menyeluruh bagi warga negaranya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang diuraikan pada bab II tentang dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan, yang dijabarkan pada pasal tiga, yaitu:

> "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang ber iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab".[1]

Penjabaran tujuan pendidikan pada pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 dapat diketahui bahwa pendidikan bertujuan untuk mengubah rakyat Indonesia dari masyarakat yang tidak tahu menjadi masyarakat yang memiliki kemampuan serta watak yang sesuai kepribadian bangsa Indonesia.

Salah satu untuk mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia adalah melalui sarana lembaga pendidikan formal. Sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan formal yang ada di Indonesia. Tidak meratanya jumlah sarana pendidikan di Indonesia mengakibatkan tingginya persentasi warga negara yang tidak pernah sekolah atau mengalami putus sekolah.

Salah satu yang termasuk dalam program pendidikan wajib belajar sembilan tahun yaitu sekolah tingkat SDN dan SMPN. Sekolah menengah pertama negeri dan Madrasah tsanawiyah negeri merupakan tempat sentral pelayanan jenjang pendidikan lanjutan dari sekolah dasar di setiap wilayah.

Sebagai tempat sentral pelayanan pendidikan tingkat menengah pertama pada suatu wilayah maka para siswa akan memilih SDN dan SMPNsebagai tempat bersekolahnya. Hal ini disebabkan karena SDN dan SMPNdiselenggarkan oleh pemerintah dengan program wajib belajar sehingga biaya pendidikan SDN dan SMPNmendapatkan subsidi dari pemerintah dengan membebaskan siswa dari biaya pendidikan.

Pendidikan dasar merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini, keberadaan sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) sangat penting untuk mendukung akses pendidikan yang merata di seluruh wilayah. Namun, di banyak daerah, termasuk Kabupaten Tangerang, tantangan seperti pertumbuhan penduduk yang tidak merata, urbanisasi, dan keterbatasan lahan kerap menjadi hambatan dalam penyediaan unit sekolah baru.

Kabupaten Tangerang sebagai salah satu wilayah penyangga ibu kota memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan fasilitas pendidikan. Seringkali, distribusi sekolah tidak merata, mengakibatkan beberapa daerah mengalami kekurangan sekolah sementara daerah lain kelebihan kapasitas. Hal ini tidak hanya memengaruhi aksesibilitas pendidikan tetapi juga berpengaruh pada mutu layanan pendidikan itu

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: tt.p, 2003), h. 3.

sendiri.

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu dari delapan wilayah kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Banten berupaya untuk untuk meningkatkan pendidikan baik kualitas maupun kuantitas. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tangerang adalah mengikuti program wajib belajar 9 tahun.

Dalam implememtasi wajib belajar 9 tahun terdapat berbagai permasakahan, salah satu persoalan yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang adalah kepadatan penduduk. Fasilitas pendidikan dasar 9 tahun terutama tingkat SDN dan SMPN akan sangat diperlukan bagi wilayah kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi.

Berdasarkan data Badan Statistik Kabupaten Tangerang tahun 2023, Akumulasi kepadatan penduduk dari seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten tangeranag mencapai 3.309.365 jiwa. Jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Tangerang terletak di Kecamatan Padar Kemis yang mencapai 255.345 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah 44.152 jiwa. Berikut adalah tabel jumlah kepadatan penduduk di Kabupaten Tangerang berdasarkan data BPS Tahun 2023:[2]

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tangerang Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Cisoka	97.591
Solear	101.969
Tigaraksa	163.531
Jambe	55.650
Cikupa	209.140
Panongan	129.996
Curug	176.617
Kelapa Dua	167.553
Legok	124.324
Pagedangan	111.222

[2] Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2018*, (Kabupaten Tangerang: BPS, 2018), Katalog Bps. 1102001.3603, h. 42.

Cisauk	91.438
Pasar Kemis	255.345
Sindang Jaya	95.575
Balaraja	124.129
Jayanti	70.728
Suka Mulya	74.309
Kresek	71.795
Gunung Kaler	56.160
Kronjo	65.599
Mekar Baru	44.152
Mauk	91.382
Kemiri	50.977
Sukadiri	66.679
Rajeg	188.209
Sepatan	112.289
Sepatan Timur	105.994
Pakuhaji	127.330
Teluknaga	167.977
Kosambi	111.705
Jumlah	**3.309.365**

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang

Secara umum dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Tangerang dapat berpengaruh dalam menentukan kebijakan atau prioritas pembangunan kebutuhan fasilitas pendidikan SDN dan SMPNdisetiap kecamatannya.

Kemudian ditinjau dari ketersediaan jumlah sekolah tingkat SDN dan SMPN di beberapa kecamatan di Kabupaten Tangerang, masih terbatas dan belum merata di setiap kecamatannya. Adapun jumlah SDN dan SMPNdisetiap kecamatan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Banyaknya Jumlah SDN dan SMPN Di Tangerang Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah	
		SDN	SMPN
1	Balaraja	28	4
2	Cikupa	41	5
3	Cisauk	17	3
4	Cisoka	20	3
5	Curug	31	5
6	Gunung Kaler	21	2
7	Jambe	16	1
8	Jayanti	18	2
9	Kelapa Dua	23	2
10	Kemiri	15	2
11	Kosambi	28	3
12	Kresek	26	3
13	Kronjo	24	2
14	Legok	27	3
15	Mauk	28	2
16	Mekar Baru	17	3
17	Pagedangan	27	3
18	Pakuhaji	36	4
19	Panongan	26	3
20	Pasar Kemis	26	7
21	Rajeg	40	3
22	Sepatan	18	4
23	Sepatan Timur	19	3
24	Sindang Jaya	25	2
25	Solear	22	7
26	Sukadiri	18	1
27	Sukamulya	20	3
28	Teluknaga	39	4
29	Tigaraksa	38	5
Jumlah		**716**	**94**

Sumber: Dapokdikdasmen

Dilihat dari Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah fasiltas layanan satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Tangerang hanya berjumlah 94 sekolah, yang menunjukan masih tidak sebanding dengan jumlah penduduk seperti yang dipaparkan pada tabel 1.2.

Dari Tabel 1.2 dapat diketahui pula bahwa persebaran jumlah fasilitas pendidikan SDN dan SMPN di Kabupaten Tangerang tersebar tidak merata pada setiap wilayahnya. Wilayah kecamatan yang memiliki jumlah fasilitas pendidikan SDN terbanyak berada pada Kecamatan Rajeg dan SPMN banyak ada di Kecamatan Pasar Kemis. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan apabila dibandingakan dengan jumlah kepadatan penduduk pada kecamatan tersebut.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Tangerang perlu dikaji dan diprioritaskan dalam proses pembangunan kedepan. Hal ini dikarenakan pembangunan sekolah yang tidak merata dan adanya minat peserta didik yang memilih sekolah berstatus negeri dengan tujuan utama mengenyam pendidikan sebagai usaha mengikuti program wajib belajar 9 tahun.

Salah satu aspek lain untuk mendukung keberhasilan program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Tangerang adalah penentuan lokasi pembangunan sekolah menengah pertama. Semakin merata persebaran fasilitas pendidikan

SDN dan SMPN di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang maka akan semakin merata tingkat kesejahteraan pendidikan bagi masyarakatnya.

Berdasarkan data dari Dapodikdasmen, berikut adalah data jumlah peserta didik pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Kabupaten Tangerang pada tiap kecamatan.

Tabel 1.3
Jumlah peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah

No	Kecamatan	Jumlah Peserta didik SD	Jumlah peserta didik SMP
1	Kec. Pasar Kemis	26,687	11,729
2	Kec. Kelapa Dua	22,532	8,696
3	Kec. Rajeg	22,154	9,163
4	Kec. Cikupa	21,382	6,561
5	Kec. Tiga raksa	18,179	7,65
6	Kec. Curug	16,213	6,394
7	Kec. Teluk naga	15,403	6,001
8	Kec. Panongan	15,87	5,898
9	Kec. Sepatan	12,09	5,857
10	Kec. Balaraja	12,376	4,912
11	Kec. Pakuhaji	13,131	5,268
12	Kec. Solear	12,315	5,761
13	Kec. Legok	11,207	4,338
14	Kec. Kosambi	13,534	4,4
15	Kec. Cisoka	10,719	3,907
16	Kec. Sindang Jaya	10,467	3,394
17	Kec. Pagedangan	8,307	4,333
18	Kec. Mauk	8,727	3,114
19	Kec. Sepatan Timur	10,055	3,411
20	Kec. Jayanti	6,63	4,321
21	Kec. Kresek	6,578	2,956
22	Kec. Cisauk	7,846	3,555
23	Kec. Sukadiri	6,826	2,562
24	Kec. Sukamulya	6,659	2,681
25	Kec. Jambe	5,441	1,48
26	Kec. Kemiri	4,869	2,924
27	Kec. Gunung Kaler	5,514	1,942
28	Kec. Kronjo	5,719	1,774
29	Kec. Mekar Baru	3,988	1,76

Sumber: Dapokdikdasmen

Sebaran jumlah peserta didik tingkat SD dan SMP di Kabupaten Tangerang sangat mempengaruhi aksesibilitas serta pelayanan sekolah terhadap peserta didik yang akan melanjutkan jenjang pendidikan dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama di setiap kecamatannya.

Dari Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa jumlah peserta didikk SMP dan SD Kabupaten Tangerang paling banyak berada di Kecamatan Rajeg, Mauk, Solear,

dan Tigaraksa yang memiliki fasilitas pendidikan SDN dan SMPNpada lokasi kelurahan atau desa yang sama. Selain itu, apabila diperhatikan lebih jauh dengan memunculkan titik-titik koordinat sekolah dan peta satelit *google map* pada aplikasi sistem informasi geografis jelas terlihat bahwa SDN dan SMPN di Kabupaten Tangerang sangatlah berdekatan, walaupun pada dasarnya administrasi berbeda kelurahan atau desa pada kecamatan yang sama.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa lokasi pembangunan sekolah terutama SDN dan SMPN yang ada di Kabupaten Tangerang masih belum memahami konsep pemetaan yang baik. Sehingga apabila menggunakan sistem zonasi yang saat ini berlaku maka akan dirasa kesulitan bagi peserta didik yang tinggal di kelurahan atau desa yang yang tidak termasuk dalam kawasan zonasi akibat terlalu jauh.

Hal yang sangat perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang untuk saat ini adalah melakukan penambahan unit sekolah baru di tingkat SDN dan SMPNbagi wilayah kecamatan yang mengalami kekurangan fasilitas pendidikan akibat tidak sebandingnya jumlah penduduk usia 13-15 tahun dengan kapasitas daya tampung sekolah.

Sistem zonasi yang saat ini diberlakukan dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi wilayah mana saja yang membutuhkan unit sekolah baru atau penambahan ruang belajar sebagai upaya meningkatkan fasilitas sarana pendidikan SDN dan SMPNdengan mempertimbangkan kapasitas daya tampung, aksesibilitas, serta pelayanan yang dapat dilakukan. Selain itu sistem zonasi juga dapat dimanfaatkan sebagai tolak ukur untuk memetakan perencanaan pembangunan unit sekolah baru tingkat SDN dan SMPNdi Kabupaten Tangerang secara strategis dan terjangkau.

Pemanfaatan sistem informasi geografis untuk perencanaan pembangunan unit sekolah baru dalam pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan sesuai dengan standar yang ditentukan khususnya dalam menentukan kawasan yang strategis untuk lokasi perencanaan pembangunan SMPN dan MTsN dengan mengacu pada lokasi strategis, kemudahan ksesibilitas, serta pelayanan yang dapat terjangkau oleh peserta didik diharapkan menjadi salah satu solusi dalam perencanaan pembangunan bagi dunia pendidikan di Kabupaten Tangerang, dalam hal merealisasikan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara adil dan merata.

Untuk itu atas dasar latar belakang yang telah disampaikan peneliti akan membahasnya dalam pemetaan Kebutuhan Unit Sekolah Baru Tingkat SDN dan

SMPN Dengan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Di Kabupaten Tangerang Tahun 2024".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka identifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Tidak meratanya jumlah penduduk yang terjadi di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Hal ini mengakibatkan fasilitas pendidikan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang lebih cenderung memprioritaskan wilayah kecamatan yang penduduknya lebih padat atau lebih banyak.
2. Ketersediaan sekolah menengah pertama (SPMN) yang ada di masing-masing kecamatan tidak sebanding dengan jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang. Sehingga dalam hal ini memerlukan solusi penambahan ruang belajar atau perencanaan pembangunan unit sekolah baru.
3. Penentuan lokasi pembangunan sekolah menengah pertama (SMPN) di setiap kecamatan cenderung tidak menggunakan sistem pemetaan wilayah akibatnya masih banyak SDN dan SMPN di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang saling belum terfasilitasi dengan baik. Sehingga dalam hal perencanaan pembangunan unit sekolah baru memerlukan aplikasi sistem informasi geografis untuk menentukan lokasi yang sesuai untuk menghasilkan peta perencanaan pembangunan unit sekolah baru di kabupaten Tangerang Tahun 2024.

C. Batasan Masalah

Penelitian pemetaan ini hanya berada pada lingkup sebagai berikut:

a. Perbandingan jumlah penduduk usia 8-14 tahun dan 13-15 tahun dengan kapasitas daya tampung SDN dan SMPN dilakukan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang pada tahun 2014
b. Pemetaan kebutuhan unit sekolah baru tingkat SDN dan SMPN di Kabupaten Tangerang dengan menggunakan aplikasi SIG.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka permasalahan penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

a. Bagaimana perbandingan jumlah penduduk usia 8-14 tahun dan 13-15 tahun dengan kapasitas daya tampung SDN dan SMPN di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024?

b. Bagaimana pemetaan kebutuhan unit sekolah baru tingkat SDN dan SMPNdi Kabupaten Tangerang dengan menggunakan aplikasi 2024?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

a. Untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk usia 8-14 tahun dan 13-15 tahun dengan kapasitas daya tampung SDN dan SMPN di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang.
b. Untuk menghasilkan peta perencanaan kebutuhan unit sekolah baru tingkat SDN dan SMPN di Kabupaten Tangerang dengan menggunakan aplikasi SIG.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

i. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan sangat membantu peneliti dalam upaya meningkatkan wawasan mengenai pentingnya pemerataan sekolah bagi masyarakat di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang dengan memanfaatkan media sistem informasi geografis.

ii. Bagi Bidang Pendidikan

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan kajian materi mengenai sistem informasi geografis, dinamika kependudukan, dinamika interaksi manusia, hak asasi manusia, kehidupan sosial manusia, usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup, informasi keruangan, serta pembahasan ilmu lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan dalam materi pengajaran di sekolah sistem informasi geografis terdapat pada mata pelajaran geografi setingkat SMA/MA.

iii. Bagi Khalayak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pemahaman sekaligus memunculkan rasa peduli, dan rasa empati akan pentingnya pemerataan pendidikan serta perlunya pendidikan bagi masyarakat-masyarakat yang belum terjamah akan pendidikan.

iv. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan atau referensi tambahan mengenai pemetaan kebutuhan sekolah di wilayah Indonesia

yang akan bermanfaat bagi penelitian yang sudah ada ataupun yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah-wilayah lain yang belum melakukan pemetaan.

b. Manfaat Praktis

i. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah Kabupaten Tangerang dalam upaya menangani kekurangan dan penentuan lokasi yang strategis untuk pembangunan sekolah menengah pertama negeri.

ii. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan wilayah pada bidang pendidikan di Kabupaten Tangerang.

BAB II

KAJIAN TEIRETIS

A. Sistem Informasi Geografis

1. Pengertian Sistem Informasi Geografis

Perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat, hal ini ditandai dengan dimudahkannya akses untuk mendapatkan atau mengolah informasi tanpa harus mendatangi lokasi. Sistem informasi geografis (*Geographic Information* System) atau disingkat dengan SIG merupakan salah satu aplikasi sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial.

Istilah sistem informasi geografis memiliki beberapa definisi sebagai aplikasi yang mengelola informasi, yaitu sebagai berikut:

a. BIG (Badan Informasi Geospasial) dalam Sodikin

SIG adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan personal yang di desain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geospasial.[3]

b. Murai dalam Elly

SIG sebagai sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisi, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya.[4]

c. ESRI (*Environmental System Research Institute*) dalam Riyanto SIG adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografis dan personil yang dirancang efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan, semua bentuk informasi yang bereferensi geografi.[5]

---

[3] Sodikin, *Sistem Informasi Geografis & Penginderaan Jauh*, (Jakarta: tt.p, 2015), h. 199.

[4] Muhammad Jafar Elly, *Sistem Informasi Geografis: Menggunakan Aplikasi ArcView 3.2 Dan ErMapper 6.4*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 3.

[5] Riyanto, Prilnali EP., Hendi Indelarko, *Pengembangan Aplikasi Sisitem Informasi Geografis Berbasis Desktop Dan Web*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), h. 36

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi geografis merupakan suatu sistem komputerisasi untuk mengolah informasi yang bereferensi pada data geospasial dengan memanfaatkan data keruangan untuk menampilkan, memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, dan menganalisis semua bentuk informasi yang bereferensi geografi.

B. Komponen Sistem Informasi Geografis

Komponen sistem informasi geografis merupakan sebuah komponen pendukung sistem informasi geografis yang digunakan untuk keperluan mengolahan data, yaitu terdiri dari:

a. Perangkat Keras (*Hardware*)

Yaitu perangkat yang merupakan bagian dari sistem komputer yang dapat mendukung analisis geografis dan pemetaan. Perangkat keras tersebut terdiri dari :

1) *Digitizer*, yaitu alat yang digunakan untuk mengubah data *teristris* menjadi data digital.
2) *Plotter*, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak peta yang besar.
3) Printer, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak peta yang relatif kecil.
4) CPU atau *Central Processing Unit*, yaitu pusat pemprosesan data digital.
5) VDU atau *Visual Display*, yaitu komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menayangkan hasil pemprosesan CPU.
6) *Disk Drive*, yaitu bagian CPU yang mampu mengidupkan suatu program.
7) *Tape Drive*, yaitu bagian CPU yang mampu menyimpan data hasil pemprosesan.

b. Perangkat Lunak (*Software*)

Yaitu komponen SIG yang berupa program-program yang mendukung kerja SIG, seperti input data, proses data, dan output data, disamping program kerja seperti Mapinpo, Arcview, ArcGis dan sebagainya.

c. Brainware

Yaitu pelaksanaan yang bertanggungjawab dalam proses pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis.[4]

2. Cara Kerja Sistem Informasi Geografis

Adapun tahapan-tahapan kerja dalam pengolahan sistem informasi geografis, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Perolehan Data

Sistem informasi geografis memerlukan data masukan yang akurat agar dapat memperoleh informasi yang benar. Adapun data yang dapat diperoleh sebagai sumber dalam tahap perolehan data yaitu data lapangan (*teristris*), data peta, data citra dan *database.*

b. Tahap Input Data

Setelah data diperoleh, baik berupa data lapangan, data peta, data citra penginderaan jauh, maupun *database*, dimasukkan kedalam suatu program sistem informasi geografis.

c. Tahap Pengolahan Manipulasi dan Analisis Data SIG

Tahap selanjutnya merupakan tahapan manipulasi dan analisis data, tahap ini merupakan tahap inti dari keseluruhan rangkaian program sistem informasi geografis, sebagai berikut.

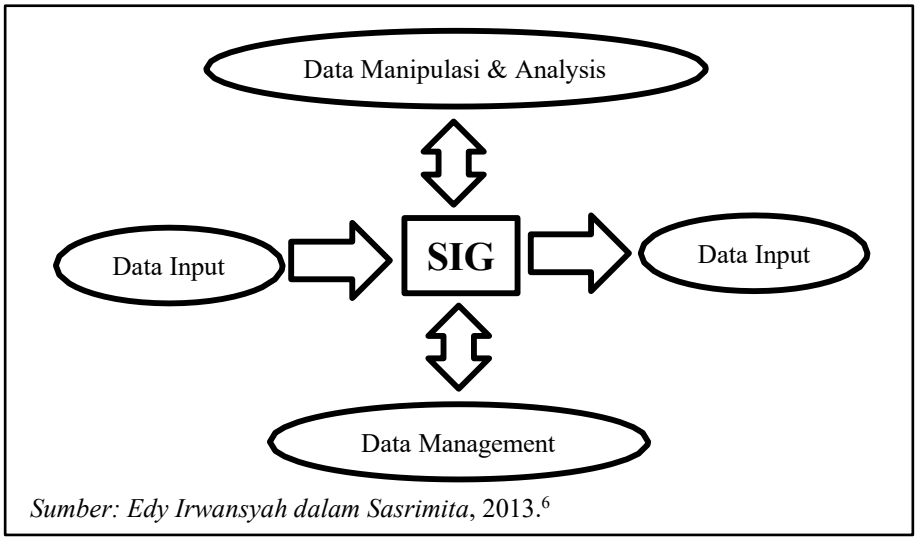
1) Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data spasial menjadi data spasial yang baru.
2) *Overlay,* yaitu menganalisis dan mengintegrasikan dua atau lebih data spasial yang berbeda.
3) *Networking*, yaitu analisis yang mengacu pada jaringan yang terdiri dari garis-garis dan titik-titik yang saling terhubung.
4) *Buffering,* yaitu analisis yang akan menghasilkan *buffer* atau penyangga yang bisa berbentuk lingkaran atau polygon yang melingkupi suatu obyek sebagai pusatnya.
5) Analisis tiga dimensi, yaitu analisis yang sering digunakan untuk memudahkan pemahaman karena data divisualisasikan dalm bentuk tiga dimensi.

d. Tahap Output Data SIG

Yaitu tahap keluaran yang disajikan sistem informasi geografis dari hasil pengolahan, manipulasi dan analisis data yang berupa bentuk peta, bagan, grafik, tabel, atau berupa hasil-hasil perhitungan (data numerik) yang terwujud dalam tampilan layar komputer pada kertas printer ataupun media lainnya.[6]

[6] Sodikin, *Sistem Informasi Geografis & Penginderaan Jauh*, h. 199-200

Adapun ilustrasi tahapan kerja dalam sub-sistem sistem informasi geografis, dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Sumber: Edy Irwansyah dalam Sasrimita, 2013.[6]

Gambar 2.1
Ilustrasi Sub-Sistem SIG

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi geografis merupakan suatu sistem komputerisasi untuk mengolah informasi yang bereferensi pada data geospasial dengan memanfaatkan data keruangan untuk menampilkan, memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, dan menganalisis semua bentuk informasi yang bereferensi geografi dengan menggunakan komponen-komponen komputerisasi serta tahapan-tahapan untuk menghasilkan output yang bersifat geografis.

C. Pemetaan

1. Pengertian Peta dan Pemetaan

Peta merupakan alat bantu yang dipergunakan manusia untuk menentukan tanda, arah lokasi, serta luasnya lokasi suatu wilayah dengan memberikan warna atau simbol-simbol tertentu. Secara singkat peta dapat diartikan sebagai suatu penyajian dari seluruh atau sebagian muka bumi pada suatu skala peta dan sistem proyeksi peta tertentu. Adapun beberapa tokoh ahli yang menjelaskan mengenai pengertian peta, yaitu:

a. K. Wardiyatmoko

Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai kenampakannya dari atas, peta umumnya digunakkan dalam bidang datar dan dilengkapi skala, orientasi dan simbol-simbol dengan kata lain peta adalah gambaran dipermukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan skala.

b. ICA (*International Carrografhic Association*)

Peta adalah suatu gambaran atau refresentasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi, yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa.

c. Erwin Raisz

Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas dengan ditambah tulisan-tulisan tanda pengenal

Untuk membuat suatu peta diperlukan suatu proses atau tahapan tertentu yang dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data sampai penyajian peta. Proses atau tahapan tersebut dinamakan pemetaan. Hadwi Soendjojo dan akhmad Riqqi mengungkapkan bahwa, "pemetaan adalah suatu proses yang melalui beberapa tahapan kerja (Pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data) untuk mendapatkan produk akhir peta". Adapun tahapan-tahapan dalam proses pemetaan, sebagai berikut.

a. Tahap pengumpulan data, yaitu survei lapangan (pengukuran koordinat), pemotretan udara, survei data sekunder.
b. Tahap pengolahan data, yaitu kegiatan menghitung dan mengolah [7]hasil pengumpulan data sesuai metode pemetaan yang menggunakan sistem referensi dan proyeksi peta tertentu.
c. Tahap penyajian data, yaitu kegiatan untuk menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk peta yang sering disebut sebagai kegiatan kartografi.[8]

Sehingga dapat disimpulkan, peta merupakan suatu gambaran permukaan bumi yang diperkecil dan dilukiskan pada pada bidang datar dengan menyertakan simbol, warna, skala serta unsur-unsur peta yang lainnya. Sedangkan pemetaan adalah suatu proses atau tahapan yang dilakukan dalam pembuatan peta.

2. Jenis-jenis Peta

Data dan informasi permukaan bumi yang disajikan pada suatu peta tergantung dari maksud dan tujuannya. Secara umum, Hadwi Soendjojo dan akhmad Riqqi membedakan tentang jenis-jenis peta sebagai berikut.

[7] Hadwi Soendjojo dan Akhmad Riqqi, *Kartografi*, (Bandung: ITB, 2012), h. 20
[8] *Ibid.,* h. 20-21.

a. Peta Topografi

Peta topografi memperlihatkan posisi horisontal serta vertikal dari unsur alam dan unsur buatan manusia dalam suatu bentuk tertentu. Adapun jenis peta yang termasuk kelompok peta topografi, yaitu:

1) Peta planimetrik, yaitu peta yang menyajikan beberapa jenis unsur muka bumi seperti jalan, sungai, rumah, dan batas administrasi.
2) Peta bathimetrik, yaitu peta yang menyajikan kedalaman air dan konfigurasi topografi bawah laut.
3) Peta teknik, yaitu peta yang menyajikan data muka bumi untuk keperluan proyek dan estimasi biaya kontruksi.

b. Peta Tematik

Peta tematik adalah suatu bentuk peta yang menyajikan unsur-unsur tertentu dari permukaan bumi sesuai dengan topik atau tema dari peta bersangkutan. Adapun jenis peta yang termasuk kelompok peta tematik, yaitu:

1) Peta diagram, yaitu peta yang menyajikan dua tau lebih subjek tematik yang berelasi disajikan dalam bentuk diagram proposional.
2) Peta choropleth, yaitu peta yang menyajikan ringkasan distribusi kuantitatif dengan basis deliminasi area.
3) Peta distribusi (*dot distribution maps*), yaitu peta yang menggunakan simbol titik kuantitatif untuk menyajikan suatu data yang spesifik, serta mempunyai kuantitas yang pasti dari sejumlah variabel.
4) Peta dasymetrik, yaitu peta sejenis peta choropleth, namun basisnya pada batas dari area yang di survei.
5) Peta chorochomatik, yaitu peta yang memperlihatkan distribusi kualitatif dari fenomena spesifik dan relasinya.
6) Peta isoline, yaitu peta yang memperlihatkan harga numerik untuk distribusi yang kontinu, dalam bentuk garis-garis yang terhubung pada suatu harga yang sama .
7) Peta alir, yaitu peta yang menyajikan informasi dalam bentuk garis tebal atau warna untuk memperlihatkan arah atau frekuensi pergerakan.

c. Chart

Chart adalah peta yang menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan unsur navigasi atau keselamatan perhubungan.

Adapun jenis peta yang termasuk kelompok chart, yaitu:

1) Peta navigasi laut (*Nauttical Chart*), yaitu peta yang menyajikan unsur-unsur laut dan daratan yang diperlukan untuk navigasi laut.
2) Peta navigasi udara (*Aero Nautical Chart*), yaitu peta yang menyajikan unsur-unsur daratan dan lautan untuk keperluan keselamatan navigasi udara.[9]

Secara keseluruhan pemetaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau tahapan yang dilakukan dalam pembuatan peta dengan tujuan untuk menampilkan gambaran muka bumi dengan menyertakan simbol, warna, skala serta unsur-unsur peta yang lainnya sesuai dengan hasil peta yang akan dihasilkan.

D. Penduduk

1. Pengertian Penduduk

Penduduk merupakan salah satu komponen penting dalam suatu negara. Suatu negara dikatakan baik, apabila negara tersebut mampu memanfaatkan serta mensejahterakan seluruh potensi yang dimiliki oleh penduduk negara di setiap wilayahnya.

Said dalam Mahsunah mengungkapkan bahwa "penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi".[10]Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, "penduduk diartikan sebagai orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu".[11]

Indonesia merupakan salah negara yang memiliki penduduk terbesar di dunia. Pemerintah Negara Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1946, mendefinisikan penduduk Negara Indonesia sebagai "tiap-tiap orang yang bertempat kedudukan di dalam daerah Negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut".[13] Sedangkan menurut Badan

[9] Durrotul Mahsunah, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur, *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 2013, h. 4.
[10] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, *Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, h. 1.
[11] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, *Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, h. 1.

Badan Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2015, penduduk Negara Indonesia diartikan sebagai "semua orang yang berdomisilih di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisilih kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap".[12]

Penduduk yang bersifat dinamis akan mengalami penambahan dan pengurangan jumlah penduduk. Moh Yasin mengungkapkan bahwa "pertumbuhan penduduk adalah merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan yang mengurang jumlah penduduk, dalam hal ini pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh dua cara yaitu reproduksi dan migrasi netto".[13]

Secara kuantitas jumlah banyak atau sedikitnya penduduk sangat berpengaruh terhadap pendapatan perkapita suatu negara. Moh. Yasin menghimpun suatu pendapat yang menyampaikan bahwa "jumlah penduduk yang besar adalah sangat menguntungkan bagi pembangunan ekonomi, tetapi apabila jumlah penduduk yang kecil atau sedikitlah yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik".[16]

Peningkatan jumlah penduduk akan selalau berbanding lurus dengan pemenuhan kebutuhan dan muculnya permasalahan yang beragam pada penduduk di suatu wilayah. Pemenuhan kebutuhan penduduk di kota yang bersifat fasilitas sosial dan fasilitas umum merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Fasilitas pemenuhan kebutuhan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah, yang dijelaskan pada bab satu mengenai ketentuan umum yang terdapat pada pasal 1, ayat 1 sampai ayat 4, sebagai berikut.

a. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
b. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
c. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
d. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari

[12] Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia Statistical Yearbook Of Indonesia 2015,* (Jakarta: BPS, 2015), Katalog BPS. 1101001, h. 72.
[13] Moh. Yasin, "Arti Dan Tujuan Demografi", dalam Prathama Rahardja (ed), *Dasar-Dasar Demografi*, (Jakarta : Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 5.

pengembang kepada pemerintah daerah.[14]

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas penduduk sangat berpengaruh terhadap peran pemerintah yang bertugas sebagai pemimpin dalam mengatur jumlah, persebaran, dan pengelolaan penduduk di suatu wilayah tertentu dengan menyediakan sarana-prasarana berupa fasilitas pemenuhan kebutuhan penunjang guna memperbaiki taraf hidup penduduknya.

2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk merupakan salah satu upaya untuk memudahkan pendataan atau pengelompokkan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Secara umum Moh. Yasin mengutarakan bahwa "komposisi penduduk dalam arti demografi adalah komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin".[15]

Menurut Harto Nurdian, pengelompokkan penduduk sangat berguna untuk berbagai maksud dan tujuan seperti:

a. Untuk mengetahui *Human Resources* yang ada baik menurut umur maupun jenis kelamin.
b. Untuk mengambil suatu kebijaksanaan yang berhubungan dengan kependudukan.
c. Untuk membandingkan keadaan suatu penduduk dengan penduduk lainnya.
d. Melalui penggambaran piramida penduduk dapat diketahui proses demografi yang telah terjadi pada penduduk tersebut.[16]

Harta Nurdin juga membuat klasifikasi bahwa "...pengelompokkan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu, yaitu:

a. Biologis
   1) Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, merupakan karakteristik penduduk yang pokok dan dapat di golongkan menurut umur satu maupun lima tahunan.
b. Sosial
   1) Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan, merupakan pengelompokkan penduduk berdasarkan kepandaian membaca dan menulis serta tingkat pendidikan yang ditamatkan.
   2) Komposisi penduduk menurut status perkawinan, merupakan pengelompokkan penduduk berumur 10 tahun ke atas dengan membubuhkan status perkawinan seperti: belum kawin, kawin, cerai, duda atau janda.
c. Ekonomi

[14] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, *Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah*, h. 2.

[15] Moh. Yasin, *Op.cit.,* h. 13.

[16] Harto Nurdin, " Struktur Dan Persebaran Penduduk" dalam Prathama Rahardja (ed), *Dasar-Dasar Demografi*, (Jakarta : Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 19.

1) Komposisi lapangan pekerjaan.
2) Komposisi status pekerjaan dan sebagainya.

d. Geografis
1) Komposisi penduduk berdasarkan tempat tinggal...".

Komposisi penduduk merupakan suatu usaha pengelompokkan data kependudukan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi tertentu dari data yang diperoleh, baik data yang bersifat biologis, sosial, ekonomi dan geografis dari penduduk disuatu wilayah.

3. Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan salah satu alternatif untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Martin mengungkapkan bahwa "proyeksi penduduk adalah suatu aktivitas memperkirakan suatu kondisi di masa depan berdasarkan data dan informasi di masa lampau dan masa kini".[17] Sedangkan menurut *Multilingual Demographic Dictionary* dalam Muliakusuma, "proyeksi penduduk adalah perhitungan (kalkulasi) yang menunjukkan keadaan fertilitas, mortalitas dan migrasi dimasa yang akan datang".[18]

Dapat disimpulkan bahwa proyeksi penduduk merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk mengolah data atau informasi kependudukan yang bersifat masa lampau dan masa kini untuk diolah sebagai proyeksi atau perkiraan yang menunjukkan suatu informasi demografi.

"...adapun tujuan proyeksi penduduk sebagai persyaratan minimum untuk proses perencanaan pembangunan, yaitu:

a. Dibidang pangan, menentukan kebutuhan akan bahan pangan yang sesuai dengan gizi serta susunan penduduk menurut umur.
b. Dibidang kesehatan, menentuan jumlah medis, dokter, obat-obatan, jumlah tempat tidur dirumah-rumah sakit yang diperlukan selama periode proyeksi.
c. Dibidang pendidikan, proyeksi penduduk dipakai sebagai dasar untuk memperkirakan jumlah penduduk usia sekolah, jumlah murid, jumlah guru, gedung-gedung sekolah, pendidikan pada masa yang akan datang.
d. Dibidang tenaga kerja, menentukan jumlah angkatan kerja, penyedia lapangan kerja yang erat hubungannya dengan proyeksi tentang memungkinkan perencanaan untuk memperhitungkan perubahan tingkat pendidikan, *skilled* dan pengalaman dari tenaga kerja.
e. Dibidang produksi barang dan jasa, dengan proyeksi angkatan

[17] Martin, *Perencanaan Pendidikan: Persfektif Proses Dan Teknik Dalam Penyusunan Rencana Pendidikan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013, h. 101.

[18] Sutarsih Muliakusuma, "Proyeksi Penduduk", dalam Prathama Rahardja (ed), *Dasar-Dasar Demografi*, (Jakarta : Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 249.

kerja dalam hubungan dengan data mengenai produktivitas merupakan dasr estimasi produksi barang-barang dan jasa di masa mendatang.[23]

Muliakusuma memaparkan bahwa, "...ada beberapa macam jenis perkiraan penduduk, yaitu:

a. Antar Sensus (*Intercensal*)

Intercensal disebut pula interpolasi adalah suatu perkiraan mengenai keadaan penduduk diantara 2 sensus (data) yang kita ketahui dengan prinsip pertumbuhan penduduk bersifat linear.

Rumus : $\mathrm{Pm} = \mathrm{Po} + \frac{m}{n}(\mathrm{Pn} - \mathrm{Po})$ atau

$$\mathrm{Pm} = \mathrm{Pn} - (\frac{n-m}{n})(\mathrm{Pn} - \mathrm{Po})$$

Keterangan :

Pn = Jumlah penduduk pada tahun n.
Po = Jumlah penduduk pada tahun awal.
Pm = Jumlah penduduk pada tahun yang di estimasikan.
m = Selisih tahun yang dicari dengan tahun awal.
n = Selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui.

b. Sesudah Sensus (*Postcensal*)

Postcensal adalah perkiraan mengenai penduduk sesudah sensus dengan prinsip pertambahan penduduk adalah linear.

Rumus : $\mathrm{Pm} = \mathrm{Po} + (\frac{n+m}{n})(\mathrm{Pn} - \mathrm{Po})$ atau

$$\mathrm{Pm} = \mathrm{Pn} + \frac{m}{n}(\mathrm{Pn} - \mathrm{Po})$$

Keterangan :

Po = Jumlah penduduk pada tahun awal.
Pn = Jumlah penduduk pada tahun n.
Pm = Jumlah penduduk pada tahun yang di estimasikan.
m = Selisih tahun yang dicari dengan tahun n.
n = Selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui.

c. Proyeksi (*Projection*)

Projection adalah perhitungan yang menunjukkan keadaan fertilitas, mortalitas dan migrasi dimasa yang akan datang. Ada beberapa metode perhitungan proyeksi, antara lain:

1) *Mathematical Method*

Digunakan ketika tidak mengetahui data tentang komponen daripada pertumbuhan penduduk, dalam hal ini yang diangap hanyalah penduduk keseluruhan.

a) *Arithmetic rate of growth*

Yaitu pertumbuhan penduduk dengan jumlah (absolut number) adalah sama setiap tahun.

Rumus : $Pn = Po\ (1 + r\ n)$

Keterangan :

Pn = Jumlah penduduk pada tahun n.
Po = Jumlah penduduk pada tahun awal.
r = Angka pertumbuhan penduduk.
n = Periode waktu dalam tahun.

b) *Geometric rate of growth*

Yaitu pertumbuhan penduduk yang menggunakan dasar bunga berbunga (bunga majemuk) sehingga pertumbuhannya sama untuk setiap tahun. Perhitungan ini bersifat linear.

Rumus : $Pn = Po\ (1 + r)^n$

Keterangan :

Pn = Jumlah penduduk pada tahun n.
Po = Jumlah penduduk pada tahun awal.
r = Angka pertumbuhan penduduk.
n = Periode/jangka waktu dalam tahun.

c) *Exponential rate of growth*

Yaitu pertumbuhan penduduk secara terus menerus (*continuous*) setiap hari dengan angka pertumbuhan yang konstan.

Rumus : $Pn = Po^{e^{rn}}$ atau

$Pt = Po^{e^{et}}$

Keterangan :

Pn = Jumlah penduduk pada tahun n.
Pt = Jumlah penduduk pada tahun t.
Po = Jumlah penduduk pada tahun awal.
r = Angka pertumbuhan penduduk.
n/t = Periode/jangka waktu dalam tahun.
e = Bilangan pokok sistem logaritma natural yang besarnya sama dengan 2,7182818.

2) *Component Method*

Digunakan untuk mencakup determinan-determinan

pertumbuhan penduduk dengan mengutamakan perubahan sebagai berikut.

a) Distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang telah dilakukan "*prorating*" dan "*adjustment*".
b) Menentukan *level of mortality* suatu penduduk tertentu.
c) Mengestimasikan pola fertilitas (ASFR).
d) Menentukan rasio jenis kelamin saat lahir (*sex ratio at birth*).
e) Menentukan pola migrasi (proporsi migrasi menurut umur)...".[19]

Berdasarkan pemaparan dapat disimpulkan bahwa penduduk adalah individu perorangan ataupun himpunan kelompok yang menempati suatu wilayah sesuai batas administrasi tertentu dengan melalui proses demografi serta memiliki tujuan untuk menetap dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan penduduk Negara Indonesia adalah individu atau perorangan yang bertujuan menetap di wilayah administratif Negara Indonesia dengan kurun waktu tertentu serta mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

E. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Perubahan taraf hidup setiap individu yang berada di masyarakat sangatlah dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimulai pada usia belia sampai dewasa. Menurut Waini Rasyidin, pendidikan mengandung suatu pengertian, "rangkaian kegiatan-kegiatan manusia tertuju terhadap manusia muda sebagai sesama secara bertanggung jawab, dalam situasi pergaulan dan kebersamaan, tempat upaya mempengaruhi dilakukan dengan penghargaan dan pendekatan pribadi".[20] Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto, yang mendefinisikan pendidikan sebagai suatu pengertian,"segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan".[21]

Para tokoh mancanegara pada bidang pendidikan memaparkan

---

[19] *Ibid.,* h. 250-259.

[20] Waini Rasyidin, *Pedagogik Teoritis Dan Praktis*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014), Cet. I, h. 17.

[21] M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendiikan Teoritis Dan Praktis*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), Cet. XIX, h. 10.

beberapa pengertian sebagai sumbangsi pemikiran mengenai konsep pengertian pendidikan. Marzuki Mahmud mengemukakan beberapa pengertian pendidikan menurut para tokoh ahli sebagai berikut.

a. Mudyahardjo
   Pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup serta pendidikan dapat diartikan sebagai pengajaran yang di selenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.
b. Muhibinsyah
   Pendidikan diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.
c. John Deway
   Pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir atau daya intelektual, maupun daya emosional atau perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya.[22]

Pendidikan sebagai pondasi utama di Negara Republik Indonesia memiliki perananan yang sangat penting dan menjadi hal yang utama. Peranan penting tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada alinea ke-4 yang berbunyi sebagai berikut.

> Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.[23]

Amanat yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, memberikan suatu konsep pengertian pendidikan dan pengertian pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun

[22] Marzuki Mahmud, *Landasan Pendidikan*, (Tangerang Selatan: Haja Mandiri, 2014), Cet. II, h. 18-19.

[23] Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat.(Jakarta:Sekretariat Jenderal MPR RI 2007). h.48.

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan pada bab satu mengenai ketentuan umum yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, yaitu sebagai berikut.

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendaian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.[24]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang dimulai dari usia belia sampai akhir hayat dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan rohani dan jasmani melalui proses belajar dilembaga pendidikan formal maupun non formal dengan bantuan orang yang lebih dewasa dan menggunakan metode-metode tertentu sehingga terwujudnya suatu kemampuan dasar yang fundamental dalam membentuk manusia yang berkualitas.

2. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan selalu di formulasikan dengan memperhatikan konteks budaya, keagamaan dan hal-hal yang berhubungan langsung maupun tidak langsung kepada manusia dan dimana manusia itu berada. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diselenggarakan dengan tujuan "membantu siswa menjadi manusia yang merdeka dan mandiri, serta mampu memberi kontribusi kepada masyarakatnya".[25]Ngalim Purwanto menggambarkan bahwa tujuan pendidikan ditentukan oleh zaman dan kebudayaan di tempat hidup.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nsasional maka dirumuskan

[24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, h. 1-2.

[25] Y. Suyitno, "Tokoh-tokoh Pendidikan Dunia (Dari Dunia Timur, Timur Tengah Dan Barat)" *Tesis* pada Program Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, (Bandung: 2009), h. 14, tidak dipublikasikan.

dalam suatu undang-undang sistem pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan pada bab dua mengenai dasar, fungsi dan tujuan yang terdapat pada pasal 3, yaitu sebagai berikut.

> Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
>
> Atas dasar terbentuknya suatu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi landasan suatu tujuan pendidikan nasional, maka negara Indonesia mengembangkan suatu garis besar kebijakan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada pasal 31, yang menyatakan hal-hal berikut.
>
> a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
> b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
> c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
> d. Negara memperioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
> e. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan merupakan suatu keinginan yang ingin dicapai baik dunia maupun akhirat dalam suatu penyelenggaraan pendidikan dengan memperhatikan konteks sosial, budaya dan keagamaan yang berlaku disuatu masyarakat bangsa setempat. Tujuan pendidikan nasional Indonesia merupakan suatu kehendak atau cara yang ingin dicapai masyarakat Indonesia dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan upaya-upaya dari pemerintah dalam terlaksananya penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai identitas bangsa.

3. Jenjang Pendidikan

Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban yang dimulai dari usia belia sampai akhir hayat melalui beberapa proses tahapan pendidikan. Komisi pembaharuan pendiidkan dalam Marzuki mahmud menyatakan bahwa "salah satu asas pendidikan bagi Indonesia, yakni asas perikehidupan dalam keseimbangan, yang berarti harus mempertimbangkan segala segi kehidupan manusia, misalnya jasmani rohani, dunia akhirat, individu dan sosial, intelektual, kesehatan, keindahan dan lain sebagainya"

Secara formal, jenjang pendidikan di Negara Republik Indonesia terdapat pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 pada pasal 14 yang berisikan bahwa, "jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi".

Adapun penjelasan mengenai pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi akan diuraikan sebagai berikut.

a. Pendidikan Dasar

Tahap pertama dalam jenjang pendidikan formal di Negara Indonesia adalah pendidikan dasar. Hal ini terdapat pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan pada bab enam mengenai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang terdapat pada bagian dua, pasal 17 ayat 1 sampai ayat 3, sebagai berikut.

1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.[41]

b. Pendidikan Menengah

Tahap kedua dalam jenjang pendidikan formal di Negara Indonesia adalah pendidikan menengah. Hal ini terdapat pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan pada bab enam mengenai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang terdapat pada bagian ketiga, pasal 18 ayat 1 sampai ayat 4, sebagai berikut.

1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
3) Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.[42]

c. Pendidikan Tinggi

Tahap ketiga dalam jenjang pendidikan formal di Negara Indonesia adalah pendidikan tinggi. Hal ini terdapat pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan pada bab enam mengenai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang terdapat pada bagian keempat, pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut.

1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenjang pendidikan merupakan suatu tingkatan yang dilalui manusia dalam memperoleh kemampuan melalui suatu proses usahan guna mengembangkan potensi dirinya. Jenjang pendidikan di Negara Indonesia memiliki tiga tahapan proses yang disesuaikan dengan sistem kebudayaan dan kemampuan masyarakat Negara Indonesia dengan mengacu pada aturan dan falsafah negara.

Secara keseluruhan pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan melalui tahapan berupa jenjang pendidikan yang dimulai dari usia belia sampai akhir hayat dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan rohani dan jasmani melalui proses belajar dilembaga pendidikan formal maupun non formal.

F. Lokasi

1. Pengertian Lokasi

Manusia dalam menjalani kegiatan di permukaan bumi memiliki tempat atau ruang untuk berinteraksi. Kegiatan manusia dalam memanfaatkan ruang akan menunjukkan suatu lokasi sebagai penanda kegiatannya. Hagget dalam Hargito mengungkapkan bahwa, "lokasi tempat dalam suatu ruang dapat dideskripsikan dalam bentuk lokasi absolut dan lokasi relatif". Menurut Suharyono, yang dimaksud dengan letak absolut atau letak astronomis "yaitu letak yang mendasarkan pada kedudukan suatu tempat dimuka bumi yang bulat bagaikan bola menurut garis lintang dan garis bujurnya".[26] Masih menurut Suharyono, "letak relatif atau letak geografis merupakan letak atau kedudukan suatu tempat atau wilayah dalam hubungannya dengan keadaan atau kondisi lingkungan sekitarnya".[46]

Hakikatnya seluruh kegiatan manusia di permukaan bumi memiliki ruang dan saling keterkaitan pada suatu lokasi. Hal ini memunculkan asumsi bahwa landasan dari lokasi adalah ruang.[47] Dalam studi tentang wilayah, Tarigan mengungkapkan bahwa, "yang dimaksud dengan ruang adalah permukaan bumi baik yang ada diatasnya maupun yang ada dibawahnya sepanjang manusia awam masih bisa menjangkaunya".[48] Untuk memperkuat pendapat studinya, dalam studi ruang Tarigan mengingatkan bahwa, "yang menjadi perhatian bukanlah kemampuan kita untuk membuat daftar tentang posisi berbagai benda atau kegiatan yang ada dalam satu ruang wilayah melainkan analisis atas dampak atau keterkaitan antara kegiatan di suatu lokasi dengan berbagai kegiatan lain pada lokasi lain".[49]

Untuk memahami atau mempelajari suatu lokasi, maka diperlukan studi mengenai lokasi. Studi lokasi menurut Tarigan adalah "melihat kedekatan atau jauhnya satu kegiatan dengan kegiatan lain dan apa dampaknya atas kegiatan masing-masing karena lokasi yang berdekatan atau berjauhan tersebut".[50] Lebih lanjut Doldjoeni dalam Miarsih

[26] Suharyono, *Dasar-Dasar Kajian Geografi Regional*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 36.

mengungkapkan bahwa terdapat tiga konsep mengenai lokasi kegiatan, yaitu:

a. Jangkauan (*range*), maksudnya seberapa jauh jarak yang mampu ditempuh untuk membeli barang dan jasa pada tigkat harga tertentu.
b. Batas ambang penduduk (*treshold*), biasanya jumlah penduduk minimal yang dibutuhkan atau membutuhkan suatu fasilitas tertentu.
c. Tempat pusat (*central* place), yaitu suatu pusat yang melayani perkotaan dan pedesaan serta wilayah yang lebih besar lagi daripada wilayahnya sendiri dengan masing-masing tempat pusat tersebut menawarkan batas ambang populasi dan jangkauan fungsi untuk wilayah komplemen yang dilayani.[51]

Konsep Doldjoeni kemudian diberikan pertimbangan-pertimbangan oleh Rusthone dalam Miarsih yang mengungkapkan bahwa, "perilaku dari kegiatan pada umumnya adalah memaksimalkan akses pada komunitas masyarakat".[52] Hal ini beralasan karena akses yang merupakan pondasi utama terjadinya sebuah interaksi antara antara penduduk yang satu dengan penduduk yang lain.

Maka dapat disimpulkan bahwa lokasi merupakan tempat dipermukaan bumi yang dimanfaatkan oleh manusia guna terbentuknya interaksi sesama manusia dengan memperhatikan dampak atau keterkaitan antara kegiatan di suatu lokasi dengan berbagai kegiatan di lokasi lainnya.

2. Teori Lokasi

Lokasi dalam kaitannya sebagai ilmu memiliki sebuah landasan berupa teori. Menurut Tarigan teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial.[53] Sedangkan menurut Hover dan Giarratani dalam Miarsih, mengungkapkan bahwa "secara umum, pemilihan lokasi oleh suatu unit aktivitas ditentukan oleh beberapa faktor seperti: bahan baku yang dapat dipindahkan (*transferred input*) dan permintaan (*outside demand*).

Menurut Tarigan, "salah satu hal yang yang dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang berpergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Hal ini beralasan bahwa jarak menciptakan gangguan karena memiliki kendala terhadap waktu dan tenaga dalam hal ini menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk mencapai lokasi yang satu ke lokasi lainnya.

Walter Chistaller seorang geograf asal kebangsaan Jerman pada

tahun 1933 mengemukakan teori lokasi yang dikenal sebagai "teori tempat sentral" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan "*Central Place Theory*".[27] Adapun judul buku yang yang ditulis oleh Walter Christeller dalam Hamdi yang menggunakan bahasa Jerman, yaitu:

> "*Die Zentrale Orte In Suddeutsschland: Ein Okonomisch-Geographische Untersuchung Uber Die Gesetzmassigkeit Der Verbreitung Und Entwichklung Der Siedlungen Mit Stadtischen Funktionmen, Jena, 1993.* (Suatu penelitian geografi-ekonomi mengenai keberaturan hukum sebaran dan perkembangan dengan fungsi-fungsi kekotaan)".[57]

Walter Christaller dalam Hamdi menyampaikan bahwa ada lima asumsi untuk mengkontruksi teori lokasi yang sifatnya keruangan di bidang ekonomi, yaitu:

a. Karena para konsumen yang menanggung ongkos angkutan, maka jarak ke tempat pusat yang dinyatakan dalam biaya dan waktu, amat penting.
b. Karena konsumen yang memikul ongkos angkutan, maka jangkauan (*range*) suatu barang ditentukan oleh jarak yang dinyatakan dalam biaya dan waktu.
c. Semua konsumen dalam usaha mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan, menuju ke tempat pusat yang paling dekat letaknya.
d. Kota-kota berfungsi sebagai *central place* bagi wilayah di sekitarnya. Artinya ada hubungan atara besarnya tempat pusat dan besarnya (luasnya) wilayah pasarana, banyaknya penduduk dan tingginya pendapatan di wilayah yang bersangkutan.
e. Wilayah tersebut digagaskan sebagai daratan dimana penduduknya tersebar merata dan ciri-ciri ekonomisnya sama (besar penghasilannya sama).[58]

Rohe.W dalam Hargito menyampaikan bahwa, "...ada dua faktor yang menurut Christaller dianggap berpengaruh terhadap jumlah, luas dan tingkat kepusatan, yaitu:

a. Batas ambang penduduk (*threshold population*) adalah minimum jumlah penuduk yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pelayanan suatu pusat sentral, atau minimum yang diperlukan untuk kelancaran *supplay* barang dan jasa.
b. Jangkauan pasar (*range of a good*) adalah jarak maksimal area suatu pelayanan terhadap lokasi antara tempat tinggal penduduk dengan lokasi tempat mendapatkan barang dan jasa yang

[27] Asep Hamdi, "Analisis Sebaran Lokasi SMP Negeri Kaitannya Dengan Aksesibilitas Mendapatkan Pendidikan Di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten" *Skripsi* pada Jurusan Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (Jakarta: 2009), h. 15, tidak dipublikasikan.

diinginkan, dimana penduduk masih bersedia menempuhnya..."

Berdasarkan pada asumsi Christaller, maka Miarsih membuat sebuah kesimpulan bahwa, "orang-orang yang tinggal di kawasan pengaruh tempat-tempat sentral yang bertampalan, mereka akan pergi ke tempat sentral yang paling dekat".

Sehingga disimpulkan bahwa teori lokasi merupakan hasil pemikiran tentang sebuah ilmu yang mengkaji tentang ruang, tempat atau lokasi yang berkaitan dengan kegiatan manusia dipermukaan bumi dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya dengan mempertimbangan jarak antara lokasi yang satu dengan lokasi lain yang saling mempengaruhi.

3. Lokasi Sekolah

Pemerataan pendidikan merupakan salah satu program pemerintah dalam membantu program wajib belajar yang dicanangkan bagi penduduk negara Indonesia. Salah satu upaya yang perlu dilakukan pemerintah dalam merealisasikan pemerataan pendidikan tersebut adalah dengan membangun unit sekolah baru. Konsep penyediaan sarana unit sekolah baru harus bersifat efisien dan ekonomis dalam melayani seluruh lapisan masyarakat melalui pendekatan yang integratif yang diharapkan dapat meningkatkan layanan pendidikan terhadap perkembangan permukiman yang ada di seluruh wilayah Negara Indonesia terutama wilayah pemukiman pinggiran.

Menurut Isbiyantoro dalam Miarsih, hubungan antara sekolah dengan masyarakat dapat dilihat dari dua segi yaitu:

a. Sekolah sebagai patner dari masyarakat di dalam melakukan fungsi pendidikan.
b. Sekolah sebagai produser yang melayani pesanan pendidikan dari masyarakat.

Djojodipuro dalam Miarsih berpendapat bahwa. "gedung sekolah seharusnya dibangun pada lokasi yang dapat dijangkau oleh seluruh siswa yang akan bersekolah pada sekolah tersebut".[61] Untuk mendukung pendapatnya Djojodipuro masih dalam Miarsih memberikan alasan dengan berlandaskan teori lokasi Christaller yang beranggapan bahwa, "lokasi sentral merupakan tempat yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara maksimal dalam hal jumlah".

Penentuan lokasi sekolah dalam hal ini adalah sekolah menengah pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) memiliki aturan standar

sarana dan prasarana. Aturan standar sarana dan prasarana tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Nasional nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD atau MI, SMP atau MTs, dan SMA atau MA, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Satu SMP atau MTs memiliki minimum tiga rombongan belajar dan maksimal dua puluh empat rombongan belajar.
b. Satu SMP atau MTs dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 2.000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2.000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari dua puluh empat dilakukan pembangunan SMP atau MTs baru.
c. Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP atau MTs yang dapat menampung semua lulusan SD atau MI di kecamatan tersebut.
d. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1.000 jiwa dilayani oleh satu SMP atau MTs dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki minimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.[28]

Rombongan belajar merupakan kapasitas kelompok belajar peserta didik dalam satu kelas belajar. Jumlah minimum dan maksimum rombongan belajar yang dilaksanakan di SMP atau MTs diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 17 tahun 2017 pada pasal 24, yaitu " SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik".[29]Sedangkan jumlah rombongan belajar untuk satu sekolah dijelaskan pada pasal 26, yang menyebutkan bahwa "SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar".

Aturan lain yang menjadi dasar penentuan lokasi suatu sekolah yaitu mengetahui kelayakan lokasi atau lahan yang digunakan untuk mendirikan suatu bangunan sekolah. Analisi dampak lingkungan diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya potensi bahaya yang mengancam, baik itu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan serta akses lokasi tanggap darurat.

Adapun gangguan-gangguan yang perlu dihindari dalam penentuan

[28] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, *Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA*, (Jakarta : tt.p, 2007), h. 15.

[29] Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, *Tentang PPDB Pada Taman Kanak-kanak, SD, SMP, Dan SMA, SMK Atau Bentuk Lain Yang Sederajat*, (Jakarta : tt.p, 2017), h. 13.

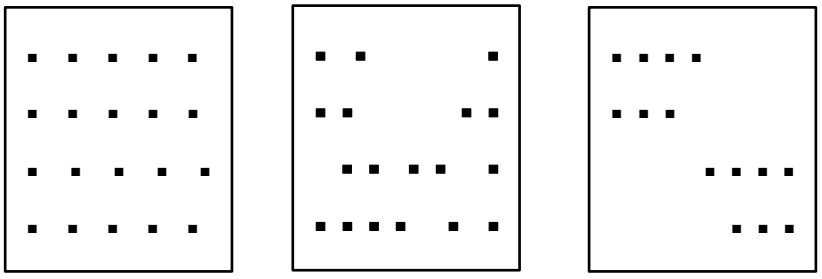
lahan untuk lokasi sekolah menurut PERMENDIKNAS Tahun 2007, yaitu:

a. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15% tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
b. Terhindar dari pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
c. Terhindar dari kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH No. 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
d. Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH No. 02/MENKLH/1998 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan. [30]

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasi sekolah merupakan tempat layanan pendidikan yang bersifat efisien dan ekonomis untuk masyarakat dimana sekolah bersifat sebagai produser dan patner dalam bidang belajar mengajar dengan mempertimbangkan kemudahan jarak, akses, pelayanan, kenyamanan dan keamanan berpendidikan. Lokasi sekolah yang baik, yaitu sekolah yang memiliki aktivitas pendidikan dengan baik serta kemudahan dalam mengakses sekolah oleh masyarakat tanpa adanya gangguan-gangguan yang tidak diinginkan.

4. Pola Persebaran

Pembangunan yang dilakukan manusia dipermukaan bumi memiliki beberapa karakteristik tertentu yang membentuk sebuah pola persebaran. Sumaatmaja dalam Hamdi mengemukakan bahwa "penyebaran gejala dan fakta tidak merata tersebar dari satu wilayah ke wilayah lain". Gejala penyebaran tersebut membentuk suatu pola penyebaran tertentu. Hagget dalam Hargito memberikan gambaran pola penyebaran pemukiman dalam tiga bentuk, yaitu " tipe reguler (tersebar merata), tipe random (tersebar tidak merata), dan tipe *clustered* (tersebar bergerombol)". Pola penyebaran yang digambarkan oleh Hagget tersebut dapat dijelaskan melalui Gambar 2.2.



Tipe Reguler Tipe Random Tipe *Clustured*

Sumber: Hagget Dalam Hargito[69]

Gambar 2.2

[30] PERMENDIKNAS RI No. 24 Tahun 2007, *Op.cit.*, h. 16.

Jenis Pola Penyebaran

Salah satu model yang dering dimanfaatkan dalam melakukan analisis keruangan adalah analsisi tetangga terdekat (*nearest neighbour analysis*). Menurut Hagget masih dalam Hargito menjelaskan bahwa, "Analisis tetangga terdekat telah dikembangkan oleh King tahun 1962 dalam analisis komparatif terhadap 20 daerah sampel di Amerika Serikat".[70] Tahap evaluasi dalam model pola penyebaran dengan menggunakan analisis tetangga terdekat yang diungkapkan ke dalam skala *R* (R *scale*).

Menurut Meurice dalam Hamdi, analisis tetangga terdekat menggunakan model matematika sebagai berikut:[71]

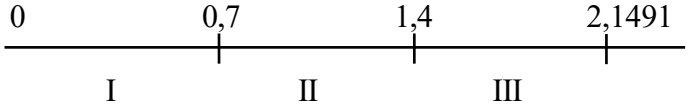
$$R = \frac{r_A}{r_E} = \frac{(\sqrt[2]{p})\sum}{N}$$

Syarat :

$$r_A = \frac{\sum r}{N} \qquad r_E = \frac{1}{\sqrt[2]{p}} \qquad p = \frac{\text{Jumlah titik tempat (N)}}{Luas\ area\ yang\ diobservasi}$$

Keterangan:
R = Skala R (Jenis Pola Penyebaran)
r = Jarak tiap titik tempat ke tetangganya yang terdekat (A = aktual)
N = Jumlah titik tempat
Σr = Jumlah jarak tiap titik tempat ke tetangganya yang terdekat

Nilai R berkisar diantara nol (0) sampai dengan 2,1491, atau dijadikan matriks menjadi :



Keterangan :
I = Pola bergerombol (*Cluster Pattern*)
II = Pola tersebar tidak merata (*Random Pattern*)
III = Pola tersebar merata (*Dispersed Pattern*)

Menurut Bintarto dalam Hargito memberikan langkah-langkah untuk mengetahui nilai *R*, sebagai berikut:

a. Menentukan batas wilayah yang akan diselidiki.
b. Mengubah pola penyebaran pemukiman menjadi pola titik.
c. Memberikan nomor urut bagi tiap-tiap titik untuk mempermudah analisis.
d. Mengukur jarak terdekat yaitu jarak pada garis lurus antara satu titik dengan titik lain yang merupakan tetangga terdekat.
e. Menghitung besar parameter tetangga terdekat (*nearest neighbour statistic*).[72]

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pola pesebaran merupakan suatu gejala dan fakta yang mengidentifikasi persebaran suatu keadaan tertentu yang ada dipermukaan bumi dengan membentuk suatu gambaran atau pola-

pola yang dapat diidentifikasikan. Adapun analisis untuk mengidentifikasikan pola persebaran dapat digunakan model analsiis tetangga terdekat untuk melakukan studi perbandingan pada suatu ruang atau mengungkapkan pola ruang yang saling bersangkutan.

Secara umum lokasi dapat disimpulkan sebagai suatu letak dipermukaan bumi yang dimanfaatkan oleh manusia guna terbentuknya interaksi sesama manusia dengan mempertimbangkan kegunaan serta manfaat untuk penentuannya.

G. Aksesibilitas

Bintarto dalam Miarsih menyatakan bahwa aksesibilitas menunjuk adanya kemudahan bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dalam suatu wilayah yang erat kaitannya dengan jarak.[73] Masih dalam Miarsih, Hagerstand membedakan adanya dua jenis aksesibilitas, yaitu "aksesibilitas sosial yang meliputi persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan aksesibilitas fisikal, yaitu jarak fisik yang harus ditempuh seseorang untuk mencapai pelayanan".[31]

Aksesibilitas lokasi sekolah dalam kaitannya dengan jarak, memiliki standar ukuran tertentu. Menurut Suharjdo dalam Miarsih menjelaskan bahwa, "...ada tiga dimensi dalam ukuran jarak, yaitu:

1. Jarak fisik/geometrik, diukur dengan satuan panjang.
2. Jarak waktu, diukur dengan satuan ukuran waktu tempuh bisa jam, menit, dll.
3. Jarak ekonomi, dihitung dengan biaya yang dibutuhkan untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain

.

Menurut De Chiara dan Koppelman dalam sitorus mengungkapkan bahwa "suatu sekolah menengah yang terdiri dari kombinasi antara sekolah dan taman komunitas sebaiknya diletakkan di tengah-tengah lingkungan perumahan untuk memudahkan akses".[32] Masih dalam Sitorus, De Chiara menyatakan bahwa "standar aksesibilitas untuk sekolah menengah, yaitu dapat ditempuh berjalan kaki dengan jarak maksimum antara 1,6 km - 2,4 km sedangkan bila menggunakan kendaraan bermotor maksimum 4 km".

Adapun standar kriteria umum penempatan fasilitas pendidikan menurut

[31] Miarsih, *Ibid.,* h. xxi.

[32] Lambok Ford Irwan Satari Sitorus, "Analisis Sebaran Sekolah Menengah Dalam Upaya Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Di Kota Tebing Tinggi," Tesis pada Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009, h. 20, tidak dipublikasikan.

De Chiara dan Koppelman dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kriteria Umum Penempatan Fasilitas Pendidikan Menurut
De Chiara Dan Kompelman

No	Jenis Fasilitas	Daerah Jangkauan (Meter)	Karakteristik Desain	Lokasi
1.	Elementary School (SD)	400 – 800	Harus dapat diakses dengan berjalan kaki dari perumahan tanpa menyebrangi jalan. Jika ada jalan yang harus disebrangi, jalan tersebut harus jalan lokal.	Dekat dengan kawasan permukiman dan fasilitas umum lainnya.
2.	Junior High School (SMP)	800 – 1200	Harus jauh dari jalan arteri primer dan harus tersedia di jalan setapak dari area lain.	Dekat dengan konsentrasi perumahan atau dekat dengan pusat permukiman.
3.	Senior High School (SMA)	1200 - 1600	Harus dekat dengan kawasan taman dan jauh dari kebisingan.	Terletak di pusat untuk memudahkan akses dan dekat dengan fasilitas umum lainnya.

Sumber: Chiara dalam Sitorus, 2009

Sedangkan menurut konsep *Neighborhood Unit*, aspek jarak dan waktu untuk fasilitas masyarakat dibagi kedalam lima kategori, yang dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Jarak dan Waktu Tempuh Dari Tempat Tinggal Ke Lokasi Sarana Sekolah

No.	Kategori	Jarak (Meter)	Waktu Tempuh (Menit)
1.	Sangat Dekat	0 – 300	0 – 5
2.	Dekat	300 – 600	5 – 10
3.	Sedang	600 – 1200	10 – 20
4.	Cukup Jauh	1200 – 1300	20 – 40
5.	Jauh	> 3000	> 40

Sumber: Udjianto dalam Sitorus, 2009

Berdasarkan pemaparan tentang aksesibilitas, dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas merupakan suatu cara untuk mendapatkan pelayanan dengan melalui persyaratan-persyaratan tertentu untuk mendapatkan kemudahan akses. Aksesibilitas pendidikan diartikan sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan pelayanan dalam bidang pendidikan yang berupa pelayanan fasilitas umum, biaya pendidikan, fasilitas pendidikan baik sarana dan prasarana sesuai standar yang telah ditetapkan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

H. Ketersediaan Lahan

1. Pengertian Lahan

Kegiatan manusia di permukaan bumi sangatlah tergantung kepada pemanfaattan lahan. Menurut Widiatmaka, "lahan dapat diartikan suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan vegetasi, dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi proses penggunaannya".[78] Sedangkan menurut J.Sahetapy, "lahan adalah gabungan dari semua kondisi lingkungan fisik (abiotik) yaitu tanah, iklim, relief, dan hidrologi yang penting untuk penggunaan lahan (potensial) maupun lingkungan non-fisik (biotik) yang meliputi vegetasi, flora dan fauna termasuk juga manusia".[79]

Sehingga dapat disimpulkan, lahan merupakan suatu lingkungan fisik maupun non-fisik yang meliputi biotik dan abiotik yang memiliki tujuan untuk dipergunakan oleh manusia demi kelangsungan hidupnya.

2. Kemampuan Lahan

Setiap kegiatan manusia di muka bumi selalu berhubungan dengan lahan. Kebutuhan akan sandang, pangan dan papan mengakibatkan beberapa lahan yang dikelola manusia menjadi rusak. Diperlukan suatu upaya klasifikasi lahan guna meminimalisisr dan mengembalikan kualitas lahan seperti sediakala.

Menurut Arsyad, "klasifikasi kemampuan lahan (*land capability* clasification) adalah penilaian lahan (komponen-komponen lahan) secara sistematik dan pengelompokkannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari".

Secara umum klasifikasi kemampuan lahan dapat dibuat menjadi tingkatan kelas sesuai besarnya faktor penghambat tanah. Hardjowigeno dan Widiatmaka mengelompokkan tanah kedalam kelas I sampai kelas VIII, menurutnya "dimana semakin tinggi kelasnya, kualitas lahannya semakin buruk, berarti resiko kerusakan dan besarnya faktor penghambat bertambah dan penggunaan lahan yang dapat diterapkan semakin terbatas". Adapun klasifikasi kemampuan lahan menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Skema Hubungan Antara Kelas Kemampuan Lahan Dengan Intensitas Dan Macam Penggunaan Lahan

Kelas Kemampuan Lahan		Integritas Dan Macam Penggunaan Lahan Meningkat →								
		Cagar Alam Hutan Lindung	Hutan Produksi Terbatas	Pengembalan Terbatas	Pengembalan Sedang	Pengembalan Intensif	Pertanian Terbatas	Pertanian Sedang	Pertanian Intensif	Pertanian Sangat Intensif
Hambatan Meningkat Dan Pilihan Penggunaan Lahan Berkurang ↓	I	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	II	■	■	■	■	■	■	■	■	
	III	■	■	■	■	■	■	■		
	IV	■	■	■	■	■	■			
	V	■	■	■	■	■				
	VI	■	■	■	■					
	VII	■	■	■						
	VIII	■								

Sumber: Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmika

Dari Tabel 2.3 terlihat bahwa lahan tanah pada kelas I sampai IV merupakan lahan yang sesuai untuk pertanian, sedangkan lahan pada kelas

V sampai VIII tidak sesuai untuk usaha pertaian atau diperlukan biaya yang sangat tinggi untuk pengelolaannya, sehingga pada tanah ini cocok untuk mendirikan bangunan.

Dari Tabel 2.3 juga diketahui bahwa setiap lahan di permukaan bumi memiliki ukuran kualitas dalam kelayakan penggunaanya. Menurut Primadani, "kulitas lahan adalah kapasitas tanah yang berfungsi mempertahankan produktivitas tanaman, mempertahankan dan menjaga ketersediaan air serta mendukung kegiatan manusia".[33]

Menurut Soerianegara dalam Juhadi, mengungkapkan bahwa terdapat tiga aspek kepentingan pokok dalam pemanfaatan sumber daya lahan, yaitu:

a. Lahan diperlukan manusia untuk tempat tinggal, tempat bercocok tanam, beternak, memelihara ikan, dan sebagainya.
b. Lahan mendukung kehidupan berbagai jenis vegetasi dan satwa.
c. Lahan mengandung bahan tambang yang bermanfaat bagi manusia.[34]

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, kemampuan lahan merupakan salah satu cara untuk mengetahui manfaat serta kesesuaian lahan untuk dipergunakan manusia dengan menggunakan klasifikasi atau kelas-kelas tertentu sebagai acuannya.

3. Lahan Satuan Pendidikan

Lahan satuan pendidikan adalah suatu lahan yang diperuntukan untuk lembaga pendidikan atau kegiatan pendidikan. Lahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lahan yang diperuntukan untuk SMP atau MTs dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD atau MI, SMP atau MTs, Dan SMA/MA. Adapun ketentuan lahan untuk standar sarana dan prasarana sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sebagai berikut:[35]

1) Lahan untuk satuan pendidikan SMP atau MTs memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 2.4.

---

[33] Prasti Primadani, "Pemetaan Kualitas Tanah Pada Beberapa Penggunaan Lahan di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar", Skripsi Pada Program Studi Ilmu Tanah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008, h. 1, tidak dipublikasikan.

[34] Juhadi, Pola-Pola Pemanfaatan Lahan dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan, *Jurnal Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*, 2007, h. 13.

[35] PERMENDIKNAS RI Nomor 24 Tahun 2007, *Op.cit*, h. 15.

Tabel 2.4
Rasio Minimum Luas Lahan Terhadap Peserta Didik

No.	Banyak Romongan Belajar	Rasio Minimum Luas Lahan Terhadap Peserta Didik (M^2/Peserta Didik)		
		Bangunan Satu Lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan Tiga Lantai
1.	3	22,9	-	-
2.	4-6	16,0	8,5	-
3.	7-9	13,8	7,5	5,1
4.	10-12	12,8	6,8	4,7
5.	13-15	12,2	6,6	4,5
6.	16-18	11,9	6,3	4,3
7.	19-21	11,6	6,2	4,3
8.	22-24	11,4	6,1	4,3

2) Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan juga memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Luas Minimum Lahan

No.	Banyak Romongan Belajar	Luas Lahan Minimum (M^2)		
		Bangunan Satu Lantai	Bangunan Dua Lantai	Bangunan Tiga Lantai
1.	3	1440	-	-
2.	4-6	1840	1310	-
3.	7-9	2300	1380	1260
4.	10-12	2770	1500	1310
5.	13-15	3300	1780	1340
6.	16-18	3870	2100	1450
7.	19-21	4340	2320	1600
8.	22-24	4870	2600	1780

3) Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga.
4) Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
5) Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.
6) Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
   a) Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
   b) Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tcntang Baku Mutu Kebisingan.
   c) Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
7) Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
8) Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa lahan merupakan suatu lingkungan fisik maupun non-fisik yang meliputi biotik dan abiotik yang memiliki tujuan untuk dipergunakan oleh manusia dengan memperhatikan kemampuan serta peruntukan nilai guna demi kelangsungan hidupnya.

I. Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai pemetaan kebutuhan sekolah dengan menggunakan aplikasi sistem informasi geografis dan penginderaan jauh masih sangat sedikit dilakukan oleh peneliti. Namun, penelitian yang membahas mengenai kebutuhan sekolah sanganlah banyak yang dilakukan oleh peneliti didaerah-daerah yang ada di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan baik dalam ruang lingkup kecil maupun ruang lingkup yang sangat luas, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Asep Hamdi dalam skripsi yang berjudul **"Analisis Sebaran Lokasi SMP Negeri Kaitannya Dengan Asesibilitas Mendapatkan Pendidikan Di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten**, dengan hasil penelitian:

1. Sebaran lokasi SMP Negeri dari faktor kuantitas penduduk, pola sebaran dan jangkauan pelayanan yang ditinjau menyatakan bahwa sebaran lokasi SMP Negeri belum sepenuhnya dapat terwujud secara merata.
2. Aksesibilitas pendidikan SMP Negeri belum dapat diakses dengan baik bagi para penduduk usia sekolah menengah pertama yang bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur.
3. Sebaran lokasi SMP Negeri kaitannya dengan aksesibiltas mendapatkan pendidikan di Kecamatan Ciputat Timur bahwa sebaran lokasi SMP Negeri terdapat keterkaitan dengan aksesibilitas mendapatkan pendidikan di Kecamatan Ciputat Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Hargito dalam tesis yang berjudul **"Integrasi Sebaran Lokasi SMP dan Sebaran Permukiman Di Kota Pati"** dengan hasil penelitian:

1. Pola sebaran lokasi SMP di Kota Pati adalah berkelompok dan membentuk pusat pelayanan di BWK Pusat Kota.
2. Daerah pinggiran kota yakni BWK I, BWK II dan BWK III memiliki sebaran permukiman yang terpencar yang diakibatkan karena lahan pertanian. Dengan sebaran lokasi SMP yang terkonsentrasi di BWK Pusat Kota teridentifikasi kebutuhan dan jarak jangkau sarana SMP yang ada

pada daerah pinggiran kota dari permukiman ke pusat pelayanan sarana SMP tidak optimal.

3. Untuk mengintegrasikan sebaran lokasi SMP dan sebaran permukiman yang tidak optimal, maka di daerah BWK II yaitu desa Widorokandang, Sugiharjo, Dengkek, Mustokoharjo dan Gajahmati sebagai prioritas pertama dan di Desa Sukokulon, Ngawen, Penambuhan dan Margorejo di Daerah BWK III sebagai prioritas kedua merupakan lokasi untuk pengadaan sarana SMP yang terintegrasi dengan sebaran permukiman di daerah pinggiran.

Penelitian yang dilakukan oleh Miarsih dalam tesis yang berjudul **"Kajian Penentuan Lokasi Gedung SD-SMP Satu Atap DI Kabupaten Demak"** dengan hasil penelitian:

1. Menentukan Desa Wedung Kecamatan Wedung sebagai lokasi yang Memiliki ketersediaan sarana dan prasana yang cukup sesuai dengan standar minimal sarana prasarana untuk dijadikan lokasi SD-SMP Satu Atap.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pelakasanaan program Gedung SDSMP Satu Atap di Kabupaten Demak. Suksesnya pelaksanaan program SD-SMP Satu Atap berarti juga membantu pencapaian target pada 2008/2009 minimal APK 95% di Kabupaten Demak

Penelitian yang dilakukan oleh Lambok Ford Irwan Satari Sitorus dalam tesis yang berjudul **"Analisis Sebaran Sekolah Menengah Dalam Upaya Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Di Kota Tebing Tinggi"** dengan hasil penelitian:

1. Jangkauan pelayanan sekolah menengah yang baik dan merata belum tercapai di Kota Tebing Tinggi. Sebagian besar sekolah menengah (SMA, MA, dan SMK) daerah jangkauannya tidak hanya satu kecamatan namun sudah lintas kecamatan dan bahkan sudah lintas kota maupun kabupaten.
2. Persebaran jumlah sekolah menengah belum dapat terwujud secara merata dengan baik di wilayah Kota Tebing Tinggi dengan ditemukannya kondisi di lapangan bahwa sebaran jumlah sekolah menengah yang ada (eksisting) belum dapat mengikuti sebaran jumlah fasilitas sekolah menengah menurut standar yang berlaku.
3. Lahan sekolah menengah yang ada di Kota Tebing Tinggi telah memenuhi ketentuan tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ada dalam Direktorat Jenderal Dikdasmen, Depdiknas.

Adapun parameter perbandingan hasi penelitian relevan yang telah dikemukakan sebelumnya, seperti terlihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Parameter Perbandingan Penelitian

No	Nama	Judul	Fokus Penelitian	Intisari	Persamaan	Perbedaan
1	Asep Hamdi	Analisis Sebaran Lokasi SMP Negeri Kaitannya Dengan Asesibilitas Mendapatkan Pendidikan Di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Mengetahui pola persebaran dan hubungan aksesibilitas SMPN di Kecamatan Ciputat Timur	1. Sebaran lokasi SMP di Kecamatan Ciputat Timur Belum Merata. 2. Aksesibilitas Masyarakat Masih Terbatas Untuk Bersekolah di SMPN 3. Adanya Keterkaitan antara lokasi SMPN dengan Aksesibilitas.	Meneliti Persebaran Dan Aksesibilitas SMP	1. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. 2. Penellitian tidak menggunakan sistem informasi geografis
2	Hargito	Integrasi Sebaran Lokasi SMP dan Sebaran Permukiman Di Kota Pati	Mengetahui pola persebaran SMP di seluruh wilayah Kota Pati.	1. Pola persebaran di Pusat Kota pati adalah Berkelompok. 2. Pola persebaran pinggiran Kota Pati adalah terpencar. 3. Memberikan solusi integritas sebaran lokasi SMP dan pemukiman yang tidak optimal	1. Meneliti Persebaran Dan Aksesibilitas SMP 2. Menggunakan sistem informasi geografis.	Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pati.
3	Miarsih	Kajian Penentuan Lokasi Gedung SD-SMP Satu Atap Di Kabupaten Demak	Mengetahui lokasi geduk SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak yang memenuhi kelayakan	1. Mengkaji penentuan lokasi gedung SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Demak.	Menggunakan variabel penduduk usia 13-15 tahun dan variabel jumlah sekolah untuk dibandingkan.	1. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Demak 2. Penellitian tidak menggunakan
			kelayakan standar sarana dan prasarana.	2. Menentukan Desa Wedung Kecamatan Wedung sebagai lokasi yang memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup baik.		sistem informasi geografis.

Tabel 2.6 (Lanjutan)

4	Lambor Ford Irwan Satari Sitorus	Analisis Sebaran Sekolah Menengah Dalam Upaya Peningkatan	Mengetahui jaungkauan pelayanan sekolah, pola distribusi sekolah dan faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan lokasi sekolah di Kota Tebing Tinggi.	1. Sebaran lokasi sekolah menengah di Kota Tebing Tinggi belum sepenuhnya merata. 2. Lahan sekolah menunjukkan bahwa belum sepenuhnya sekolah menengah yang ada di Kota Tebing Tinggi memenuhi standar dan ketentuan.	1. Menneliti tentang pola distribusi sekolah. 2. Menggunakan variabel lokasi, dan aksesibilitas dalam untuk menentukan sekolah yang optimal. 3. Menggunakan sistem informasi geografis.	1. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Tebing Tinggi. 2. Penelitian ini dilakuan terhada sekolah menengah, artinya tingkat SMA, MA dan SMK termasuk kedalamnya.

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2018.

J. Psikologi Pendidikan

Psikologi pendidikan merupakan sebuah kajian psikologi yang diaplikasikan dalam proses pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran termasuk segala yang terlibat dalam proses pembelajaran, upaya memaksimalkan proses pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan, baik tujuan pendidikan nasional, pendidikan institusional maupun instruksional. Beberapa ahli telah mengemukakan tentang pengertian psikologi pendidikan. Pengertian dan definisi Psikologi Pendidikan dapat dilihat dari dua sudut yakni etimologi dan terminologi. Menurut etimologi (asal usul kata) Psikologi Pendidikan dapat dijabarkan dalamdua kata yakni "Psikologi" dan "Pendidikan". Psikologi pertama secara etimologi adalah istilah hasil peng-Indonesiaan dari bahasa asing, yakni bahasa Inggris "Psychology". Istilah psychology sendiri bersal dari kata kata Yunani "Psyche", yang dapat diartikan sebagai roh, jiwa atau daya hidup, dan "logis" yang dapat diartikan ilmu, sehingga secara harfiah psikologi mengandung arti ilmu jiwa (Muhibbin, 2008: 8-9). Psikologi adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan membahas tingkah laku manusia yang terlihat maupun tidak, baik secara individu maupun berkelompok, dalam hubungan kesehariannya.

Sedangkan pendidikan di tinjau dari segi etimologi berasal dari bahasa yunani "Paedagogike". Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata "Pead" yang berarti "Anak" dan kata "Ago" yang berti "Aku membimbing". Jadi "Paedagogike" berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaannya membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam bahsa yunani di sebut "Paedagogos". Menurut termonologi yang lebih luas maka pendidikan adalah usaha yang dijalankan oleh

seseorang atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tujuan hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental (Sudirman N, 1992: 4). Berdarakan makna dua kata psikologi dan pendidikan di atas dapat dijadikan dasar untuk melihat lebih spesifik pengertian dan definisi psikologi pendidikan. Berikut beberapa definisi Psikologi Pendidikan yang telah dikemukakan para ahli bidang psikologi.

Dalam definisi dari Dictionary of Psychology, psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi terapan yang menrapkan prinsipprinsip dan penemuan psikologi terhadap pendidikan, serta kajian psikologi terhadap pendidikan. (Arthur S. Reber dalam Muhibbin. 2000) Dalam pandangannya, psikologi pendidikan adalah sebuah subdisiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna dalam hal-hal sebagai berikut: (1) Penerapan prinsip-prinsip belajar dalam kelas, (2) Pengembangan dan pembaharuan kurikulum, (3) Ujian dan evaluasi bakat dan kemampuan, (4) Sosialisasi proses-proses dan interaksi proses-proses tersebut dengan pendayagunaan ranah kognitif, (5) Penyelenggaraan pendidikan keguruan.

Menurut Crow & Crow; Educational psychology deseribesaand explains the learning experiencess of an individual from birth though old age. Its subject matter is concerned with the conditions that efect learning (Crow & Crow, 1958:7). Crow & Crow menegaskan bahwa Psikologi merupakan suatu ilmu yang menerangkan masalah belajar pada seorang anak sejak lahir sampai usia lanjut, termasuk didalamnya kondisi yang mempengaruhi belajar. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam pembahsannya lebih menekankan pada problem pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik ataupun psikis, yang sangat erat hubungannya dengan proses belajar dan pembelajran anak yang kemudian akan mempengaruhi proses keberhsilan pendidikan anak.

Psikologi pendidikan membahas tentang siswa selaku peserta didik dengan berbagai macam karkater dalam proses belajar dan guru sebagai pengajar. Tujuan dan fungsi psikologi pendidikan secara umum ialah untuk mengetahui proses interaksi belajar anak dalam kesaharian dan meningkatkan dan mengembangkan serta metode pelajaran dalam situasi tertentu yang sesuai dengan tingkat usia dalam limgkungan pendidikan. Konsep pendidikan pada dasarnya adalah pelayanan yang diberikan secara khusus bagi siswa, Keberadaan psikologi pendidikan pada hakikatnya untuk mempermudah para pendidik dalam mengetahui karakter, perkembangan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, paling tidak para calon guru atau guru telah mendapat gambaran mengenai kondisi dan situasi keberadaan diri pribadi, peserta didik dan lembaga pendidikan. (Safwan Amin, 2005).

Tujuan psikologi pendidikan adalah untuk mempelajari tingkah laku manusia,

bagaimana tingkah laku itu tercipta dan bagaimana tingkah laku itu diubah melalui proses pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan yaitu untuk menemukan berbagai fakta, generalisasai yang berkaitan dengan pendidikan untuk digunakan dalam melaksanakan proses pembelajran dan pendidikan yang efektif dan efisien. Mempelajari psikologi pendidikan tidak serta merta menjadikan pendidik, calon pendidik menjadi pendidik yang baik. (Mochamad Nursalim, dkk. 2007). Akan tetapi dengan mempelajari psikologi pendidikan pendidik dapat (a) memahami karakteristik peserta didik, (b) pemahaman karakteristik proses belajar mengajar, dan (c) memahami lingkungan sekitar peserta didik untuk dimanfaatkan dalam peningkatan proses dan hasil belajar, sehingga dapat memberikan prinsip-prinsip untuk digunakan dalam membuat keputusan dalam proses pendidikan.

Muhamad Irham, Novan Ardy Wiyani (2013). Mengemukakan tujuan psikologi pendidikan antara lain:

1. Memahami bentuk-bentuk gejela psikologis individu (siswa) secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran.
2. Memahami kemampuan-kemampuan dan potensi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.
3. Membantu siswa mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam bentuk proses-proses pembelajaran yang berbasis pengembangan siswa.
4. Memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran agar tercapai tujuan-tujuan pembelajran yang efektif.
5. Membantu siswa menyelesaikan program pembelajaran sehingga dengan peamahaman guru tentang psikologi pendidikan dapat memberikan bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan program-program pembelajran sampai tuntas.

K. Kerangka Berpikir

Berdasarkan latar belakang dan landasan teori yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil suatu kerangka pemikiran sebagai berikut. Kondisi pendidikan yang ada di Kabupaten Tangerang menurut pengamatan dan observasi awal, masih dirasakan belum merata di setiap kecamatannya. Terlihat masih tidak seimbangnya jumlah penduduk dengan lembaga pendidikan, banyaknya siswa yang menempuh jarak cukup jauh untuk mencapai lokasi sekolah, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang. Melihat permasalahan ini maka diperlukan suatu upaya untuk mengkaji kebutuhan sekolah menengah pertama SDN dan SMPNyang diperuntukan kepada para penduduk usia wajib belajar 13 sampai 15 tahun yang telah selesai

mengenyam pendidikan sekolah dasar (SD).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu solusi atau gambaran mengenai suatu fasilitas pendidikan di Kabupaten Tangerang yang sudah memadai atau belum memadai. Dengan melihat penelitian ini diharapkan pemerintah Kabupaten Tangerang akan berupaya untuk memperbaiki atau membangun unit sekolah baru disetiap kecamatan yang memiliki kekurangan fasilitas pendidikan.

Tahap pertama, penelitian ini akan memperkirakan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2023 dan 2024 Data yang dipergunakan untuk mengetahui proyeksi penduduk tersebut berupa data jumlah penduduk usia 8-4 dan 13-15 tahun di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang sebelum tahun 2024 yang diperoleh melalui studi dokumentasi dari Badan Pusat Statistik sebelum tahun 2023. Data yang telah diperoleh selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode analisis *Arithmetic Rate Of Growth* untuk mengetahui nilai proyeksi penduduk usia 8-4 dan 13-15 tahun disetiap kecamatan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024.

Tahap kedua, penelitian ini akan memperkirakan jumlah kebutuhan sekolah yang ada disetiap kecamatan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024. Data yang dipergunakan adalah data jumlah proyeksi penduduk usia 8-4 dan 13-15 tahun diseluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2024 yang diperoleh pada penelitian tahap pertama. Penelitian ini juga memerlukan data jumlah kapasitas maksimum daya tampung sekolah di setiap kecamatannya. Pada tahap ini data diperoleh melalui metode observasi ke sekolah-sekolah serta metode studi dokumentasi kepada dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tangerang.

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalaisis dengan menggunakan metode analisis komparatif atau perbandingan dengan cara membandingakan jumlah penduduk dengan kapasitas daya tampung sekolah. Pada tahap ini akan diketahui jumlah penduduk yang tidak dapat ditampung oleh sekolah, sehingga dapat diketahui berapa jumlah kebutuhan sekolah yang harus disediakan.

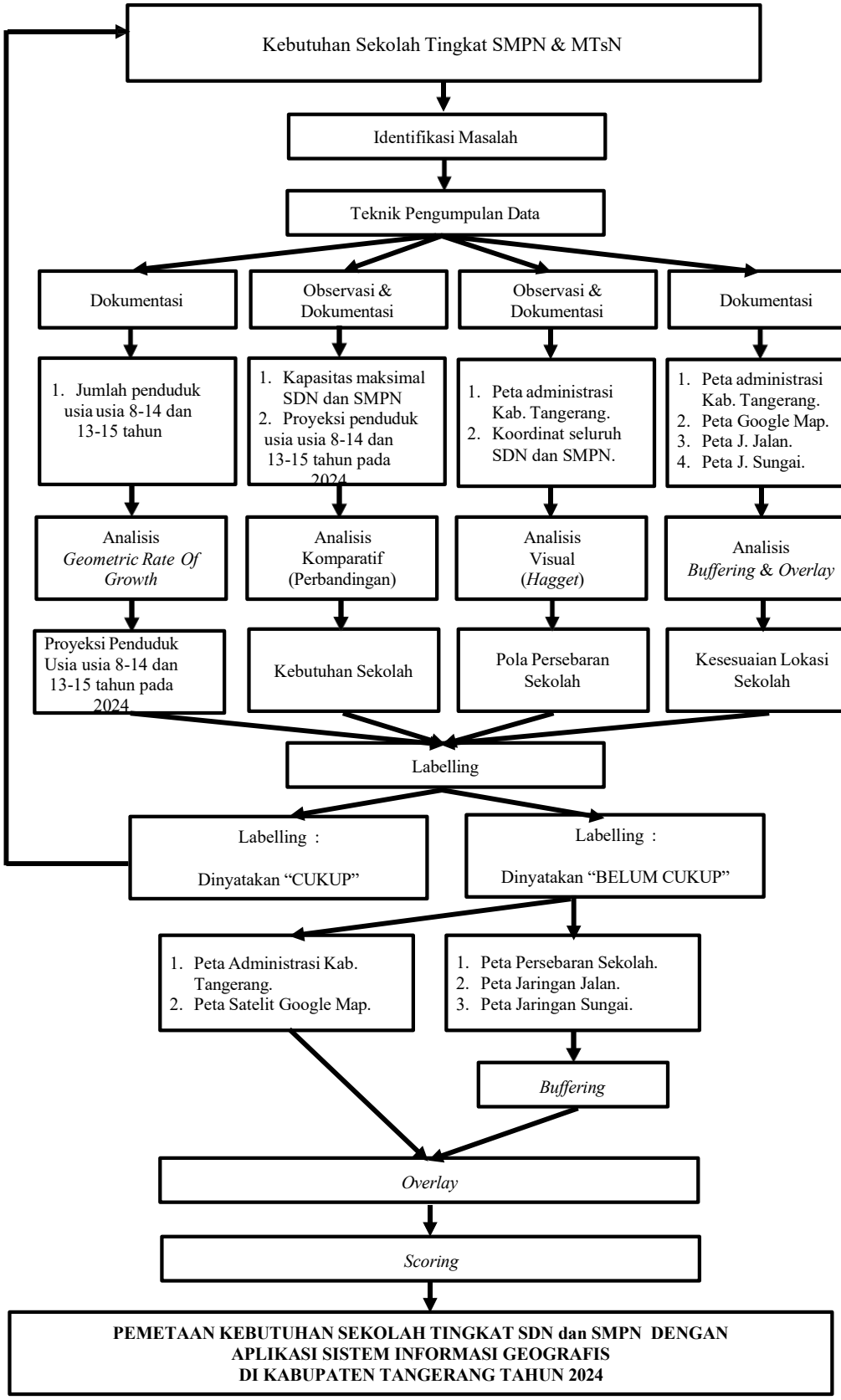
Tahap ketiga, penelitian ini akan memperkirakan pola persebaran sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang. Data yang dipergunakan untuk mengetahui pola persebaran sekolah tersebut berupa peta RBI administrasi Kabupaten Tangerang dan data peta koordinat seluruh sekolah SDN dan SMPN yang ada di Kabupaten Tangerang yang diperoleh melalui observasi dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh selanjutnya di analisis dengan

menggunakan metode analisis visual melalui pengamatan pola persebaran koordinat lokasi sekolah untuk mengetahui bentuk pola persebaran sekolah di Kabupaten Tangerang.

Tahap keempat, penelitian ini akan memperkirakan kesesuaian lokasi sekolah sebagai pertimbangan perencanaan pembangunan unit sekolah baru. Data yang dipergunakan untuk mengetahui kesesuaian lokasi sekolah berupa peta RBI administrasi Kabupaten Tangerang, peta jaringan jalan Kabupaten Tangerang serta peta jaringan sungai Kabupaten Tangerang. Data tersebut diperoleh melalui studi dokumentasi dari Bapeda Kabupaten Tangerang dan melalui media internet. Data yang telah diperoleh selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode analisis *buffering, overlay dan scoring* untuk mengetahui lokasi yang sesuai untuk perencanaan pembangunan unit sekolah baru disetiap kecamatan di Kabupaten Tangerang.

Setelah keempat tahap itu dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah labelling. Pada tahap ini setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang akan diberikan label “Cukup” atau “Belum Cukup” dengan berdasarkan pada jumlah penduduk yang dapat atau tidak dapat ditampung oleh SDN dan SMPNsebagai penyedia fasilitas pendidikan. Apabila suatu kecamatan dianggap “Cukup” maka kecamatan tersebut sudah menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Namun, apabila suatu kecamatan dianggap “Belum Cukup” maka kebutuhan pendidikan pada kecamatan tersebut belum menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai.

Tahap terakhir adalah proses pemetaan kebutuhan sekolah menengah pertama SDN dan SMPN di Kabupaten Tangerang tahun 2024 yang didasarkan pada kecamatan yang diberikan labelling “Belum Cukup”. Pada tahap ini data yang dipergunakan adalah data peta persebaran sekolah di Kabupaten Tangerang, peta rupa bumi Indonesia administrasi Kabupaten Tangerang, dan peta jaringan jalan Kabupaten Tangerang. Proses pemetaan ini menggunakan metode analisis *buffering*, *overlay* dan *scoring*. Setelah tahap ini selesai maka dapat mengetahui dan menyimpulkan hasil penelitian tentang suatu kebijakan pemetaan yang sesuai dalam penentuaan perencanaan pembangunan kebutuhan sekolah. Dari deskripsi yang telah disampaikan, maka dapat digambarkan sebuah bagan kerangka berpikir yang dapat dilihat pada tabel berikut:

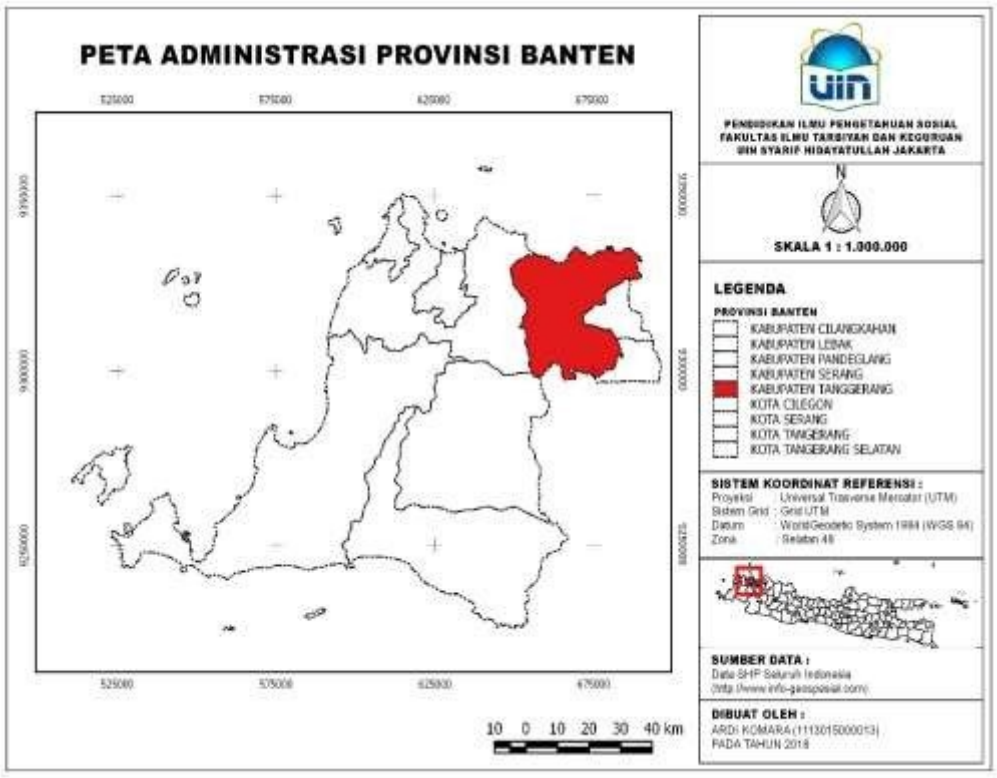


Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Secara astronomis Kabupaten Tangerang terletak pada 6˚ 00’ - 6˚ 20’ Lintang Selatan dan 106˚ 20’ - 106˚ 43’ Bujur Timur dan secara geografis Kabupaten Tangerang berada dibagian Timur Propinsi Banten. Secara administratif Kabupaten Tangerang memiliki luas wilayah sebesar 959,60 km^2 yang terbagi kedalam 29 kecamatan.[1] Untuk lebih memahami lokasi penelitian, maka dapat melihat peta lokasi penelitian seperti disajikan pada Gambar 3.1



Gambar 3.1
Peta Lokasi Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada November 2024 hingga Desember 2024 dengan penyesuan berdasarkan kondisi di lapangan saat penelitian dilaksanakan.

[1] Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2016*, (Kabupaten Tangerang: BPS, 2016), Katalog Bps. 1102001.3603, h. 3.56

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik survei dan teknik sistem informasi geografis. Secara etimologis kuantitatif (*quantitative*) berasal dari kuantitas (*quantity*) atau kuantum yang memilii arti jumlah. Metode kuantitatif dengan demikian diartikan sebagai penyajian hasil penelitian melalui angka.[36] Maka metode kuantitatif sangatlah sesuai dengan penelitian ini, hal ini karena penelitian ini menggunakan data yang bersifat pengukuran-pengukuran variabel data kependudukan pada usia 13-15 tahun dan ketersediaan daya tampung fasilitas sekolah menengah pertama di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang. Whitney dalam Prastowo, menyatakan bahwa "metode deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat".[3] Metode deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali data dan informasi baik tentang proses atau mekanisme status gejala saat penelitian dilakukan untuk menggambarkan kondisi wilayah penelitian berdasarkan kondisi nyata.

No.	Identifikasi	Tipe	Kegunaan
1.	Laptop	Alat	Sebagai media utama dalam proses input, pengolahan dan output dari seluruh data yang dibutuhkan.
2.	Lembar Kerja	Alat	Sebagai media pencatatan hasil pengamatan dalam penelitian.
3.	Kamera Digital / Kamera Handphone	Alat	Sebagai alat dokumentasi pada proses observasi dan selama proses penelitian.
4.	Koordinat Persebaran Sekolah SDN dan SMPN Se- Kab. Tangerang	Bahan	Sebagai media untuk mengetahui lokasi sekolah yang tersedia dan sebagai media untuk menentukan unit sekolah baru.
5.	Peta RBI Kabupaten Tangerang skala 1:25.000	Bahan	Sebagai media pembanding dari hasil interprestasi peta dan hasil analisis buffering dalam hal penentuan lokasi.
6.	Data SHP RT/RW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031.	Bahan	Sebagai media untuk menampilkan peta administrasi seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang.
7.	Data SHP Jaringan Jalan Di Kabupaten Tangerang.	Bahan	Sebagai media analisis *buffering* dalam hal penentuan lokasi unit sekolah baru.
8.	Data SHP Aliran Sungai Di Kabupaten Tangerang.	Bahan	Sebagai media analisis *buffering* dalam hal penentuan lokasi unit sekolah baru.
9.	Data Citra Satelit Google Maps	Bahan	Sebagai bahan untuk menampilkan peta penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang.
10.	Software Arc GIS 10.2	Aplikasi	Sebagai aplikasi pengolahan data utama maupun data pendukung.
11.	GPS Compass	Aplikasi	Sebagai aplikasi pembantu dalam melakukan pengukuran koordinat geografis.
12.	GPS Essentials	Aplikasi	Sebagai media aplikasi untuk mencatat hasil waypoints koordinat sekolah.
13.	Microsoft Office Word 2013	Aplikasi	Sebagai aplikasi untuk penulisan hasil penelitian.
14.	Microsoft Office Excel 2013	Aplikasi	Sebagai aplikasi untuk penghitungan data hasil penelitian.

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2024

[36] Nyoman Kutha Ratna, *Metode Penelitian Kajian Budaya Dan Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2010), Cet. I, h. 94.

C. Variabel Penelitian

Idrus mengungkapkan bahwa, "variabel dapat dimaknai sebagai sebuah konsep atau objek yang sedang diteliti, yang memiliki variasi (*vary-able*) ukuran, kualitas yang ditetapkan oleh peneliti berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki konsep (variabel) itu sendiri".[37]Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian kelompok yang berpengaruh dalam menentukan jumlah kebutuhan fasilitas pendidikan sekolah menengah pertama negeri di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang tahun 2024.

1. Variabel kriteria terpenuhinya fasilitas pendidikan, yaitu:
   a. Jumlah penduduk usia 8-12 dan 13-15 tahun di setiap kecamatan.
   b. Jumlah daya tampung maksimum SDN dan SMPN di setiap kecamatan.
2. Variabel penempatan unit sekolah baru, yaitu:
   a. Lokasi yang dapat ditempuh peserta didik.
   b. Akses yang dapat memudahkan peserta didik.
   c. Ketersediaan lahan untuk fasilitas pendidikan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

   Sugiyono mengungkapkan bahwa, "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".[38] Polpulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang yang memiliki nilai perbadingan antara jumlah penduduk usia 8-12 dan 13-15 tahun dengan ketersediaan daya tampung maksimum fasilitas pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama negeri.

2. Sampel

   Sugiyono menyampaikan bahwa, "sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".[6] Penelitian yang baik adalah penelitian yang harus melalui prosedur penentuan sampel dengan menggunakan teknik-teknik sampel tertentu. Teknik Sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik *purposive sampling.* Idrus menjelaskan bahwa, "*purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu

[37] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), Ed. II, h. 77.
[38] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.80

dalam pengambilan sampelnya".[7] Adapun sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang yang membutuhkan fasilitas unit sekolah baru yang diakibatkan kurang terpenuhinya fasilitas pendidikan sekolah menengah pertama negeri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang akan di pergunakan sebagai berikut.

1. Teknik Pengumpulan Data Untuk Analisis Proyeksi Penduduk Tahun 2024
   Data yang dibutuhkan untuk melakukan proyeksi penduduk dalam penelitian ini berupa data statistik daerah seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang pada tahun 2023 Untuk memperoleh data tersebut peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi dengan cara melakukan kunjungan terhadap website Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang.
2. Teknik Pengumpulan Data Untuk Analisis Kebutuhan Sekolah
   Pada tahap ini peneliti melakukan teknik observasi, teknik ini dilakukan dengan cara mengunjungi seluruh SDN dan SMPN yang ada di Kabupaten Tangerang. Hal ini, bertujuan untuk mengumpulkan data yang berupa identitas sekolah, kriteria bangunan sekolah, kapasitas maksimum peserta didik, dan kondisi lingkungan sekolah. Sebagai perbandingan peneliti juga melakukan studi dokumentasi, studi ini dilakukan dengan cara melakukan *browsing website* dinas-dinas terkait pendidikan Kabupaten Tangerang untuk mengakses data-data terkait penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data Untuk Analisis Persebaran Sekolah
   Data yang diperlukan untuk mengetahui pola persebaran sekolah di Kabupaten Tangerang, yaitu peta rupa bumi Indonesia bagian administrasi Kabupaten Tangerang dan peta koordinat seluruh SDN dan SMPN di kabupaten Tangerang. Untuk memperoleh data tersebut peneliti menggunakan teknik observasi dan teknik studi dokumentasi dengan cara mengajukan permohonan permintaan data atau mengunjungi *website* BAPEDA Kabupaten Tangerang.
4. Teknik Pengumpulan Data Untuk Analisis Kesesuaian Lokasi Sekolah
   Pada proses ini, peneliti membagi menjadi beberapa kriteria teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun beberapa kriteria tersebut sebagai berikut.

a. Lokasi

Pada tahap ini, peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi dengan cara mengunjungi website BAPEDA Kabupaten Tangerang untuk memperoleh data peta jaringan sungai. Data lain yang diperlukan dalam tahap ini adalah peta hasil analisis persebaran sekolah di Kabupaten Tangerang yang merupakan hasil analisis peneliti.

b. Aksesibilitas

Pada tahap ini, peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi dengan cara mengunjungi website BAPEDA Kabupaten Tangerang untuk memperoleh data peta jaringan jalan yang bersifat eksisting yang ada di Kabupaten Tangerang. Data ini berfungsi untuk menenetukan aksesibilitas yang sesuai perencanaan pembangunan unit sekolah baru dengan mengacu kepada fasilitas jalan yang memadai.

c. Ketersediaan Lahan

Pada tahap ini, peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi dengan cara mengunjungi website BAPEDA Kabupaten Tangerang untuk memperoleh data peta penggunaan lahan. Data ini berfungsi untuk mengklasifikasikan lahan yang sesuai untuk perencanaan pembangunan unit sekolah yang baru.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap, maka langkah selanjutnya adalah tahap analisis data. Analisis data secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu aktivitas mengolah data keseluruhan, baik sumber data yang bersifat primer maupun sekunder, yang kemudian digabungkan dengan pemahaman dan penjelasan peneliti.[8] Secara umum, penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis untuk memecahkan beberapa masalah dalam penelitian. Adapun beberapa analisis yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Analisis Proyeksi Penduduk Tahun 2024

Analisis proyeksi penduduk merupakan suatu usaha alat analisis perhitungan yang menunjukkan keadaan penduduk dimasa yang akan datang. Analisis ini bertujuan untuk memperkirakan jumlah penduduk usia sekolah menengah pertama (SDN dan SMPN) yang berkisar antara usia 8-12 dan 13-15 tahun pada tahun 2024. Jenis perhitungan proyeksi penduduk yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *Geometric rate of growth* (bunga majemuk). Hal ini bertujuan untuk mempermudah penelitian dalam

memproyeksikan penduduk dengan menggunakan prinsip pertumbuhan penduduk adalah sama setiap tahun dan bersifat linear. Adapun rumus yang dipergunakan untuk mengetahui proyeksi penduduk *Geometric rate of growth* , yaitu:

Rumus : $\mathrm{Pn} = \mathrm{Po} + (1 + r)^{\mathrm{n}}$

Keterangan :

Pn = Jumlah penduduk pada tahun n.
Po = Jumlah penduduk pada tahun awal.
r = Angka pertumbuhan penduduk.
n = Selisih tahun dari 2 sensus yang diketahui.

2. Analisis Kebutuhan Sekolah

Analisis kebutuhan sekolah merupakan suatu analisis yang dipergunakan peneliti untuk mengetahui tingkat kebutuhan sekolah disetiap kecamatan di Kabupaten Tangerang. Analisis kebutuhan sekolah dalam penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif atau perbandingan. Analisis komparatif merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk membandingkan dua objek atau permaslahan yang diduga memiliki persamaan dan perbedaan untuk dibandingkan. Analisis komparatif pada penelitian ini akan membandingkan data jumlah penduduk usia sekolah yang berkisar antara usia 8-12 dan 13-15 tahun pada tahun 2024 dengan standar kapasitas daya tampung maksimal sekolah (SDN dan SMPN) di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang dengan mempertimbangkan prinsip zonasi. Pada analisis ini dapat diketahui bahwa jumlah tingkat kebutuhan sekolah disetiap kecamatan di Kabupaten Tangerang dapat dibuat menjadi beberapa klasifikasi, seperti terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel
3.3 Klasifikasi Kebutuhan Sekolah

Klasifikasi	***Labelling***
Penduduk Usia 8-12 dan 13-15 tahun < Kapasitas SDN dan SMPN	Cukup
Penduduk Usia 8-12 dan 13-15 tahun = Kapasitas SDN dan SMPN	Cukup
Penduduk Usia 8-12 dan 13-15 tahun > Kapasitas SDN dan SMPN	Belum Cukup

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2018.

Pada Tabel 3.3, dapat diketahui bahwa apabila klasifikasi jumlah penduduk usia 8-12 dan 13-15 tahun pada tahun 2024 lebih sedikit atau memiliki jumlah sama dengan standar kapasitas daya tampung maksimal sekolah (SDN dan SMPN) di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang

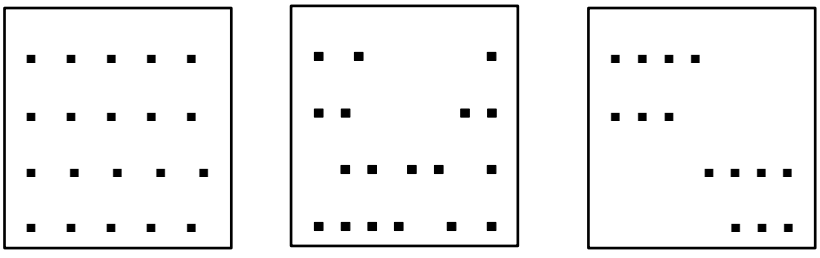
maka peneliti memberikan *labelling* “Cukup” dan tidak memberikan tindakan apapun. Sebaliknya apabila klasifikasi jumlah penduduk usia 8-12 dan 13-15 tahun

pada tahun 2024 lebih besar dari pada standar kapasitas daya tampung maksimal sekolah (SDN dan SMPN) di setiap kecamatan di Kabupaten Tangerang maka peneliti memberikan *labelling* "Belum Cukup". Tindakan yang dilakukan bagi kecamatan yang diberikan *labelling* "Belum Cukup" adalah penambahan ruangan (lantai gedung sekolah) atau tindakan perencanaan pembangunan unit sekolah baru sesuai lokasi yang dibutuhkan.

3. Analisis Persebaran Sekolah

Analisis persebaran sekolah merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pola persebaran sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang. Untuk mengetahui pola persebaran tersebut, peneliti menggunakan model analisis visual. Model analisis ini dipergunakan peneliti dengan cara melihat gambaran pola penyebaran sekolah SDN dan SMPN di Kabupaten Tangerang melalui titik-titik koordinat lokasi sekolah yang sudah dikonfirmasi kebenaranya melalui observasi sekolah.

Titik-titik sekolah tersebut kemudian disatukan pada sebuah peta administrasi Kabupaten Tangerang guna melihat kerapatan serta pola yang ditampilkan pada peta. Kemudian pola tersebut diakurasikan dengan tiga tipe pola persebaran menurut Hagget, yaitu tipe reguler (tersebar merata), tipe random (tersebar tidak merata), dan tipe *clustered* (tersebar bergerombol). Adapun tiga kategori tipe pola persebaran yang digambarkan oleh Hagget, dapat dijelaskan melalui Gambar 3.2.



Tipe Reguler Tipe Random Tipe *Clustured*

Gambar 3.2
Jenis Pola Penyebaran

Sumber: Hagget Dalam Hargito[9]

[9] Hargito, "Integrasi Sebaran Lokasi SMP Dan Sebaran Permukiman Di Kota Pati" *Tesis* pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, (Semarang: 2009), h. 33, tidak dipublikasikan.

4. Analisis Kesesuaian Lokasi Sekolah

Analisis kesesuaian lokasi sekolah merupakai suatu model analisis yang dipergunakan peneliti untuk mengetahui lokasi yang sesuai untuk perencanaan pembangunan unit sekolah baru. Analisis kesesuaian sekolah dalam penelitian ini memiliki beberapa tahapan dalam menentukan lokasi yang tepat sesuai ketentuan berlaku. Untuk mempermudah proses penentuan lokasi tersebut, peneliti menggunakan sistem informasi geografis dengan menggunakan metode *buffering, overlay* dan *scoring*. Adapun tahapan-tahapan dalam menentukan lokasi yang sesuai, yaitu sebagai berikut.

a. Lokasi

Secara umum penentuan lokasi sekolah sudah memiliki aturan standar sarana dan prasarana, yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk SD atau MI, SMP atau MTs, dan SMA atau MA. Penentuan lokasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penentuan lokasi sekolah yang dianjurkan peneliti sebagai lokasi yang sesuai untuk perencanaan pembangunan unit sekolah baru untuk tingkat SDN dan SMPN dengan melihat aspek jarak aliran sungai dengan sekolah sebagai antisipasi bencana alam banjir.

Untuk lebih spesifik dibuatlah parameter mengenai jarak aliran sungai dengan lokasi sekolah. Semakin jauh jarak antara aliran sungai dengan lokasi sekolah, maka semakin baik penempatan lokasi sekolah yang akan dibangun. Sebaliknya, apabila semakin dekat jarak antara aliran sungai dengan lokasi sekolah, maka semakin kurang baik penempatan lokasi sekolah yang akan dibangun. Apabila diaplikasikan kedalam skala parameter skor didapatkan bahwa semakin tinggi nilai skor yang diperoleh, maka semakin baik lokasi tersebut untuk dijadikan bahan acuan lokasi yang baik untuk perencanaan unit sekolah baru. Adapun skor parameter dalam menentukan jarak minimum aliran sungai dengan sekolah dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Skoring Parameter Jarak Minimum Aliran Sungai

Jarak Aliran Sungai Dengan Sekolah	Skor
0 M – 520 M	1
520 M – 1.040 M	2
1.040 M – 1.560 M	3
1.560 M – 2.080	4
> 2.080 M	5

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2018.

b. Aksesibilitas

Aksesibilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aksesibilitas yang menunjuk adanya kemudahan akses sekolah terhadap jarak pelayanan jalan yang akan digunakan masyarakat untuk menempuh ke lokasi sekolah.

Semakin dekat jarak antara ruas jalan dengan lokasi sekolah, maka semakin baik penempatan lokasi sekolah yang akan dibangun. Sebaliknya, apabila semakin jauh jarak antara ruas jalan dengan lokasi sekolah, maka semakin kurang baik penempatan lokasi sekolah yang akan dibangun. Apabila diaplikasikan kedalam skala parameter skor didapatkan bahwa semakin tinggi nilai skor yang diperoleh, maka semakin baik lokasi tersebut untuk dijadikan bahan acuan lokasi yang baik untuk perencanaan unit sekolah baru. Adapun skor parameter dalam menentukan radius jarak minimum pelayanan ruas jalan desa dengan lokasi sekolah dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Skoring Parameter Radius Minimum Jalan Desa

Jarak Jalan Desa Dengan Sekolah	Skor
0 M – 95 M	5
95 M – 190 M	4
190 M – 285 M	3
285 M – 380 M	2
> 380 M	1

Sedangkan skor dalam dalam menentukan radius jarak minimum pelayanan ruas jalan utama dengan lokasi sekolah dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Skoring Parameter Radius Minimum Jalan Utama

Jarak Jalan Utama Dengan Sekolah	Skor
0 M – 540 M	1
540 M – 1.080 M	2
1.080 M – 1.620 M	3
1.620 M – 2.160 M	4
> 2.160 M	5

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2024

c. Ketersediaan Lahan

Ketersediaan lahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan lahan yang memadai serta sesuai untuk perencanaan pembangunan unit sekolah baru tingkat SDN dan SMPN di Kabupaten Tangerang. Lahan yang digunakan untuk pembangunan sekolah ditentukan berdasarkan ketersediaan lahan yang ada di Kabupaten Tangerang dengan mengacu pada peta penggunakan lahan eksisting di Kabupaten Tangerang. Penetuan atau pemilihan lahan yang baik merupakan hal yang penting. Untuk itu peneliti membuat skala parameter kesesuaian lahan. Semakin tinggi nilai skor yang diperoleh, maka semakin sesuai untuk memanfaatkan lahan yang tersedia menjadi lokasi perencanaan unit sekolah baru. Adapun skor parameter lahan yang sesuai untuk pembangunan sekolah dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7
Skoring Parameter Keseuaian Lahan

Jenis Lahan	Skor
Kawasan Pemukiman	5
Kawasan Pertanian	4
Kawasan Industri	3
Kawasan Tambak	2
Kawasan Hutan Lindung	1

Sumber : Hasil Analisis Penulis, 2024.

G. Teknik Validasi Pemetaan Kebutuhan Sekolah

Teknik validasi di pergunakan untuk memvalidasi hasil pemetaan yang telah melalui proses analisis kesesuaian lokasi sekolah. Teknik validasi dalam penelitian ini menggunakan metode uji ketelitian interprestasi citra. Metode ini digunakan untuk melihat ketelitian interprestasi citra yang diperoleh melalui survey lapangan atau *ground check* (pengecekan lapangan).

Uji ketelitian interprestasi ini bertujuan untuk mengetahui keakuratan hasil pengolahan citra untuk menentukan lokasi lahan yang sesuai dengan menggunakan nilai ambang akurasi citra sebesar 85%, nilai tersebut merupakan acuan nilai minimumditerima atau tidaknya suatu interprestasi citra.

Adapun metode dalam uji interprestasi citra yang digunakan adalah metode uji kebenaran interprestasi. Dimana nilai keakuratan dapat diperoleh melalui perhitungan membandingkan jumlah titik survey yang benar dengan jumlah titik survey keseluruhannya. Adapun rumus dalam perhitungan nilai keakuratan interprestasi sebagai berikut.

Hasil akhir dalam teknik validasi dengan menggunakan uji ketelitian interprestasi citra ini adalah hasil pemetaan yang dilakukan peneliti untuk menentukan perencanaan lokasi lahan unit sekolah baru tingkat SDN dan SMPN untuk di Kabupaten Tangerang sesuai dengan kondisi dilapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Simulasi Pemetaan Rombel Dengan Jumlah Data Per Rombel 28 Peserta Didik

1. Kecataman Jambe

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N CIBODAS PACING	144	28	6	8	0
2	SD N DARU I	718	28	26	13	13
3	SD N DARU III	254	28	9	6	3
4	SD N JAMBE I	407	28	15	10	5
5	SD N JAMBE III	490	28	18	13	5
6	SD N KUTRUK I	287	28	10	8	2
7	SD N KUTRUK II	185	28	7	8	0
8	SD N PARUNG JAHE	201	28	7	7	0
9	SD N RANCABUAYA I	534	28	19	11	8
10	SD N SUKAMANAH	179	28	6	6	0
11	SD NEGERI KUTRUK III	236	24	10	9	0
12	SD NEGERI RANCABUAYA II	332	28	12	7	5
13	SDN DARU II	222	28	8	7	1
14	SDN JAMBE II	412	28	15	14	1
15	SDN MEKARSARI	348	28	12	8	4
16	SDN TABAN	364	28	13	9	4
	Jumlah Total	**5313**			**144**	**51**

Sumber: Analisisi Penulis

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Jambe dengan jumlah peserta didik 5313 dengan total 16 SDN, terlihat masih banyak data yang berwarna merah atau kekurangan ruang dan fasilitas sekolah.

2. Kecamatan Jayanti

	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N DANGDEUR 1	290	24	12	8	4
2	SD N JAYANTI II	243	28	9	8	1
3	SD N PABUARAN 2	186	23	8	9	
4	SD N PANGKAT I	246	28	9	9	0
5	SD N PANGKAT II	162	28	6	6	0
6	SD NEGERI CIKANDE I	366	28	13	12	1
7	SD NEGERI CIKANDE II	116	28	6	7	
8	SD NEGERI CIKANDE III	510	28	18	17	1
9	SD NEGERI CIKANDE IV	339	28	12	11	1
10	SD NEGERI DANGDEUR 2	242	28	9	9	0
11	SD NEGERI JAYANTI I	787	28	28	24	4
12	SD NEGERI PABUARAN I	240	28	9	8	1
13	SD NEGERI PASIR MUNCANG I	325	28	12	6	6
14	SD NEGERI PASIR MUNCANG II	331	28	12	11	1
15	SD NEGERI PASIRGINTUNG	262	28	9	6	3
16	SD NEGERI SUMURBANDUNG I	321	27	12	7	5
17	SD NEGERI SUMURBANDUNG II	183	28	7	5	2
18	SD NEGERI SUMURBANDUNG III	174	28	8	11	-3
	Jumlah	**4790**			**158**	**20**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Jayanti dengan jumlah peserta didik 4790 dengan total 18 SDN, terlihat data hijau atau kecukupan fasilitas ruang belajar , senagkan beberapa SDN saaja yang masih berwarna merah atau kekurangan ruang dan fasilitas sekolah.

3. Kecamatan Kelapa Dua

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD NEGERI BENCONGAN 2	258	26	10	12	0
2	SD NEGERI BENCONGAN I	335	28	12	10	2
3	SD NEGERI BENCONGAN III	307	28	11	9	2
4	SD NEGERI BENCONGAN VI	547	28	20	7	13
5	SD NEGERI BENCONGAN VII	317	28	11	6	5
6	SD NEGERI CIHUNI I	263	28	9	10	-1
7	SD NEGERI CIHUNI II	337	28	12	6	6
8	SD NEGERI CURUGSANGERENG	165	28	6	9	-3
9	SD NEGERI DANAU BATUR	260	28	9	8	1
10	SD NEGERI GURUBUG 1	523	28	19	16	3
11	SD NEGERI GURUBUG II	453	28	16	10	6
12	SD NEGERI KAMPUNG BAMBU I	770	28	28	12	16
13	SD NEGERI KAMPUNG BAMBU II	614	28	22	18	4
14	SD NEGERI KAMPUNG BAMBU III	723	28	26	14	12
15	SD NEGERI KELAPADUA 3	404	28	14	8	6
16	SD NEGERI KELAPADUA I	393	28	14	10	4
17	SD NEGERI KELAPADUA II	368	28	13	13	0
18	SD NEGERI KELAPADUA IV	263	28	9	5	4
19	SD NEGERI PAKULONAN BARAT I	313	28	11	7	4
20	SD NEGERI PAKULONAN BARAT II	397	28	14	6	8
21	SD NEGERI PERUMNAS BUMI KELAPA DUA	482	28	17	9	8
22	SD NEGERI PERUMNAS BUMI KELAPADUA I	384	28	14	9	5
23	SD NEGERI RUMPAK SINANG	254	28	9	7	2
	Jumlah	**6766**			**161**	**81**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Kelapa Dua

dengan jumlah peserta didik 6766 dengan total 23 SDN, terlihat hampir semua SDN yang berwarna merah atau kekurangan ruang dan fasilitas sekolah.

4. Kecamatan Kemiri

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N KEMIRI 04	241	28	9	7	2
2	SD N LEGOK	295	28	11	8	3
3	SD N RANCALABUH 01	439	28	16	8	8
4	SD N RANCALABUH 02	246	28	9	10	0
5	SD N SELATIP	363	28	13	12	1
6	SD NEGERI KARANG ANYAR	315	28	11	11	0
7	SD NEGERI KELEBET 01	495	28	18	16	2
8	SD NEGERI KELEBET 02	236	28	8	6	2
9	SD NEGERI KEMIRI 01	414	28	15	15	0
10	SD NEGERI KEMIRI 02	391	28	14	12	2
11	SD NEGERI KEMIRI 03	352	28	13	11	2
12	SD NEGERI LONTAR 01	223	28	8	11	0
13	SD NEGERI LONTAR 02	128	28	5	6	0
14	SD NEGERI PATRAMANGGALA 01	256	28	9	6	3
15	SD NEGERI PATRAMANGGALA 02	209	28	7	6	1
	Jumlah	**4603**			**145**	**25**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Kemiri dengan jumlah peserta didik 4603 dengan total 15 SDN, terlihat rata rata data SDN yang berwarna merah atau kekurangan ruang dan fasilitas sekolah.

5. **Kecamatan Kosambi**

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N BLIMBING I	719	28	26	18	8
2	SD N BOJONGRENGED III	354	28	13	17	-4
3	SD N BOJONGRENGED IV	217	28	8	6	2
4	SD N DADAP IV	592	28	21	14	7
5	SD N JATIMULYA I	173	28	6	8	-2
6	SD N KOSAMBI III	625	28	22	7	15
7	SD N PEMUKIMAN	632	28	23	11	12
8	SD N RAWARENGAS I	291	28	10	6	4
9	SD N RAWARENGAS II	372	28	13	12	1
10	SD N RAWARENGAS IV	329	28	12	16	-4
11	SD N SALEMBARAN II	540	28	19	12	7
12	SD N SALEMBARAN IV	345	28	12	9	3
13	SD N SUKAMAJU	430	28	15	9	6
14	SD NEGERI BLIMBING II	603	28	22	10	12
15	SD NEGERI BLIMBING III	220	28	8	5	3
16	SD NEGERI BOJONGRENGED II	178	28	6	12	-6
17	SD NEGERI CENGKLONG I	279	28	10	6	4
18	SD NEGERI DADAP II	160	28	6	8	-2
19	SD NEGERI DADAP III	315	28	11	9	2
20	SD NEGERI JATIMULYA II	373	28	13	13	0
21	SD NEGERI KOSAMBI I	609	28	22	11	11
22	SD NEGERI KOSAMBI II	411	28	15	6	9
23	SD NEGERI RAWARENGAS III	326	28	12	9	3
24	SD NEGERI SALEMBARAN I	537	28	19	6	13
25	SD NEGERI SALEMBARAN III	568	28	20	17	3

26	SDN BOJONGRENGED 1	261	28	9	8	1
27	SDN CENGKLONG 2	497	28	18	10	8
28	SDN CENGKLONG III	390	28	14	5	9
	Jumlah	**6157**			**144**	**76**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Kosambi dengan jumlah peserta didik 6157 dengan total 28 SDN, terlihat rata rata data SDN yang berwarna merah atau kekurangan ruang dan fasilitas sekolah.

6. Kecamatan Kresek

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N KRESEK 2	295	28	11	11	0
2	SD N SONDOL	293	28	10	9	1
3	SD NEGERI GANGSA	262	28	9	10	0
4	SD NEGERI JENGKOL 1	237	28	8	8	0
5	SD NEGERI JENGKOL 2	316	28	11	13	0
6	SD NEGERI JENGKOL 3	267	28	10	8	2
7	SD NEGERI KAMUNING 1	236	28	8	8	0
8	SD NEGERI KAMUNING 2	294	28	11	7	4
9	SD NEGERI KAMUNING 3	197	28	7	7	0
10	SD NEGERI KOPER 1	156	28	6	7	0
11	SD NEGERI KOPER 2	165	28	6	6	0
12	SD NEGERI KRESEK 1	387	28	14	14	0
13	SD NEGERI KRESEK 3	93	28	3	6	0
14	SD NEGERI NAMBO	94	28	3	6	0
15	SD NEGERI PASIR AMPO	169	28	6	9	0
16	SD NEGERI PATRASANA 1	175	28	6	10	0

17	SD NEGERI PATRASANA 2	180	28	6	7	0
18	SD NEGERI PATRASANA 3	281	28	10	11	0
19	SD NEGERI RANCAILAT 1	263	28	9	13	0
20	SD NEGERI RANCAILAT 2	235	28	8	8	0
21	SD NEGERI RANCAILAT 3	217	28	8	10	0
22	SD NEGERI RENGED 1	273	28	10	10	0
23	SD NEGERI RENGED 2	166	28	6	10	0
24	SD NEGERI RENGED 3	235	28	8	7	1
25	SD NEGERI TALOK 1	133	28	5	6	0
26	SD NEGERI TALOK II	108	28	4	5	0
	Jumlah	**3174**			**138**	**1**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Kresek dengan jumlah peserta didik 3174 dengan total 26 SDN, terlihat rata rata data SDN hijau atau ruang dan fasilitas sekolah cukup.

7. Kecamatan Kronjo

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N BAKUNG I	141	28	5	6	0
2	SD N BLUKBUK I	247	28	9	9	0
3	SD N BLUKBUK II	147	28	5	8	0
4	SD N BOJONG	216	28	8	8	0
5	SD N CIRUMPAK I	240	28	9	9	0
6	SD N DAON	189	28	7	6	1
7	SD N GABRAL	273	28	10	6	4
8	SD N KEDUNG	114	28	4	6	0
9	SD N KRAMAT	133	28	5	7	0
10	SD N KRONJO I	418	28	15	12	3

11	SD N KRONJO III	200	28	7	8	0
12	SD N LINDUK	168	28	6	6	0
13	SD N MUNCUNG I	116	28	4	6	0
14	SD N MUNCUNG II	298	28	11	12	0
15	SD N PAGEDANGAN ILIR I	377	28	13	12	1
16	SD N PAGEDANGAN UDIK 01	255	28	9	12	0
17	SD N PAGENJAHAN	185	28	7	9	0
18	SD N PASILIAN 1	388	28	14	13	1
19	SD N PASIR SUSUKAN	238	28	9	5	4
20	SD NEGERI BAKUNG II	396	28	14	12	2
21	SD NEGERI BAKUNG III	175	28	6	6	0
22	SD NEGERI GAGA ILIR	298	28	11	8	3
23	SD NEGERI PASIR I	253	28	9	12	-3
24	SDN PASILIAN III	253	28	9	6	3
		4151			**146**	**14**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Kronjo dengan jumlah peserta didik 4151 dengan total 24 SDN, terlihat rata rata data SDN hijau atau ruang dan fasilitas sekolah cukup dan juga ada sebagian yang berwarna merah atau data SDN kekurangan ruang tempat belajar.

8. Kecamatan Legok

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N BOJONGKAMAL	421	28	15	7	8
2	SD N CIANGIR II	466	28	17	11	6
3	SD N CIANGIR III	402	28	14	13	1
4	SD N CIRARAB II	414	28	15	9	6
5	SD N DIRGANTARA	119	28	4	6	-2

6	SD N PALASARI 3	374	28	13	13	0
7	SD N PALASARI 4	235	28	8	8	0
8	SD N RANCAGONG I	463	28	17	9	8
9	SD N RANCAGONG III	216	28	8	4	4
10	SD NEGERI BABAKAN	482	28	17	17	0
11	SD NEGERI BABAT	346	28	12	7	5
12	SD NEGERI BABAT II	213	28	8	6	2
13	SD NEGERI CANDU I	293	28	10	9	1
14	SD NEGERI CARINGIN 1	486	28	17	6	11
15	SD NEGERI CARINGIN III	537	28	19	14	5
16	SD NEGERI CIRARAB I	437	28	16	7	9
17	SD NEGERI KAMUNING	368	28	13	13	0
18	SD NEGERI KOMPLEK API	534	28	19	13	6
19	SD NEGERI LEGOK II	472	28	17	9	8
20	SD NEGERI LEGOK III	533	28	19	7	12
21	SD NEGERI PALASARI 1	180	28	6	6	0
22	SD NEGERI PALASARI 2	373	28	13	9	4
23	SD NEGERI RANCAGONG II	573	28	20	11	9
24	SD NEGERI SERDANG WETAN	614	28	22	13	9
25	SDN CARINGIN II	474	28	17	12	5
26	SDN CIANGIR I	380	28	14	11	3
27	SDN LEGOK I	404	28	14	9	5
	Jumlah	**6871**			**155**	**90**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Legok dengan jumlah peserta didik 6871 dengan total 27 SDN, terlihat rata rata data SDN berwarna merah atau data SDN kekurangan ruang tempat belajar.

9. Kecamatan Balaraja

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N BALARAJA 03	724	28	26	11	15
2	SD N CANGKUDU 03	515	28	18	9	9
3	SD N CANGKUDU 2	93	28	3	7	0
4	SD N GEMBONG 01	434	28	16	10	6
5	SD N GEMBONG 03	405	28	14	9	5
6	SD N SAGA 01	559	28	20	10	10
7	SD N SENTUL JAYA 02	142	28	5	8	0
8	SD N SENTUL JAYA 1	194	28	7	15	0
9	SD N SUKAMURNI 02	498	28	18	12	6
10	SD N SUKAMURNI 1	422	28	15	10	5
11	SD N TALAGASARI 01	339	28	12	18	0
12	SD N TOBAT 01	431	28	15	12	3
13	SD N TOBAT 03	355	28	13	9	4
14	SD N TOBAT 04	558	28	20	9	11
15	SD N TOBAT 2	243	28	9	6	3
16	SD NEGERI BALARAJA 02	293	28	10	8	2
17	SD NEGERI CANGKUDU 04	487	28	17	13	4
18	SD NEGERI CANGKUDU 1	211	28	8	7	1
19	SD NEGERI SAGA 03	367	28	13	8	5
20	SD NEGERI SAGA 04	510	28	18	6	12
21	SD NEGERI SAGA 05	332	28	12	12	0
22	SD NEGERI SAGA 06	595	28	21	14	7
23	SD NEGERI SAGA 2	244	28	9	10	0
24	SD NEGERI SENTUL 02	175	28	6	5	1
25	SD NEGERI SENTUL 1	391	28	14	12	2

26	SD NEGERI TALAGASARI 02	116	28	4	6	0
27	SDN BALARAJA I	402	28	14	12	2
28	SDN GEMBONG 02	512	28	18	10	8
	Jumlah	**5791**			**147**	**63**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Balaraja dengan jumlah peserta didik 5791 dengan total 28 SDN, terlihat rata rata data SDN berwarna merah atau data SDN kekurangan ruang tempat belajar.

10. Kecamatan Cikupa

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N BUNDER 1	208	28	7	7	0
2	SD N BUNDER 2	324	28	12	6	6
3	SD N BUNDER 3	335	28	12	8	4
4	SD N PASIR GADUNG 01	481	28	17	9	8
5	SD N PASIR GADUNG 03	582	28	21	13	8
6	SD N PASIR JAYA	671	28	24	16	8
7	SD N SUKANAGARA	276	28	10	13	0
8	SD N TALAGA 03	445	28	16	9	7
9	SD NEGERI BITUNG JAYA 02	177	28	6	4	2
10	SD NEGERI BITUNGJAYA 01	169	28	6	8	0
11	SD NEGERI BOJONG 01	354	28	13	10	3
12	SD NEGERI BOJONG 03	369	28	13	10	3
13	SD NEGERI BOJONG 04	361	28	13	10	3
14	SD NEGERI BOJONG 05	381	28	14	10	4
15	SD NEGERI BOJONG 2	193	28	7	6	1
16	SD NEGERI BUDIMULYA	217	28	8	6	2

17	SD NEGERI BUNDER 4	385	28	14	8	6
18	SD NEGERI CIBADAK 01	315	28	11	11	0
19	SD NEGERI CIBADAK 02	401	28	14	16	0
20	SD NEGERI CIBADAK 03	283	28	10	6	4
21	SD NEGERI CIBADAK 04	336	28	12	6	6
22	SD NEGERI CIBADAK 05	143	28	5	6	0
23	SD NEGERI CIKUPA 01	604	28	22	13	9
24	SD NEGERI CIKUPA 02	634	28	23	15	8
25	SD NEGERI CIKUPA 03	535	28	19	13	6
26	SD NEGERI CIKUPA 04	356	28	13	11	2
27	SD NEGERI CIKUPA 06	315	28	11	10	1
28	SD NEGERI CIREWED	617	28	22	11	11
29	SD NEGERI DUKUH 01	541	28	19	12	7
30	SD NEGERI DUKUH 03	504	28	18	9	9
31	SD NEGERI DUKUH 05	465	28	17	7	10
32	SD NEGERI KADU	379	28	14	10	4
33	SD NEGERI PABUARAN	583	28	21	18	3
34	SD NEGERI PALAHLAR	335	28	12	12	0
35	SD NEGERI PASIR AWI	444	28	16	8	8
36	SD NEGERI PASIRGADUNG II	550	28	20	6	14
37	SD NEGERI SUKAMULYA 01	629	28	22	14	8
38	SD NEGERI SUKAMULYA 02	455	28	16	6	10
39	SD NEGERI TALAGA 01	412	28	15	9	6
40	SD NEGERI TALAGA 02	305	28	11	7	4
41	SD NEGERI TALAGASARI	488	28	17	9	8
	Jumlah	**7378**			**159**	**105**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Cikupa dengan jumlah peserta didik 7378 dengan total 41 SDN, terlihat hampir semua data SDN berwarna merah atau data SDN kekurangan ruang

tempat belajar.

11. Kecamatan Cisauk

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N BENDUNGAN	157	28	6	6	0
2	SD N CIBOGO	405	28	14	6	8
3	SD N PERUMNAS SURADITA	569	28	20	15	5
4	SD Negeri Anamui	210	28	8	7	1
5	SD NEGERI CICAYUR 02	503	28	18	9	9
6	SD NEGERI CICAYUR I	443	28	16	12	4
7	SD NEGERI CISAUK	437	28	16	11	5
8	SD Negeri Dangdang II	373	28	13	13	0
9	SD NEGERI KEDOKAN	496	28	18	11	7
10	SD NEGERI KIANSANTANG JAYA	176	28	6	6	0
11	SD NEGERI PAJAJARAN	359	28	13	8	5
12	SD NEGERI RAHAYU	739	28	26	20	6
13	SD NEGERI SAMPORA 1	315	28	11	11	0
14	SD NEGERI SAMPORA 2	515	28	18	11	7
15	SD NEGERI SURADITA	802	28	29	20	9
16	SDN DANGDANG I	319	28	11	9	2
17	SDN MEKARWANGI	482	28	17	14	3
	Jumlah	**7143**			**183**	**72**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Cisauk dengan jumlah peserta didik 7143 dengan total 17 SDN, terlihat hampir semua data SDN berwarna merah atau data SDN kekurangan ruang tempat belajar.

12. Kecamatan Cisoka

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N BOJONG LOA I	314	28	11	11	0
2	SD N CAMPAKA I	442	28	16	8	8
3	SD N CAMPAKA II	286	28	10	7	3
4	SD N CARENANG II	164	28	6	6	0
5	SD N CARINGIN I	243	28	9	8	1
6	SD N CARINGIN III	216	28	8	6	2
7	SD N JEUNGJING I	595	28	21	11	10
8	SD N JEUNGJING III	310	28	11	8	3
9	SD N KARANGHARJA II	418	28	15	12	3
10	SD N SUKATANI I	544	28	19	9	10
11	SD NEGERI BOJONGLOA 2	372	28	13	7	6
12	SD NEGERI CAMPAKA III	503	28	18	13	5
13	SD NEGERI CARENANG I	234	28	8	7	1
14	SD NEGERI CARENANG III	154	28	6	6	-1
15	SD NEGERI CARINGIN 2	223	28	8	6	2
16	SD NEGERI CIBUGEL 1	182	28	7	6	1
17	SD NEGERI CIBUGEL II	276	28	10	6	4
18	SD NEGERI CIBUGEL III	86	28	3	6	0
19	SD NEGERI CISOKA I	600	28	21	19	2
20	SD NEGERI CISOKA II	213	28	8	8	0
21	SD NEGERI CISOKA III	410	28	15	10	5
22	SD NEGERI JEUNGJING II	416	28	15	14	1
23	SD NEGERI KARANGHARJA I	424	28	15	7	8
24	SD NEGERI SLAPAJANG I	366	28	13	10	3
25	SD NEGERI SLAPAJANG II	212	28	8	6	2

26	SD NEGERI SLAPAJANG III	167	28	6	7	0
27	SD NEGERI SLAPAJANG IV	223	28	8	6	2
28	SD NEGERI SUKATANI II	230	28	8	11	0
29	SD NEGERI SUKATANI III	213	28	8	8	0
	Jumlah	**4395**			**136**	**28**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Cisoka dengan jumlah peserta didik 4395 dengan total 29 SDN, terlihat hampir semua data SDN berwarna merah atau data SDN kekurangan ruang tempat belajar.

13. Kecamatan Curug

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N BINONG I	514	28	18	11	7
2	SD N BINONG III	524	28	19	12	7
3	SD N BINONG IV	516	28	18	7	11
4	SD N BINONG V	322	28	12	6	6
5	SD N BINONG VI	416	28	15	7	8
6	SD N CUKANGGALIH III	248	28	9	6	3
7	SD N CUKANGGALIH IV	304	28	11	7	4
8	SD N CURUG 4	503	28	18	7	11
9	SD N CURUG KULON IV	302	28	11	6	5
10	SD N CURUG WETAN I	254	28	9	6	3
11	SD N CURUG WETAN II	405	28	14	11	3
12	SD N CURUG WETAN IV	278	28	10	6	4
13	SD N CURUG WETAN V	140	28	5	6	-1
14	SD N CURUG WETAN VI	297	28	11	6	5
15	SD N NAGROG	251	28	9	8	1

16	SD NEGERI CUKANGGALIH 2	558	28	20	9	11
17	SD NEGERI CUKANGGALIH I	318	28	11	5	6
18	SD NEGERI CURUG I	155	28	6	6	0
19	SD NEGERI CURUG II	361	28	13	8	5
20	SD NEGERI CURUG III	260	28	9	8	1
21	SD NEGERI CURUG KULON I	401	28	14	7	7
22	SD NEGERI CURUG KULON II	402	28	14	8	6
23	SD NEGERI CURUG KULON III	285	28	10	7	3
24	SD NEGERI KADU I	385	28	14	14	0
25	SD NEGERI KADU III	496	28	18	13	5
26	SD NEGERI KADU JAYA	232	28	8	6	2
27	SD NEGERI KADU SEMPUR	631	28	23	14	9
28	SD NEGERI SUKABAKTI	558	28	20	9	11
29	SDN BINONG II	574	28	21	9	12
30	SDN KADU II	380	28	14	6	8
31	SDN KADU IV	361	28	13	10	3
	Jumlah	**6357**			**139**	**88**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Curug dengan jumlah peserta didik 6357 dengan total 31 SDN, terlihat hampir semua data SDN berwarna merah atau data SDN kekurangan ruang tempat belajar.

14. Kecamatan Mekar Baru

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N CIJERUK I	236	28	8	9	0
2	SD N GANDARIA I	518	28	19	22	0
3	SD N JENGGATI	161	28	6	6	0

4	SD N PASIR BUAH	242	28	9	8	1
5	SD NEGERI BENDUNG	176	28	6	6	0
6	SD NEGERI CIJERUK II	142	28	5	8	0
7	SD NEGERI CIRAKO	174	28	6	6	0
8	SD NEGERI GADOG	266	28	10	11	0
9	SD NEGERI GAGA JENGGOT	178	28	6	6	0
10	SD NEGERI JENGGOT 01	279	28	10	6	4
11	SD NEGERI KEDAUNG 1	221	28	8	6	2
12	SD NEGERI KOSAMBI DALAM I	153	28	5	7	0
13	SD NEGERI TEGAL SARI	129	28	5	8	0
14	SD NEGERI WALIWIS I	208	28	7	10	0
15	SD NEGERI WALIWIS II	181	28	6	7	0
16	SDN BURAK	66	28	2	7	0
17	SDN KOSAMBI DALAM II	210	28	8	9	0
	Jumlah	**3304**			**133**	**7**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Mekar Baru dengan jumlah peserta didik 3304 dengan total 17 SDN, terlihat hampir semua data SDN berwarna hijau atau data SDN kecukupan ruang tempat belajar.

15. Kecamatan Pagedangan

1	SD N BOJONGNANGKA	317	28	11	13	0
2	SD N CIAKAR	246	28	9	6	3
3	SD N CIJANTRA III	122	28	4	3	1
4	SD N JATAKE	204	28	7	7	0
5	SD N KADUSIRUNG I	295	28	11	8	3
6	SD N LENGKONG KULON I	113	28	4	6	0
7	SD N MALANG NENGAH 1	204	28	7	5	2

8	SD N MALANGNENGAH II	226	28	8	9	0
9	SD N MALANGNENGAH III	513	28	18	10	8
10	SD N MEDANG	425	28	15	12	3
11	SD N PAGEDANGAN I	399	28	14	9	5
12	SD N PONDOK JENGKOL	127	28	5	6	0
13	SD N SITUGADUNG IV	220	28	8	6	2
14	SD NEGERI CICALENGKA	215	28	8	6	2
15	SD NEGERI CIHUNI III	390	28	14	12	2
16	SD NEGERI CIJANTRA II	112	28	4	6	0
17	SD NEGERI KADUSIRUNG II	141	28	5	6	0
18	SD NEGERI LENGKONG KULON II	162	28	6	6	0
19	SD NEGERI PAGEDANGAN II	148	28	5	6	0
20	SD NEGERI PAGEDANGAN III	128	28	5	6	0
21	SD NEGERI PUSPITEK	213	28	8	10	0
22	SD NEGERI SITUGADUNG III	84	28	3	6	0
23	SD NEGERI TEGAL	118	28	4	6	0
24	SDN CICAYUR	127	28	5	6	0
25	SDN CIJANTRA I	119	28	4	6	0
26	SDN SITUGADUNG I	191	28	7	6	1
27	SDN SITUGADUNG II	134	28	5	6	0
	Jumlah	**2629**			**106**	**6**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Pagedangan dengan jumlah peserta didik 2629 dengan total 24 SDN, terlihat hampir semua data SDN berwarna hijau atau data SDN kecukupan ruang tempat belajar dan sebagian terdapat SDN yang kekurangan ruang belajar.

16. Kecamatan Pakuhaji

1	SDN BONISARI	273	28	10	6	4

2	SDN BONISARI 2	252	28	9	8	1
3	SDN BUARAN BAMBU I	266	28	10	6	4
4	SDN BUARAN BAMBU II	358	28	13	12	1
5	SDN BUARAN BAMBU III	226	28	8	9	0
6	SDN BUARAN BAMBU IV	378	28	14	8	6
7	SDN BUARAN BAMBU V	291	28	10	12	0
8	SDN BUARAN MANGGA I	315	28	11	5	6
9	SDN BUARAN MANGGA II	415	28	15	6	9
10	SDN BUARAN MANGGA III	117	28	4	7	0
11	SDN BUARAN MANGGA IV	237	28	8	3	5
12	SDN GAGA I	400	28	14	12	2
13	SDN GAGA II	589	28	21	9	12
14	SDN GAGA III	456	28	16	9	7
15	SDN KIARAPAYUNG	731	28	26	14	12
16	SDN KOHOD I	315	28	11	13	0
17	SDN KOHOD II	646	28	23	14	9
18	SDN KOHOD III	457	28	16	17	0
19	SDN KOHOD IV	345	28	12	12	0
20	SDN KRAMAT I	478	28	17	12	5
21	SDN KRAMAT II	367	28	13	10	3
22	SDN KRAMAT III	173	28	6	5	1
23	SDN KRAMAT IV	137	28	5	6	0
24	SDN KRAMAT V	307	28	11	7	4
25	SDN PAKUALAM	203	28	7	4	3
26	SDN PAKUHAJI I	417	28	15	15	0
27	SDN PAKUHAJI II	275	28	10	10	0
28	SDN PAKUHAJI III	385	28	14	6	8
29	SDN PAKUHAJI IV	176	28	6	7	0
30	SDN PAKUHAJI V	373	28	13	9	4
31	SDN RAWA BONI I	120	28	4	6	0

32	SDN RAWA BONI II	252	28	9	10	0
33	SDN RAWA BONI III	347	28	12	6	6
34	SDN RAWA BONI IV	432	28	15	8	7
35	SDN SUKAWALI	200	28	7	6	1
36	SDN SURYABAHARI	355	28	13	11	2
	Jumlah	**4519**			**126**	**40**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Pakuhaji dengan jumlah peserta didik 4519 dengan total 36 SDN, terlihat hampir semua data SDN berwarna merah atau terdapat SDN yang kekurangan ruang belajar.

17. Kecamatan Panongan

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD NEGERI CIAKAR 1	173	28	6	9	0
2	SD NEGERI CIAKAR 2	778	28	28	12	16
3	SD NEGERI CIPARI 2	265	28	9	10	0
4	SD NEGERI CIPARI I	718	28	26	16	10
5	SD NEGERI MEKAR BAKTI	762	28	27	18	9
6	SD NEGERI MEKARJAYA	278	28	10	10	0
7	SD NEGERI NALAGATI	404	28	14	7	7
8	SD NEGERI PANONGAN I	439	28	16	7	9
9	SD NEGERI PANONGAN II	256	28	9	9	0
10	SD NEGERI PANONGAN III	608	28	22	12	10
11	SD NEGERI PEUSAR I	505	28	18	11	7
12	SD NEGERI PEUSAR II	583	28	21	13	8
13	SD NEGERI PEUSAR III	286	28	10	9	1
14	SD NEGERI RANCAIYUH I	259	28	9	7	2

15	SD NEGERI RANCAIYUH II	484	28	17	16	1
16	SD NEGERI RANCAIYUH III	278	28	10	7	3
17	SD NEGERI RANCAIYUH IV	338	28	12	6	6
18	SD NEGERI RANCAKALAPA I	604	28	22	9	13
19	SD NEGERI RANCAKALAPA II	308	28	11	9	2
20	SD NEGERI RANCAKALAPA III	252	28	9	9	0
21	SD NEGERI SEMPUR	200	28	7	6	1
22	SD NEGERI SERDANGKULON I	444	28	16	11	5
23	SD NEGERI SERDANGKULON II	323	28	12	9	3
24	SD NEGERI SERDANGKULON III	346	28	12	9	3
25	SD NEGERI SERDANGKULON IV	427	28	15	7	8
26	SD NEGERI TARISI	427	28	15	10	5
	Jumlah	**6064**			**148**	**69**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Panongan dengan jumlah peserta didik 6064 dengan total 26 SDN, terlihat hampir semua data SDN berwarna merah atau terdapat SDN yang kekurangan ruang belajar.

18. Kecamatan Pasar Kemis

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N KUTABARU I	808	28	29	18	11
2	SD N KUTABUMI III	643	28	23	10	13
3	SD N KUTABUMI IV	474	28	17	7	10
4	SD N KUTAJAYA I	912	28	33	18	15
5	SD N KUTAJAYA II	839	28	30	16	14
6	SD N SINDANGSARI I	758	28	27	12	15
7	SD N SINDANGSARI III	589	28	21	9	12

8	SD N SINDANGSARI IV	626	28	22	9	13
9	SD NEGERI GELAMJAYA I	790	28	28	12	16
10	SD NEGERI GELAMJAYA II	496	28	18	9	9
11	SD NEGERI KUTABUMI I	643	28	23	12	11
12	SD NEGERI KUTABUMI II	744	28	27	14	13
13	SD NEGERI PANGADEGAN I	344	28	12	9	3
14	SD NEGERI PANGADEGAN II	520	28	19	9	10
15	SD NEGERI PANGADEGAN III	177	28	6	6	0
16	SD NEGERI PANGADEGAN IV	637	28	23	9	14
17	SD NEGERI PASARKEMIS I	433	28	15	9	6
18	SD NEGERI PASARKEMIS II	491	28	18	10	8
19	SD NEGERI PASARKEMIS III	820	28	29	16	13
20	SD NEGERI SINDANGSARI II	749	28	27	16	11
21	SD NEGERI SUKAASIH I	740	28	26	15	11
22	SD NEGERI SUKAASIH II	418	28	15	6	9
23	SD NEGERI SUKAASIH III	274	28	10	7	3
24	SD NEGERI SUKAMANTRI 1	793	28	28	16	12
25	SD NEGERI SUKAMANTRI II	412	28	15	6	9
26	SDN PASARKEMIS IV	770	28	28	13	15
	Jumlah	**8965**			**173**	**147**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Pasar Kemis dengan jumlah peserta didik 8965 dengan total 26 SDN, terlihat hampir semua data SDN berwarna merah atau terdapat SDN yang kekurangan ruang belajar.

19. Kecamatan Sepatan

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N KARET III	488	28	17	8	9
2	SD N KAYU BONGKOK I	452	28	16	8	8
3	SD N MEKAR JAYA	656	28	23	11	12
4	SD N PONDOK JAYA	507	28	18	10	8
5	SD N SARAKAN I	786	28	28	12	16
6	SD N SARAKAN II	509	28	18	12	6
7	SD N SARAKAN III	826	28	30	20	10
8	SD N SARAKAN IV	196	28	7	7	0
9	SD N SEPATAN IV	581	28	21	10	11
10	SD NEGERI KARET I	774	28	28	18	10
11	SD NEGERI KARET II	639	28	23	11	12
12	SD NEGERI KAYU AGUNG	571	28	20	13	7
13	SD NEGERI KAYU BONGKOK 2	449	28	16	13	3
14	SD NEGERI KAYU BONGKOK III	340	28	12	9	3
15	SD NEGERI SEPATAN I	798	28	29	14	15
16	SD NEGERI SEPATAN II	737	28	26	10	16
17	SD NEGERI SEPATAN V	555	28	20	13	7
18	SDN SEPATAN 3	692	28	25	8	17
	Jumlah	**9616**			**191**	**152**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Sepatan dengan jumlah peserta didik 9616 dengan total 18 SDN, terlihat hampir semua data SDN berwarna merah atau terdapat SDN yang kekurangan ruang belajar.

20. Kecamatan Sepatan Timur

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N KAMPUNG BAYUR	434	28	16	8	8
2	SD N KAMPUNG KELOR I	396	28	14	6	8
3	SD N KAMPUNG KELOR II	452	28	16	6	10
4	SD N KEDAUNG BARAT I	643	28	23	11	12
5	SD N KEDAUNG BARAT III	216	28	8	6	2
6	SD N LEBAK WANGI	945	28	34	17	17
7	SD N RAWA GEMPOL	495	28	18	11	7
8	SD N SANGIANG 2	637	28	23	12	11
9	SD N SANGIANG V	565	28	20	8	12
10	SD NEGERI GEMPOL SARI	480	28	17	6	11
11	SD NEGERI KAMPUNG KELOR 3	127	28	5	10	0
12	SD NEGERI KEDAUNG BARAT 2	255	28	9	6	3
13	SD NEGERI PONDOK KELOR	509	28	18	10	8
14	SD NEGERI SANGIANG I	186	28	7	6	1
15	SD NEGERI SANGIANG IV	242	28	9	6	3
16	SD NEGERI TANAH MERAH I	630	28	23	10	13
17	SDN JATI MULYA	443	28	16	8	8
18	SDN KEDAUNG BARAT 4	746	28	27	18	9
19	SDN SANGIANG III	613	28	22	11	11
	Jumlah	**7732**			**156**	**126**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Sepatan Timur dengan jumlah peserta didik 7732 dengan total 19 SDN, terlihat hampir semua data SDN berwarna merah atau terdapat SDN yang kekurangan ruang belajar.

21. Kecamatan Sindang Jaya

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SDN BADAK ANOM	368	28	13	12	1
2	SDN SINDANG PANON III	295	28	11	7	4
3	SDN SINDANGASIH I	320	28	11	11	0
4	SDN SINDANGASIH II	284	28	10	9	1
5	SDN SINDANGASIH III	268	28	10	7	3
6	SDN SINDANGJAYA I	389	28	14	9	5
7	SDN SINDANGJAYA II	330	28	12	7	5
8	SDN SINDANGJAYA III	402	28	14	12	2
9	SDN SINDANGJAYA IV	190	28	7	7	0
10	SDN SINDANGPANON I	593	28	21	8	13
11	SDN SINDANGPANON II	516	28	18	11	7
12	SDN SINDANGSONO I	426	28	15	9	6
13	SDN SINDANGSONO II	376	28	13	9	4
14	SDN SINDANGSONO III	355	28	13	11	2
15	SDN SINDANGSONO IV	310	28	11	6	5
16	SDN SINDANGSONO V	200	28	7	6	1
17	SDN SINDANGSONO VI	293	28	10	9	1
18	SDN SUKAHARJA I	382	28	14	6	8
19	SDN SUKAHARJA II	639	28	23	10	13
20	SDN SUKAHARJA III	367	28	13	15	0
21	SDN WANAKERTA I	291	28	10	13	0
22	SDN WANAKERTA II	333	28	12	7	5
23	SDN WANAKERTA III	290	28	10	7	3
24	SDN WANAKERTA IV	452	28	16	7	9
25	SDN WANAKERTA V	189	28	7	6	1

	Jumlah	**6012**			**140**	**79**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Sindang Jaya dengan jumlah peserta didik 6012 dengan total 25 SDN, terlihat hampir semua data SDN berwarna merah atau terdapat SDN yang kekurangan ruang belajar.

22. Kecamatan Solear

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N CIKASUNGKA I	510	28	18	10	8
2	SD N CIKASUNGKA II	693	28	25	13	12
3	SD N CIKASUNGKA III	485	28	17	17	0
4	SD N CIKASUNGKA IV	379	28	14	9	5
5	SD N CIKUYA II	764	28	27	22	5
6	SD N CIKUYA IV	253	28	9	9	0
7	SD N CIREUNDEU II	389	28	14	7	7
8	SD N MUNJUL I	351	28	13	9	4
9	SD N PASANGGRAHAN I	851	28	30	10	20
10	SD N PASANGGRAHAN II	763	28	27	14	13
11	SD N PASANGGRAHAN III	252	28	9	6	3
12	SD N PASANGGRAHAN IV	654	28	23	7	16
13	SD N SOLEAR II	368	28	13	8	5
14	SD NEGERI CIKAREO I	435	28	16	9	7
15	SD NEGERI CIKUYA I	378	28	14	8	6
16	SD NEGERI CIKUYA III	418	28	15	8	7
17	SD NEGERI CIKUYA V	495	28	18	9	9
18	SD NEGERI CIREUNDEU I	209	28	7	7	0
19	SD NEGERI MUNJUL 2	386	28	14	14	0

20	SD NEGERI SOLEAR 1	266	28	10	7	3
21	SD NEGERI SOLEAR III	158	28	6	6	0
22	SDN CIKAREO II	140	28	5	6	0
	Jumlah	**6513**			**135**	**99**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Solear dengan jumlah peserta didik 6513 dengan total 22 SDN, terlihat hampir semua data SDN berwarna merah atau terdapat SDN yang kekurangan ruang belajar.

23. Kecamatan Sukadiri

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N KARANG SERANG III	229	28	8	6	2
2	SD N MEKAR KONDANG	152	28	5	6	0
3	SD N SUKADIRI	399	28	14	13	1
4	SD N TUIS I	259	28	9	14	0
5	SD N TUIS II	279	28	10	6	4
6	SD NEGERI BUARANJATI I	562	28	20	17	3
7	SD NEGERI BUARANJATI II	289	28	10	7	3
8	SD NEGERI GINTUNG I	586	28	21	12	9
9	SD NEGERI GINTUNG II	1153	28	41	13	28
10	SD NEGERI KARANG SERANG I	284	28	10	9	1
11	SD NEGERI KARANG SERANG II	236	28	8	9	0
12	SD NEGERI KOSAMBI I SUKADIRI	304	28	11	6	5
13	SD NEGERI KOSAMBI III SUKADIRI	293	28	10	12	0
14	SD NEGERI PEKAYON I	294	28	11	11	0
15	SD NEGERI PEKAYON III	186	28	7	6	1
16	SD NEGERI RAWAKIDANG	480	28	17	15	2
17	SDN KOSAMBI II SUKADIRI	242	28	9	6	3

18	SDN PEKAYON II	367	28	13	10	3
	Jumlah	**6213**			**166**	**63**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Sukadiri dengan jumlah peserta didik 6213 dengan total 18 SDN, terlihat rata-rata atau sebagain besar data SDN berwarna merah atau SDN kekurangan ruang belajar.

24. Kecamatan Teluknaga

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N KAMPUNG BESAR III	422	28	15	9	6
2	SD N KAMPUNG MELAYU I	563	28	20	12	8
3	SD N KAMPUNG MELAYU III	340	28	12	7	5
4	SD N KAMPUNG MELAYU IV	305	28	11	6	5
5	SD N KAMPUNG MELAYU V	357	28	13	8	5
6	SD N KAMPUNG MELAYU VI	456	28	16	14	2
7	SD N KAMPUNG MELAYU VII	169	28	6	7	-1
8	SD N KAPUK JAYA	678	28	24	11	13
9	SD N KEBONCAU 1	564	28	20	13	7
10	SD N KEBONCAU II	572	28	20	8	12
11	SD N KEBONCAU III	433	28	15	13	2
12	SD N LEMO I	150	28	5	6	-1
13	SD N MUARA I	292	28	10	12	-2
14	SD N PANCAR BUDAYA	207	28	7	5	2
15	SD N TELUKNAGA II	233	28	8	5	3
16	SD NEGERI BOJONGRENGED V	305	28	11	6	5
17	SD NEGERI BOJONGRENGED VI	285	28	10	4	6
18	SD NEGERI HARAPAN	285	28	10	8	2

19	SD NEGERI KAMPUNG BESAR I	297	28	11	10	1
20	SD NEGERI KAMPUNG BESAR II	236	28	8	6	2
21	SD NEGERI KAMPUNG MELAYU 09	165	28	6	8	0
22	SD NEGERI KAMPUNG MELAYU II	694	28	25	12	13
23	SD NEGERI KEBONCAU IV	515	28	18	13	5
24	SD NEGERI KEDUNG JAYA	598	28	21	9	12
25	SD NEGERI LEMO 2	231	28	8	6	2
26	SD NEGERI LEMO III	209	28	7	6	1
27	SD NEGERI MUARA II	340	28	12	6	6
28	SD NEGERI MUARA III	182	28	7	7	0
29	SD NEGERI PANGKALAN 2	255	28	9	6	3
30	SD NEGERI PANGKALAN 3	207	28	7	6	1
31	SD NEGERI PANGKALAN I	455	28	16	8	8
32	SD NEGERI PANGKALAN IV	256	28	9	7	2
33	SD NEGERI TANJUNG BURUNG	393	28	14	6	8
34	SD NEGERI TANJUNG PASIR I	220	28	8	7	1
35	SD NEGERI TANJUNG PASIR II	275	28	10	6	4
36	SD NEGERI TEGALANGUS	476	28	17	11	6
37	SD NEGERI TELUKNAGA I	499	28	18	7	11
38	SD NEGERI TELUKNAGA III	241	28	9	9	0
39	SDN BABAKAN ASEM 2	336	28	12	10	2
	Jumlah	**5173**			**117**	**68**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Teluknaga dengan jumlah peserta didik 5173 dengan total 39 SDN, terlihat rata-rata atau sebagain besar data SDN berwarna merah atau SDN kekurangan ruang belajar.

25. Kecamatan Tigaraksa

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N BANTARPANJANG	385	28	14	8	6
2	SD N CILELES	446	28	16	10	6
3	SD N GURADOG	253	28	9	8	1
4	SD N JALUPANG	266	28	10	7	3
5	SD N KADEPER	272	28	10	8	2
6	SD N TAPOS	263	28	9	7	2
7	SD NEGERI BIDARA	383	28	14	6	8
8	SD NEGERI BUGEL	520	28	19	8	11
9	SD NEGERI CIGALING	335	28	12	9	3
10	SD NEGERI CISEREH 01	156	28	6	9	0
11	SD NEGERI CISEREH 02	168	28	6	7	0
12	SD NEGERI COGREG 01	495	28	18	11	7
13	SD NEGERI COGREG 02	242	28	9	9	0
14	SD NEGERI GUDANG	560	28	20	18	2
15	SD NEGERI KADONGDONG	501	28	18	18	0
16	SD NEGERI KADU TIGARAKSA	443	28	16	6	10
17	SD NEGERI KADUAGUNG 01	304	28	11	13	0
18	SD NEGERI KADUAGUNG 2	507	28	18	13	5
19	SD NEGERI KALAPADUA 01	231	28	8	10	0
20	SD NEGERI KALAPADUA 02	195	28	7	8	0
21	SD NEGERI MATAGARA	580	28	21	14	7
22	SD NEGERI NAGRAK	747	28	27	18	9
23	SD NEGERI PASIRBOLANG	148	28	5	10	0
24	SD NEGERI PASIRNANGKA	288	28	10	7	3
25	SD NEGERI PETE	101	28	4	10	0
26	SD NEGERI PINANG	618	28	22	14	8
27	SD NEGERI SEGLOG	132	28	5	6	0
28	SD NEGERI SODONG 01	493	28	18	13	5

29	SD NEGERI SODONG 02	361	28	13	10	3
30	SD NEGERI TAPOS WETAN	413	28	15	10	5
31	SD NEGERI TIGARAKSA 01	208	28	7	14	0
32	SD NEGERI TIGARAKSA 02	444	28	16	13	3
33	SD NEGERI TIGARAKSA 04	721	28	26	19	7
34	SD NEGERI TIGARAKSA III	483	28	17	9	8
35	SDN BABAKAN TIGARAKSA	400	28	14	6	8
36	SDN PERUM MUSTIKA	527	28	19	7	12
37	SDN PEUSAR	300	28	11	13	0
38	SDN TIGARAKSA 5	615	28	22	18	4
	Jumlah	**6252**			**179**	**66**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Tigaraksa dengan jumlah peserta didik 6252 dengan total 38 SDN, terlihat rata-rata atau sebagain besar data SDN berwarna merah atau SDN kekurangan ruang belajar.

26. Kecamatan Rajeg

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N DAON 2	248	28	9	6	3
2	SD N KAMPUNGBARU I	265	28	9	6	3
3	SD N RAJEG V	727	28	26	11	15
4	SD N RANCABANGO IV	480	28	17	7	10
5	SD N TANJAKAN 01	257	28	9	5	4
6	SD N TANJAKAN 03	404	28	14	7	7
7	SD NEGERI BADAK 01	164	28	6	7	0
8	SD NEGERI BADAK 2	131	28	5	6	0
9	SD NEGERI BADAK 3	309	28	11	8	3

10	SD NEGERI DAON 3	364	28	13	7	6
11	SD NEGERI DAON I	192	28	7	6	1
12	SD NEGERI KAMPUNG BARU 3	167	28	6	6	0
13	SD NEGERI KAMPUNGBARU 04	300	28	11	6	5
14	SD NEGERI KAMPUNGBARU II	321	28	11	12	0
15	SD NEGERI MEKARSARI 01	657	28	23	8	15
16	SD NEGERI MEKARSARI 02	877	28	31	13	18
17	SD NEGERI ONOM	217	28	8	6	2
18	SD NEGERI RAJEG 01	573	28	20	6	14
19	SD NEGERI RAJEG 02	523	28	19	9	10
20	SD NEGERI RAJEG 03	700	28	25	9	16
21	SD NEGERI RAJEG 04	831	28	30	8	22
22	SD NEGERI RANCABANGO 01	321	28	11	9	2
23	SD NEGERI RANCABANGO 03	420	28	15	10	5
24	SD NEGERI RANCABANGO II	555	28	20	11	9
25	SD NEGERI SUKAMANAH 01	428	28	15	6	9
26	SD NEGERI SUKAMANAH 03	514	28	18	7	11
27	SD NEGERI SUKAMANAH 2	461	28	16	7	9
28	SD NEGERI SUKASARI 01	430	28	15	6	9
29	SD NEGERI SUKASARI 02	938	28	34	12	22
30	SD NEGERI SUKASARI 03	443	28	16	6	10
31	SD NEGERI SUKASARI 4	314	28	11	6	5
32	SD NEGERI SUKATANI 01	670	28	24	7	17
33	SD NEGERI SUKATANI 02	615	28	22	10	12
34	SD NEGERI SUKATANI 03	533	28	19	12	7
35	SD NEGERI SUKATANI 04	530	28	19	9	10
36	SD NEGERI SUKATANI 05	375	28	13	8	5
37	SD NEGERI SUKATANI 06	664	28	24	14	10
38	SD NEGERI SUKATANI 07	494	28	18	7	11
39	SD NEGERI TANJAKAN 02	294	28	11	9	2

40	SD NEGERI TANJAKAN 04	493	28	18	6	12
	Jumlah	**8196**			**132**	**161**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Rajeg dengan jumlah peserta didik 8196 dengan total 40 SDN, terlihat hampir semua data SDN berwarna merah atau SDN kekurangan ruang belajar.

27. Kecamatan Mauk

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N BUARAN ASEM	295	28	11	6	5
2	SD N KEDUNG DALAM II	246	28	9	7	2
3	SD N KETAPANG	477	28	17	15	2
4	SD N MARGAMULYA	345	28	12	8	4
5	SD N MAUK III	255	28	9	6	3
6	SD N MAUK IV	198	28	7	8	0
7	SD N TANJUNG ANOM	286	28	10	10	0
8	SD NEGERI BANYUASIH	538	28	19	13	6
9	SD NEGERI GUNUNGSARI	453	28	16	10	6
10	SD NEGERI JATIGINTUNG I	269	28	10	7	3
11	SD NEGERI JATIGINTUNG II	273	28	10	8	2
12	SD NEGERI JATIGINTUNG III	162	28	6	5	1
13	SD NEGERI JATIGINTUNG IV	182	28	7	7	0
14	SD NEGERI KAROLINA	264	28	9	9	0
15	SD NEGERI KEBON BARU	227	28	8	6	2
16	SD NEGERI KEDUNG DALAM I	227	28	8	6	2
17	SD NEGERI KEDUNG DALAM III	312	28	11	10	1
18	SD NEGERI MARGAHAYU	189	28	7	8	0
19	SD NEGERI MAUK BARAT	230	28	8	7	1

20	SD NEGERI MAUK I	338	28	12	10	2
21	SD NEGERI MAUK II	140	28	5	5	0
22	SD NEGERI SASAK I	266	28	10	11	0
23	SD NEGERI SASAK II	418	28	15	10	5
24	SD NEGERI SETIA BHAKTI	208	28	7	6	1
25	SD NEGERI TEGAL KUNIR KIDUL I	218	28	8	8	0
26	SD NEGERI TEGAL KUNIR KIDUL II	326	28	12	10	2
27	SD NEGERI TEGAL KUNIR LOR I	605	28	22	10	12
28	SD NEGERI TEGAL KUNIR LOR II	290	28	10	13	0
	Jumlah	**4440**			**136**	**28**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Mauk dengan jumlah peserta didik 4440 dengan total 28 SDN, terlihat sebagian besar data SDN berwarna merah atau SDN kekurangan ruang belajar.

28. Kecamatan Gunung Kaler

	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N GUNUNG KALER 1	217	28	8	7	1
2	SD N KANDAWATI 2	391	28	14	10	4
3	SD N ONYAM 1	193	28	7	6	1
4	SD N RANCA GEDE 3	232	28	8	17	0
5	SD N RANCAGEDE 2	122	28	4	6	0
6	SD NEGERI CIBETOK 1	421	28	15	11	4
7	SD NEGERI CIBETOK II	237	28	8	9	0
8	SD NEGERI CIPAEH	350	28	13	10	3
9	SD NEGERI GUNUNG KALER 2	235	28	8	8	0
10	SD NEGERI KANDAWATI 1	95	28	3	6	0

11	SD NEGERI KANDAWATI 3	97	28	3	6	0
12	SD NEGERI KEDUNG 1	118	28	4	6	0
13	SD NEGERI KEDUNG 2	167	28	6	6	0
14	SD NEGERI KEDUNG 3	230	28	8	5	3
15	SD NEGERI ONYAM 2	214	28	8	7	1
16	SD NEGERI ONYAM III	241	28	9	7	2
17	SD NEGERI RANCAGEDE 1	253	28	9	5	4
18	SD NEGERI SIDOKO 1	286	28	10	10	0
19	SD NEGERI TAMIANG 1	223	28	8	6	2
20	SD NEGERI TAMIANG 2	170	28	6	13	0
21	SD NEGERI TAMIANG 3	295	28	11	16	0
	Jumlah	**3632**			**131**	**19**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Gung Kaler dengan jumlah peserta didik 3632 dengan total 21 SDN, terlihat sebagian besar data SDN berwarna hijau atau SDN tercukupi kebutuhan ruang belajar

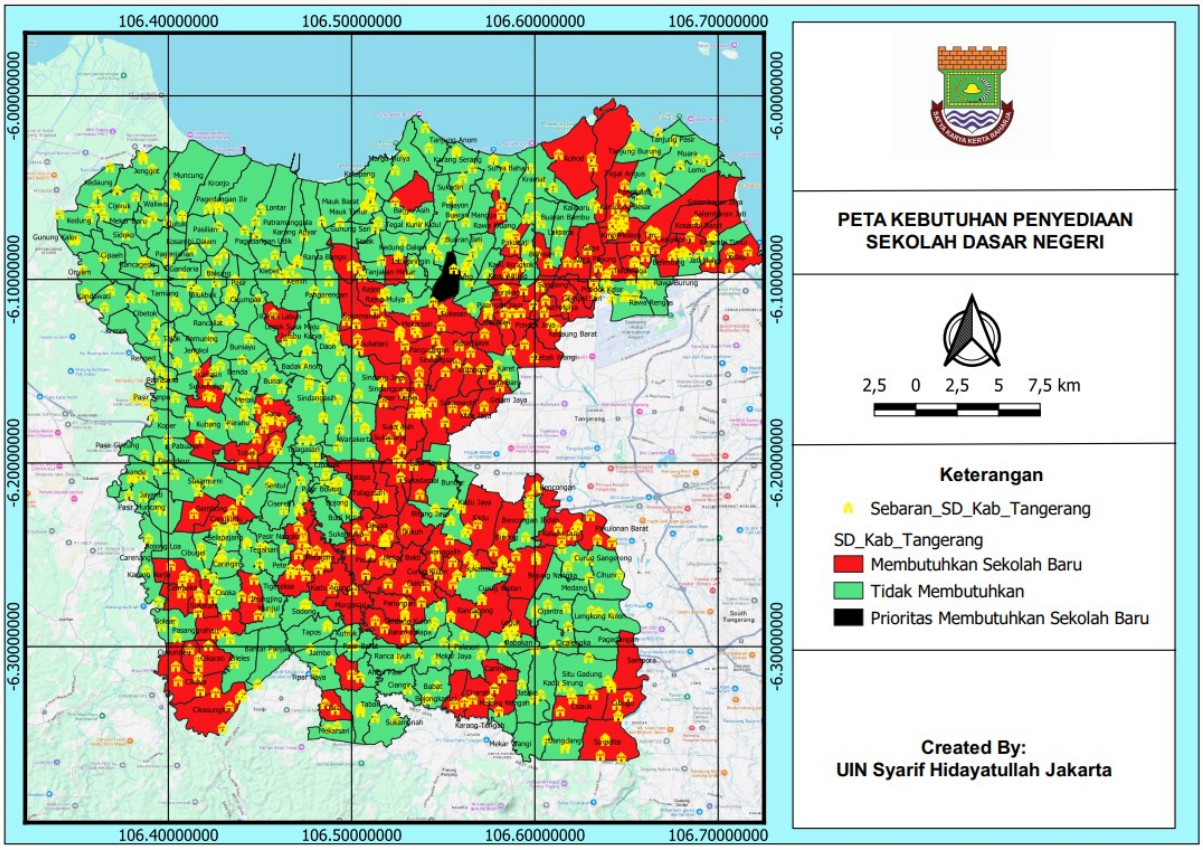
29. Kecamatan Sukamulya

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SD N BUNAR 1	228	28	8	9	0
2	SD N BUNAR 2	140	28	5	7	0
3	SD N BUNIAYU 2	128	28	5	6	0
4	SD N BUNIAYU I	361	28	13	10	3
5	SD N KALIASIN 1	330	28	12	12	0
6	SD N MERAK 1	388	28	14	17	0
7	SD N PARAHU 3	295	28	11	15	0
8	SD N SUKAMULYA 2	539	28	19	10	9
9	SD NEGERI BENDA 1	364	28	13	7	6

10	SD NEGERI BENDA 2	289	28	10	16	0
11	SD NEGERI BUNAR 3	192	28	7	9	0
12	SD NEGERI KALIASIN III	331	28	12	11	1
13	SD NEGERI KUBANG I	239	28	9	10	0
14	SD NEGERI KUBANG II	275	28	10	10	0
15	SD NEGERI MERAK 2	244	28	9	10	0
16	SD NEGERI PARAHU 1	347	28	12	9	3
17	SD NEGERI PARAHU 2	184	28	7	7	0
18	SD NEGERI SUKAMULYA 1	459	28	16	12	4
19	SDN KALIASIN 2	312	28	11	7	4
20	SDN MERAK 3	358	28	13	11	2
	Jumlah	**5146**			**173**	**29**

Berdasarkan analisa dari penulis yang didapatkan dari data DAPODIKDASMEN Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, Kecamatan Sukamulya dengan jumlah peserta didik 5146 dengan total 20 SDN, terlihat sebagian besar data SDN berwarna hijau atau SDN tercukupi kebutuhan ruang belajar.

B. Rekomendasi Unit SDN Baru



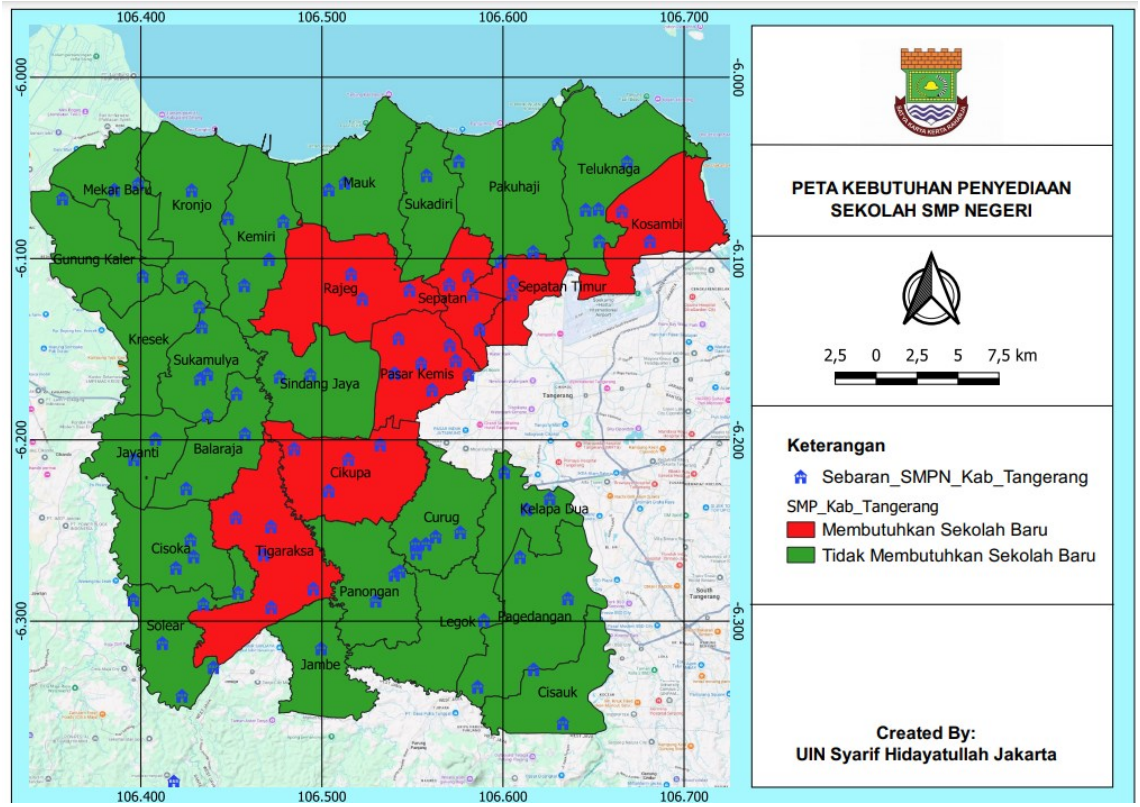
Sumber: Olahan data SIG dari Penulis

Berdasarkan data yang sudah penulis analisi pada poin A Bab IV dan kemudian diolah menggunakan sistem informasi geografis, penulis telah memetakan kecamatan yang membutuhkan unit SDN baru berdasarkan jumlah kepadatan peserta didik SDN dan wilayah desa di masing-masing kecamatan. Berikut adalah rekapitulasi kebutuha SDN bari di masing-masing kecamatan di Kabupaten Tangerang:

No	Kecamatan	Keterangan	
		Kebutuhann SDN Baru	Lokasi Desa SDN Baru
1	Balaraja	6	Balaraja (2), Cangkudu (1), Gembong(1) dan Saga(2)
2	Cikupa	4	Pasir Gadung (2), Pasir Jaya (1) dan Talaga (1)
3	Cisauk	5	Cibago, Civayur, Kedokan, Sampora dan Suradita (1 semua)
4	Cisoka	4	Campaka, Jeungjing, Sukatani, dan Karang Harja
5	Curug	8	Binong (2), Curug, Cukang Galih, Curug Kulon, Sukabakti, dan Kadu
6	Gunung Kaler	-	Tidak membutuhkan SDN Baru
7	Jambe	2	Daru dan Ranca Buaya
8	Jayanti	-	Tidak membutuhkan SDN Baru

9	Kelapa Dua	4	Benconga, Kampung Bambu (2), Pakulonan Barat (1) dan Bumi Kelapa Dua (1)
10	Kemiri	1	Ranca Buluh
11	Kosambi	8	Blimbing (2), Dadap, Kosambi (2), Pemukiman, Salembaran, Cenglong
12	Kresek	-	Tidak membutuhkan SDN Baru
13	Kronjo	-	Tidak membutuhkan SDN Baru
14	Legok	8	Bojongkamal, Rancagong (2), Caringin, Cirabrab, Legok (2), dan Serdang Wetan
15	Mauk	1	Kunir Lor
16	Mekar Baru	-	Tidak membutuhkan SDN Baru
17	Pagedangan	1	Malangnebgah
18	Pakuhaji	7	Buaran mangga, Gaga (2), Kiara Payung, Kohod, Pakuhaji, dan Rawa Boni
19	Panongan	8	Ciakar, Cipari, Mekar Bakti, Nalagati, Panongan (2), Peusar, Rancakalapa
20	Pasar Kemis	15	Kutabaru (2), Kutabumi (2), Kutajaya (2), Sindangsaru (2), Gekamjaya (2), Pangadegan (2), Pasar Kemis(2), Sukaasih
21	Rajeg	10	Rajeg (2), Bango, Tanjakan, Mekarsari (2), Sukamanah (2), Sukasari (2)
22	Sepatan	10	Karet (2), Bongkok, Mekar Jaya, Pondok jaya, Sarakan (2), Sepatan (2), kayu Agung
23	Sepatan Timur	11	Kampung Bayur, Kelor, Kedaung Barat (2), Lebak Wangi, Rawa Gempol, Sangiang (2), Pondok Kelor, Tanah Merah, Jati Mulya
24	Sindang Jaya	2	Sindang Panon dan Sukaharja
25	Solear	7	Cikasungka (2), Cireundeu, Pasangrahan (2), Cikareo, Cikuya
26	Sukadiri	2	Gintung (2)
27	Sukamulya	1	Sukamulya
28	Teluknaga	7	Kampung Melayu, Kapuk Jaya, Kebon Cau, Kedung Jaya, Pangkalan, Tanjung Burung, Teluk Naga
29	Tigaraksa	9	Bidara, Bugel, Cogreg, Tigaraksa, Matagara, Nagrak, Pinang, Babakan Tiga Raksa, Mustika
Jumlah		**160**	

C. Simulasi Pemetaan dan Kebutuhan SMPN



Sumber: Olahan data SIG dari Penulis

1. Kecamatan Balaraja

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 BALARAJA	1152	32	36	30	6
2	SMP NEGERI 2 BALARAJA	1129	32	35	31	4

3	SMP NEGERI 3 BALARAJA	839	32	26	29	0
4	SMP NEGERI 4 BALARAJA	640	32	20	18	2
	Jumlah	**3760**			**108**	**12**

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

2. Kecamatan Cisauk

	KECAMATAN CISAUK					
No	**Nama Sekolah**	**PD**	**Siswa/Rombel**	**Jumlah Rombel**	**Ketersediaan Kelas**	**Kekurangan R. Kelas**
1	SMP NEGERI 1 CISAUK	1052	32	33	29	4
2	SMP NEGERI 2 CISAUK	767	32	24	21	3
3	SMP NEGERI 3 CISAUK	1080	32	34	26	8
	Jumlah	**2899**			**76**	**15**

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

3. Kecamatan Gunung Kaler

No	**Nama Sekolah**	**PD**	**Siswa/Rombel**	**Jumlah Rombel**	**Ketersediaan Kelas**	**Kekurangan R. Kelas**
1	SMP NEGERI 1 GUNUNG KALER	255	32	8	17	0
2	SMP NEGERI 2 GUNUNG KALER	194	32	6	8	0
	Jumlah	**449**			**25**	0

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

4. Kecamatan Jambe

No	**Nama Sekolah**	**PD**	**Siswa/Rombel**	**Jumlah Rombel**	**Ketersediaan Kelas**	**Kekurangan R. Kelas**
1	SMP NEGERI 1 JAMBE	917	32	29	26	3
		917				3

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

5. **Kecamatan Jayanti**

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 JAYANTI	1200	32	38	28	10
2	SMP NEGERI 2 JAYANTI	914	32	29	24	5
		2114			**52**	15

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

6. **Kecamatan Kemiri**

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 KEMIRI	1010	32	32	26	6
2	SMP NEGERI 2 KEMIRI	236	32	7	11	0
3	SMP NEGERI 3 KEMIRI	317	32	10	6	4
		1563			**43**	10

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

7. **Kecamatan Kosambi**

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 KOSAMBI	1039	32	32	30	2
2	SMP NEGERI 2 KOSAMBI	848	32	27	24	3
3	SMPN 3 KOSAMBI	868	32	27	12	15
		2755			**66**	20

Keterangan: Membutuhkan satu unit SMPN Baru

8. **Kecamatan Kresek**

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 KRESEK	973	32	30	27	3
2	SMP NEGERI 3 KRESEK	136	32	4	5	0

3	SMPN 2 KRESEK	580	32	18	14	4
		1689			**46**	7

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

9. Kecamatan Kronjo

	KECAMATAN KRONJO					
No	**Nama Sekolah**	**PD**	**Siswa/Rombel**	**Jumlah Rombel**	**Ketersediaan Kelas**	**Kekurangan R. Kelas**
1	SMP NEGERI 1 KRONJO	852	32	27	26	1
2	SMP NEGERI 2 KRONJO	520	32	16	6	10
		1372			**32**	**11**

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

10. Kecamatan Legok

	KECAMATAN LEGOK					
No	**Nama Sekolah**	**PD**	**Siswa/Rombel**	**Jumlah Rombel**	**Ketersediaan Kelas**	**Kekurangan R. Kelas**
1	SMP NEGERI 1 LEGOK	1099	32	34	30	4
2	SMP NEGERI 2 LEGOK	973	32	30	24	6
3	SMP NEGERI 3 LEGOK	206	32	6	6	0
		2278			**60**	10

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

11. Kecamatan Mekar Baru

No	**Nama Sekolah**	**PD**	**Siswa/Rombel**	**Jumlah Rombel**	**Ketersediaan Kelas**	**Kekurangan R. Kelas**
1	SMP NEGERI 1 MEKARBARU	236	32	7	9	0
2	SMP NEGERI 3 MEKAR BARU	99	32	3	4	0
3	SMPN 2 MEKAR BARU	284	32	9	11	0
		619			**24**	

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

12. Kecamatan Pagedangan

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMPN 1 PAGEDANGAN	1062	32	33	31	2
2	SMPN 2 PAGEDANGAN	1005	32	31	22	9
3	SMPN 3 PAGEDANGAN	558	32	17	13	4
		2625			**66**	

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

13. Kecamatan Pakuhaji

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP N 1 PAKUHAJI	1253	32	39	31	8
2	SMP NEGERI 2 PAKUHAJI	1145	32	36	32	4
3	SMP NEGERI 3 PAKUHAJI	676	32	21	21	0
4	SMPN 4 PAKUHAJI	374	32	12	10	2
		3448			**94**	14

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

14. Kecamatan Pasar Kemis

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 PASARKEMIS	1176	32	37	39	0
2	SMP NEGERI 2 PASARKEMIS	1091	32	34	30	4
3	SMP NEGERI 3 PASAR KEMIS	764	32	24	27	0
4	SMP NEGERI 4 PASAR KEMIS	1176	32	37	30	7
5	SMP NEGERI 6 PASARKEMIS	754	32	24	11	13
6	SMPN 5 PASARKEMIS	966	32	30	25	5
7	SMPN 7 PASARKEMIS	550	32	17	12	5
		6477			**78**	**30**

Keterangan: Membutuhkan satu unit SMPN Baru

15. Kecamatan Sindang Jaya

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 SINDANG JAYA	894	32	28	24	4
2	SMPN 2 SINDANG JAYA	408	32	13	12	1
		1302			**36**	**5**

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

16. Kecamatan Sukadiri

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 SUKADIRI	783	32	24	20	4
		783			**20**	

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

17. Kecamatan Teluk Naga

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 TELUKNAGA	1084	32	34	30	4
2	SMP NEGERI 2 TELUKNAGA TANGERANG	995	32	31	23	8
3	SMP NEGERI 3 TELUKNAGA	862	32	27	22	5
4	SMP NEGERI 4 TELUKNAGA	286	32	9	9	0
		3227			**84**	17

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

18. Kecamatan Tigaraksa

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 TIGARAKSA	1047	32	33	29	4
2	SMP NEGERI 2 TIGARAKSA	1230	32	38	31	7

3	SMP NEGERI 3 TIGARAKSA	1026	32	32	20	12
4	SMP NEGERI 4 TIGARAKSA	759	32	24	18	6
5	SMPN 5 TIGARAKSA	655	32	20	12	8
		4717			**110**	37

Keterangan: Membutuhkan satu unit SMPN Baru

19. Kecamatan Cikupa

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 CIKUPA	973	32	30	17	13
2	SMP NEGERI 2 CIKUPA	1301	32	41	28	13
3	SMP NEGERI 3 CIKUPA	1015	32	32	24	8
4	SMP NEGERI 5 CIKUPA	397	32	12	11	1
5	SMPN 4 CIKUPA	738	32	23	18	5
		4424			**98**	40

Keterangan: Membutuhkan satu unit SMPN Baru

20. Kecamatan Panongan

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 PANONGAN	1073	32	34	27	7
2	SMP NEGERI 3 PANONGAN	68	32	2	2	0
3	SMPN 2 PANONGAN	931	32	29	24	5
		2072			**53**	12

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

21. Kecamatan Kelapa Dua

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 KELAPA DUA	1082	32	34	30	4
2	SMP NEGERI 2 KELAPA DUA	911	32	28	21	7

		1993			**51**	11

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

22. Kecamatan Solear

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 SOLEAR	780	32	24	22	2
2	SMP NEGERI 2 SOLEAR	1169	32	37	27	10
3	SMP NEGERI 5 SOLEAR	344	32	11	9	2
4	SMP NEGERI 6 SOLEAR	314	32	10	6	4
5	SMP NEGERI 7 SOLEAR	631	32	20	10	10
6	SMPN 3 SOLEAR	1064	32	33	24	9
7	SMPN 4 SOLEAR	854	32	27	18	9
		5156			**116**	44

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

23. Kecamatan Rajeg

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 RAJEG	1321	32	41	33	8
2	SMP NEGERI 2 RAJEG	910	32	28	25	3
3	SMPN 3 RAJEG	1044	32	33	17	16
		3275				27

Keterangan: Membutuhkan satu unit SMPN Baru

24. Kecamatan Sukamulya

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 SUKAMULYA	615	32	19	21	0
2	SMP NEGERI 2 SUKAMULYA	904	32	28	17	11
3	SMPN 3 SUKAMULYA	281	32	9	8	1

		1800			**46**	12

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

25. Kecamatan Curug

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 CURUG	1023	32	32	36	0
2	SMP NEGERI 2 CURUG	1022	32	32	27	5
3	SMPN 3 CURUG	789	32	25	21	4
4	SMPN 4 CURUG	850	32	27	24	3
5	SMPN 5 CURUG	652	32	20	20	0
		4336			**128**	11

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

26. Kecamatan Cisoka

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP N 1 CISOKA	1172	32	37	34	3
2	SMPN 2 CISOKA	920	32	29	21	8
3	SMPN 3 CISOKA	720	32	23	16	7
		7148			**199**	18

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

27. Kecamatan Sepatan Timur

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 SEPATAN TIMUR	1112	32	35	30	5
2	SMP NEGERI 3 SEPATAN TIMUR	721	32	23	10	13
3	SMPN 2 SEPATAN TIMUR	893	32	28	16	12

					56	30

Keterangan: Membutuhkan satu unit SMPN Baru

28. Kecamatan Mauk

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 MAUK	1268	32	40	36	4
2	SMP NEGERI 2 MAUK	1022	32	32	30	2
		2290			**66**	6

Keterangan: Tidak Membutuhkan SMPN Baru

29. Kecamatan Sepatan

No	Nama Sekolah	PD	Siswa/Rombel	Jumlah Rombel	Ketersediaan Kelas	Kekurangan R. Kelas
1	SMP NEGERI 1 SEPATAN	1251	32	39	33	6
2	SMP NEGERI 2 SEPATAN	1011	32	32	25	7
3	SMPN 3 SEPATAN	876	32	27	17	10
4	SMPN 4 SEPATAN	825	32	26	10	16
		3963			**27**	39

Keterangan: Membutuhkan satu unit SMPN Baru

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian terkait "Pemetaan Kebutuhan SDN dan SMPN di Kabupaten Tangerang dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)" menunjukan bahwa untuk SDN hampir di semua kecamatan membutuhkan unit SDN baru, sedangkan untuk SMPN hanya sebagian kecil kecamatan yang membutuhkan unit SMPN baru. Pemetaan kebutuhan unit sekolah baru pada tingkat SDN di Kabupaten Tangerang dengan menggunakan SIG menghasilkan temuan bahwa terdapat 1600 unit sekolah baru yang diubutuhkan yang tersebar hampir disebagian besar kecamatan di Kabupaten Tangerang. Sedangkan pada tingkat SMPN dibutuhkan 7 unit SPMN Baru di beberapa sebagian kecamatan di Kabupaten Tangerang. Hasil penentuan kebutuhan unit sekolah baru ditingkat SDN maupun SMPN dihasilkan dari kepadatan jumlah peserta didik di Kabuapten Tangerang, sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi unit sekolah baru yang dibutuhkan oleh masing-masing kecamatan. Khusus untuk kebutuhan sekolah baru tingkat SMPN hanya dibutuhkan di tujuh kecamatan berikut: Kecamatan Kosambi, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan, Tiga Raksa, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Sepatan, dan Kecamatan Sepatan Timur.

B. Saran

Berdasarkan kajian dan hasil penelitian yang sudah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Prioritas Pembangunan SDN: Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan SDN baru di kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat kebutuhan paling mendesak, dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk usia sekolah dasar dan aksesibilitas sekolah.
2. Pemantauan dan Evaluasi SMPN: Untuk SMPN, penting dilakukan pemantauan rutin terhadap kecamatan yang membutuhkan sekolah baru, terutama untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk di masa depan yang dapat memengaruhi kebutuhan fasilitas pendidikan menengah pertama.
3. Optimalisasi Sistem Informasi Geografis (SIG): Aplikasi SIG yang digunakan dapat terus dioptimalkan untuk pemetaan kebutuhan pendidikan, termasuk integrasi data

demografi dan proyeksi pertumbuhan penduduk guna mendukung perencanaan jangka panjang.

C. Implikasi

Berdasarkan penelitian ini diharapkan pemerintah Kabupaten Tangerang khususnya dinas pendidikan yang terkait bisa melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pendidikan dasar khusunya tingkat sekolah menengah pertama negeri dengan cara menambah serta membangun fasilitas-fasilitas pendidikan di setiap kecamatan yang masih kekurangan fasilitas pendidikan guna mendukung program pemerintah pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun.

D. Evaluasi

Berdasarkan kajian pemetaan kebutuhan SDN dan SMPN di Kabupaten Tangerang menggunakan sistem informasi geografis (SIG) berikut terdapat evaluasi yang bisa diptimalkan pada penelitian selanjutnya:

1. Validitas Data: Pastikan data yang dimasukkan dalam aplikasi SIG selalu diperbarui secara berkala agar hasil analisis akurat dan relevan.
2. Keterlibatan Stakeholder: Libatkan berbagai pihak, seperti masyarakat setempat, pihak sekolah, dan tokoh masyarakat, dalam proses identifikasi kebutuhan untuk mendapatkan perspektif yang lebih holistik.
3. Efisiensi Pemanfaatan Fasilitas: Evaluasi kapasitas sekolah yang sudah ada untuk memastikan fasilitas digunakan secara optimal sebelum memutuskan pembangunan unit baru.

E. Rekomendasi

Kajian ini menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengadaan Lahan dan Anggaran: Segera identifikasi lokasi strategis untuk pembangunan SDN baru serta alokasikan anggaran pembangunan dengan mengacu pada tingkat kebutuhan di setiap kecamatan.
2. Sinergi Antarinstansi: Tingkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Tata Ruang, dan instansi terkait untuk mempercepat proses perencanaan dan pembangunan unit sekolah baru.
3. Pengembangan Modul SIG: Tambahkan fitur dalam aplikasi SIG yang memungkinkan simulasi dampak pembangunan sekolah terhadap aksesibilitas pendidikan, sehingga dapat menjadi alat bantu keputusan yang lebih komprehensif.

4. Perencanaan Jangka Panjang: Lakukan studi tambahan mengenai proyeksi kebutuhan pendidikan hingga beberapa tahun ke depan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia Statistical Yearbook Of Indonesia 2015*, *Katalog BPS. 1101001*. Jakarta: BPS, 2015.

--------. *Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2016*, *Katalog Bps. 1102001.3603*. Kabupaten Tangerang: BPS, 2016.

--------. *Statistik Daerah Kabupaten Tangerang 2018*, *Katalog BPS. 1101002.3603*. Jakarta: BPS, 2018.

Elly, Muhammad Jafar. *Sistem Informasi Geografis: Menggunakan Aplikasi ArcView 3.2 Dan ErMapper 6.4*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Hamdi, Asep. "Analisis Sebaran Lokasi SMP Negeri Kaitannya Dengan Aksesibilitas Mendapatkan Pendidikan Di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten". *Skripsi* pada Jurusan Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2009. tidak dipublikasikan.

Hardjowigeno, Sarwono dan Widiatmaka. *Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tataguna Lahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cet. II, 2011.

Hargito. "Integrasi Sebaran Lokasi SMP Dan Sebaran Permukiman Di Kota Pati". *Tesis* pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro: 2009. tidak dipublikasikan.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga, 2009.

Juhadi, Pola-Pola Pemanfaatan Lahan dan Degradasi Lingkungan Pada Kawasan Perbukitan. *Jurnal Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*, 2007.

Mahmud, Marzuki. *Landasan Pendidikan*. Tangerang Selatan: Haja Mandiri, Cet. II, 2014.

Mahsunah, Durrotul. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 2013. Martin. *Perencanaan Pendidikan: Persfektif Proses Dan Teknik Dalam Penyusunan Rencana Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Miarsih. "Kajian Penentuan Lokasi Gedung SD-SMP Satu Atap Di Kabupaten Demak". *Tesis* pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro: 2009.
tidak dipublikasikan.

Muliakusuma, Sutarsih. “Proyeksi Penduduk”. Dalam Prathama Rahardja, ed. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

Mulyasana, Dedy. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. I, 2011.

Nurdin, Harto. “ Struktur Dan Persebaran Penduduk”. Dalam Prathama Rahardja, ed. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. *Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA*. Jakarta : tt.p, 2007.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009. *Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah*, Jakarta: tt.p, 2009.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017. *Tentang PPDB Pada Taman Kanak-kanak, SD, SMP, Dan SMA, SMK Atau Bentuk Lain Yang Sederajat*. Jakarta : tt.p, 2017.

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Dan Praktis*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. III, 2016.

Primadani, Prasti. “Pemetaan Kualitas Tanah Pada Beberapa Penggunaan Lahan di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar”. *Skripsi* pada Program Studi Ilmu Tanah Universitas Sebelas Maret: 2008. tidak dipublikasikan.

Purwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendiikan Teoritis Dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. XIX, 2009.

Rasyidin, Waini. *Pedagogik Teoritis Dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Ratna, Nyoman Kutha. *Metode Penelitian Kajian Budaya Dan Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Putaka Pelajar, Cet. I, 2010. Riyanto. dkk. *Pengembangan Aplikasi Sisitem Informasi Geografis Berbasis Desktop Dan Web*, Yogyakarta: Gava Media, 2009.

Sahetapy, J. Evaluasi Lahan Untuk Pemetaan Tipe Pertanian Konservasi Pada Kawasan Pengelolaan Sampah Terpadu Toisapu. *Jurnal Budidaya Pertanian Program Studi Ilmu Tanah Universitas Pattimura Ambon*, 2009.

Sasrimita. "Sistem Informasi Geografis Pemetaan Sekolah Di Kecamatan Tanjung Batu Berbasis Mobile". *Skripsi* pada Jurusan Sistem Informasi UIN Raden Fatah Palembang: 2015. tidak dipublikasikan.

Sitorus, Lambok Ford Irwan Satari. "Analisis Sebaran Sekolah Menengah Dalam Upaya Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Di Kota Tebing Tinggi". *Tesis* pada Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara: 2009. tidak dipublikasikan.

Sodikin. *Sistem Informasi Geografis & Penginderaan Jauh*. Jakarta: tt.p, 2015.

Soendjojo, Hadwi dan Riqqi, Akhmad. *Kartografi*. Bandung: ITB, 2012.

Suharyono. *Dasar-Dasar Kajian Geografi Regional*. Yogyakarta: Ombak, 2013.